

Sugiharso Gunawan
Sugiyono Karsono



Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP dan MTs Kelas IX



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional



Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP dan MTs Kelas IX

Penulis :

Sugiharso

Sugiyono

Gunawan

Karsono



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

3

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi oleh Undang-Undang

Pendidikan Kewarganegaraan

Penulis : Sugiharso
Sugiyono
Gunawan
Karsono
Design Cover : Samsuel
Editor : Wahyu
Ilustrasi : Joemady, Sekar
Setting : Dewi, Wahyu, Watik, Eni, Novi
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

370.114 7
PED

Pendidikan Kewarganegaraan 3 : Untuk SMP/MTs Kelas IX
/ penulis Sugiharso...[et al] ; editor Wahyu Muhammadi ;
ilustrasi Joemady, Sekar . -- Jakarta : Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
vi, 154 hlm. : illus. ; 25 cm.

Bibliografi ; hlm. 149-150

Indeks : hlm. 154

ISBN 978-979-068-153-8 (nomor jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-163-7

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran

I. Judul II. Wahyu Muhammadi III. Joemady IV. Sekar V. Sugiharso

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari Penerbit CV. Adi Perkasa

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009

Diperbanyak oleh

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009
Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala pertolongan-Nya buku teks pelajaran Kewarganegaraan untuk kelas IX SMP/MTs telah dapat kami selesaikan.

Buku ini disusun dengan harapan para siswa mampu (1) berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sikap antikorupsi; (3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; dan (4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Buku ini kami kemas dengan materi yang akurat dan mutakhir. Selain itu, siswa diajak untuk memiliki wawasan produktivitas, rasa ingin tahu, kecakapan hidup, wawasan kebhinekaan, dan mampu berpikir kontekstual. Agar lebih mudah dipahami, buku ini menggunakan bahasa yang komunikatif, interaktif, dan merangsang siswa untuk berpikir kreatif, kritis, dan inovatif.

Semoga buku ini benar-benar bermanfaat khususnya bagi para siswa untuk membentuk pribadi yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya agar menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Klaten, Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Bab I Pembelaan Negara	1
A. Hakikat Negara	4
B. Kewajiban Membela Negara	17
C. Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara	22
D. Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara	31
Bab II Pelaksanaan Otonomi Daerah	41
A. Hakikat Otonomi Daerah	43
B. Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik di Daerah	58
Bab III Globalisasi dalam Kehidupan	83
A. Hakikat Globalisasi	85
B. Politik Luar Negeri Bebas Aktif	93

C. Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Masyarakat Berbangsa dan Bernegara	97
D. Mensikapi Dampak Globalisasi	101
Bab IV Prestasi Diri	111
A. Hakikat Prestasi Diri	113
B. Potensi Diri	121
C. Peran Aktif dalam Berbagai Aktivitas untuk Mewujudkan Prestasi Diri	128
 DAFTAR PUSTAKA	 149
 KAMUS KECIL	 151
 INDEKS	 154

Bab I Pembelaan Negara

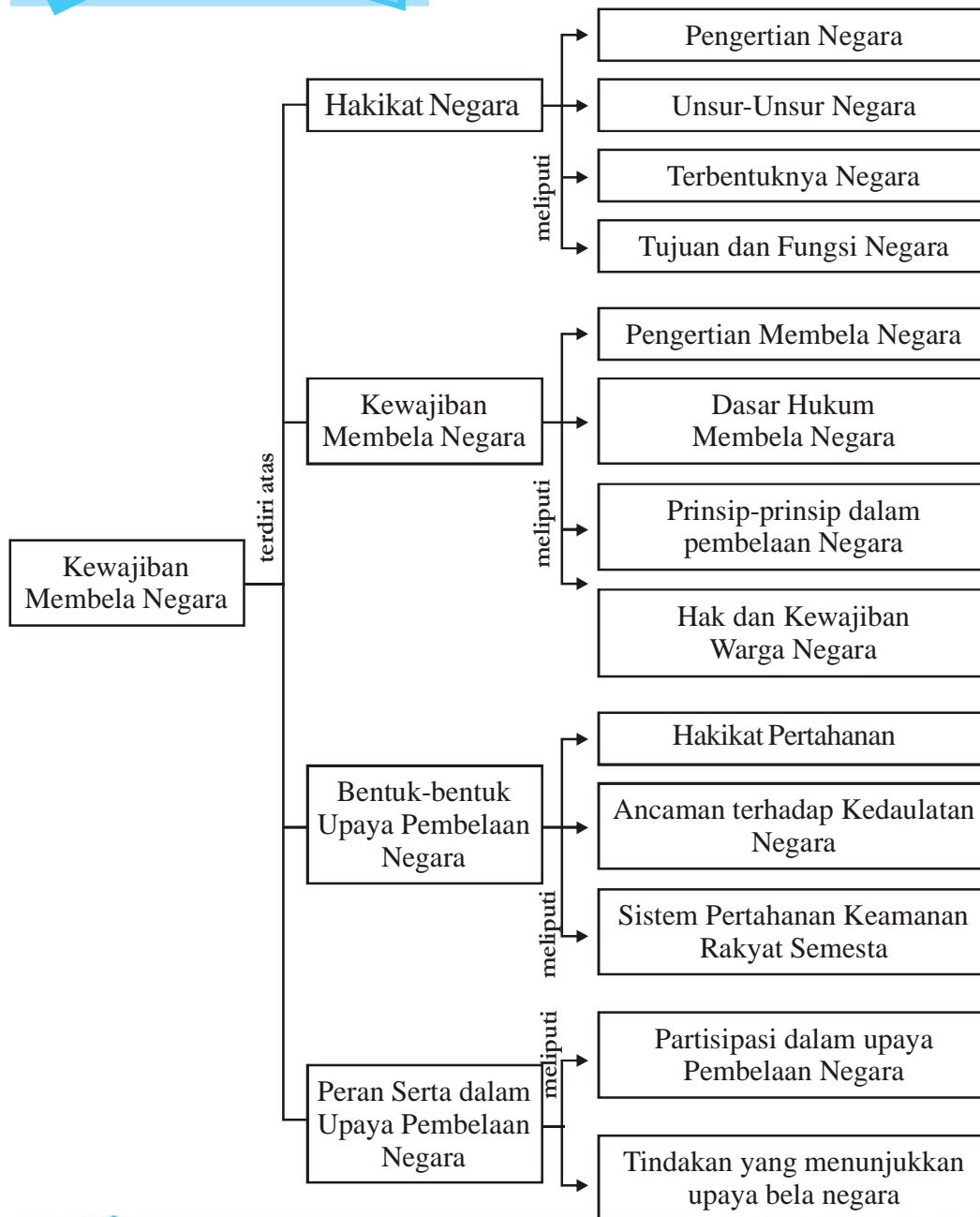


(Sumber : 50 Tahun Indonesia Merdeka)

Gambar 1.1. 🗨 *Peringatan HUT TNI*

Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan selama 350 tahun. Selama itu, juga bangsa Indonesia tidak pernah menyerah untuk mendapatkan kemerdekaan. Perjuangan para pahlawan untuk mendapatkan kemerdekaan dilandasi adanya rasa cinta tanah air dan bangsa. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan.

PETA KONSEP

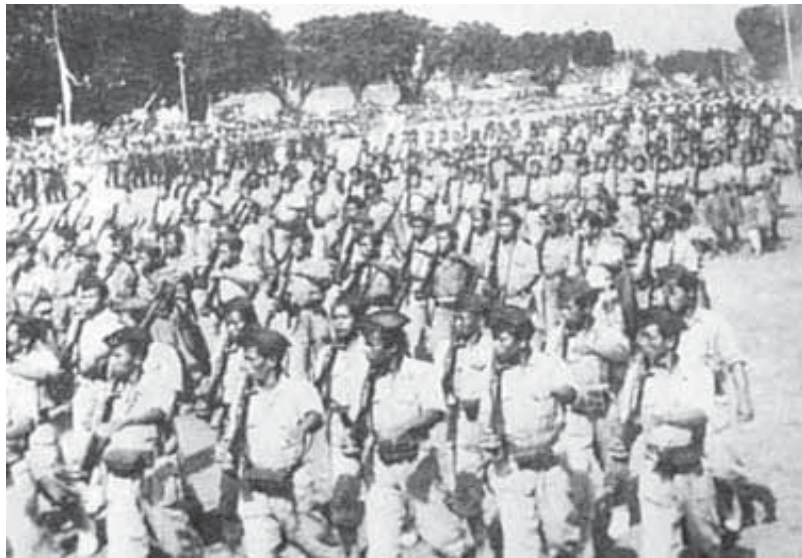


Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian dapat:

1. menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara,
2. mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara,
3. menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara.

Sebagai bangsa yang dilahirkan dan dibesarkan di tanah air Indonesia, lalu apa yang harus kalian lakukan terhadap negara Indonesia yang merdeka itu? Kemerdekaan itu tidak akan ada artinya apabila bangsa Indonesia tidak mau membela negara. Dalam bentuk bagaimanakah pembelaan yang dapat kalian lakukan?



(Sumber : www.sukiman.com)

Gambar 1.2. 🏠 *Perjuangan merebut kemerdekaan dilandasi rasa cinta tanah air*

Kalian harus menyadari dengan sepenuh hati tanpa adanya pembelaan negara akan jatuh ketangan bangsa-bangsa lain lagi. Bangsa Indonesia harus belajar sejarah yang telah mencatat bahwa bangsa Indonesia pada tempo dulu telah menjadi bangsa yang besar, tetapi kemudian menjadi bangsa yang tertindas oleh penjajah.

Dalam bab ini akan kita pelajari tentang pembelaan Negara, dan upaya pembelaan negara, serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara. Supaya kalian mendapatkan gambaran tentang materi yang terdapat dalam bab ini kalian simak terlebih dahulu peta konsep bagian depan.

Kata Kunci

Pembelaan negara, kedaulatan, warga negara, pertahanan, ancaman

A. Hakikat Negara

1. Pengertian Negara

Untuk memahami pengertian negara terlebih dahulu marilah kita pahami dahulu istilah *negara*. Istilah negara berasal dari (bahasa Jerman dan Belanda) *staat*, bahasa Inggris *state*, dan Prancis *etat*, serta menurut bahasa Latin *statum*. Menurut Marcus Tullius Cicero, *statum* diartikan sebagai kedudukan yang berkaitan dengan kedudukan persekutuan orang. Menurut Prof. Mr. L.J. Van Apeldoorn, dalam bukunya yang berjudul “*Inleiding tot de Studie van Het Nederlandsche Recht*” negara diartikan penguasa, yaitu untuk menyatakan bahwa orang atau orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah.

Berdasarkan peristilahan tersebut maka negara dapat diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.

Untuk memahami pengertian tentang negara, berikut ini pendapat para pakar memberikan pengertian tentang negara, antara lain sebagai berikut:

a. George Jellinek

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

b. George Wilhelm Friedrich Hegel

Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

c. Mr. Kranenburg

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

d. Roger F. Saltau

Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

e. Meriam Budiardjo

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada perundangan melalui penguasaan kontrol dari kekuasaan yang sah.

f. Prof. Dr. Djokosoetono

Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

g. Prof. Dr. Soenarko

Negara organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souverign* (kedaulatan).

Tugas

Life Skills : Kecakapan Akademik

Rangkumlah pengertian negara menurut para pakar di atas.
Hasilnya serahkan kepada gurumu dan mintalah pendapatnya.

2. Unsur-Unsur Negara

Negara merupakan sebuah organisasi masyarakat, maka dapat berdiri dengan kokoh apabila seluruh unsur-unsurnya dapat terpenuhi semuanya. Beberapa pakar mengemukakan pendapat tentang unsur-unsur negara.

Meriam Budiardjo (1986 : 41), menyatakan bahwa unsur-unsur pembentukan negara ada empat macam, yaitu:

- a. wilayah,
- b. penduduk,
- c. pemerintah, dan
- d. kedaulatan.

Menurut A.G. Pringgodigdo, negara adalah sebuah organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu adanya pemerintahan yang berdaulat, wilayah yang pasti, dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan sebuah *nation* (bangsa).

Menurut para ahli kenegaraan, Oppenheimer dan Lauterpacht, syarat berdirinya negara meliputi empat hal yaitu:

- a. adanya rakyat yang bersatu,
- b. adanya daerah atau wilayah,
- c. pemerintah yang berdaulat, dan
- d. pengakuan dari negara lain.

Berdasarkan Konvensi Montevideo (1933), unsur-unsur negara, meliputi *unsur konstitutif* dan *unsur deklaratif*. Adapun yang termasuk unsur konstitutif antara lain; rakyat (penghuni), wilayah yang permanen, penguasa yang berdaulat. Sedangkan yang termasuk dalam unsur deklaratif adalah kesanggupan menjalin hubungan dengan negara lain, dan pengakuan dari negara lain.

a. **Rakyat**

Rakyat adalah semua orang yang terdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara itu. Dalam satu negara rakyat merupakan unsur yang sangat penting. Suatu negara tidak dapat berdiri apabila tidak memiliki rakyat. Rakyat dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi *penduduk* dan *bukan penduduk*, *warga negara* dan *bukan warga negara*.

Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara secara tetap. Penduduk dalam suatu negara harus memenuhi unsur kediaman yang tetap. Bagi penduduk, mereka lahir secara turun temurun dan besar di dalam suatu negara tertentu. Bagi mereka yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap, penduduk tersebut tidak dapat disebut penduduk suatu negara.



(Sumber : www.balipost.co.id)

Gambar 1.3. ☞ *Turis mancanegara bukan merupakan penduduk Indonesia*

Bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Misalnya, para turis mancanegara atau tamu-tamu instansi di dalam suatu

negara. Yang dapat membedakan antara penduduk dan bukan penduduk adalah berdasarkan hak dan kewajibannya. Umpamanya, hanya yang berstatus penduduk saja yang dapat memiliki KTP di suatu negara.

Berdasarkan hubungan dengan pemerintah negara, rakyat dapat dibedakan menjadi, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Yang bukan warga negara adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, tetapi tunduk pada pemerintahan tempat mereka berada.

Bangsa merupakan rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Secara sosiologis bangsa merupakan kelompok paguyuban yang secara kodrati untuk hidup bersama dan senasib dan sepenanggungan di dalam suatu negara.

Dalam suatu negara cara menetapkan kewarganegaraan dengan tiga asas, yaitu asas *ius sanguinis*, *asas ius soli*, dan *naturalisasi*. Yang dimaksud asas *ius sanguinis* adalah suatu cara penetapan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan dari orang tua. Dengan demikian, apabila anak yang lahir dari ayah dan ibu yang berkewarganegaraan Indonesia, meskipun anak tersebut lahir dimana pun orang tuanya berada tetap berkewarganegaraan Indonesia.

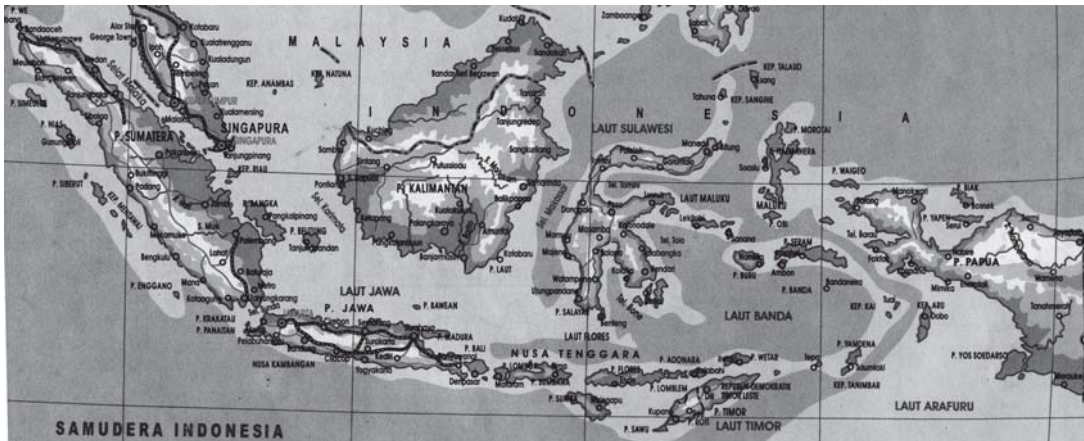
Ius Soli adalah suatu cara penetapan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Contoh penetapan kewarganegaraan berdasarkan asas *ius soli* adalah jika anak lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Cina, dan anak lahir di Indonesia, maka anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia sebagai tempat kelahirannya.

Selain mempergunakan asas *ius sanguinis* dan *asas ius soli* dalam penetapan kewarganegaraan ada juga menerapkan *naturalisasi*. *Naturalisasi* adalah suatu cara penetapan kewarganegaraan seseorang berdasarkan proses hukum kewarganegaraan yang berlaku dalam satu negara yang menyebabkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan. Bagi seseorang yang akan memperoleh kewarganegaraannya harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku dalam suatu negara yang didiami.

b. Wilayah

Wilayah merupakan tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat pemerintah untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahan.

Berdirinya suatu negara, tidak terpengaruh dengan luas atau sempitnya wilayah yang dimilikinya. Ada suatu negara wilayah sempit dan ada juga suatu negara dengan wilayah kekuasaan luas. Wilayah suatu negara harus permanen. Mengapa wilayah suatu negara harus permanen?



(Sumber : Atlas Indonesia dan Dunia)

Gambar 1.4. 🏠 Wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau seperti tergambar pada peta

Apabila negara tidak memiliki wilayah yang permanen, maka negara tersebut tidak dapat terbentuk. Oleh karena itu, penduduknya tidak dapat berdiam di dalamnya. Akan tetapi, ada kalanya suatu negara memiliki wilayah daerahnya yang berada di kawasan yang berbeda. Misalnya Prancis yang berada di daratan Eropa memiliki wilayah-wilayah di perairan Pasifik (Kaledonia, Wallis, Folinesia, dan Fortuna).

Wilayah suatu negara meliputi darat, laut, dan udara. Batas wilayah darat suatu negara dibatasi oleh wilayah darat dan/ atau wilayah laut negara lain yang berbatasan dengan negara yang bersangkutan. Perbatasan suatu wilayah negara ditentukan melalui perjanjian internasional. Batas wilayah suatu negara dapat berupa batas alam seperti sungai, danau, laut, pegunungan, atau lembah. Sedang yang termasuk batas buatan misalnya pagar tembok, dan pagar kawat berduri. Perbatasan negara menurut ilmu pasti yaitu mempergunakan garis lintang.

Wilayah lautan suatu negara terdiri dari perairan daratan, laut pedalaman, dan laut wilayah (teritorial). Wilayah udara meliputi udara yang berada di atas wilayah darat dan wilayah laut (perairan) teritorial suatu negara.



(Sumber : 50 Tahun Indonesia Merdeka)

Gambar 1.5. 🏠 *Batas buatan antar- negara dapat berupa pagar tembok*

Ruang udara yang menjadi wilayah suatu negara dapat dibedakan dengan ruang angkasa. Ruang angkasa adalah suatu wilayah yang tidak dapat dimiliki. Ruang angkasa ini dipergunakan seluruh umat manusia.

c. *Pemerintah yang Berdaulat*

Suatu negara yang berdiri harus mempunyai pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. *Pemerintah yang bagaimanakah yang mempunyai kekuasaan mengatur negaranya?* Pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur negara adalah pemerintah yang berdaulat penuh.

Pemerintah yang berdaulat adalah suatu pemerintah yang mempunyai kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun ke luar, untuk menjalankan tugas dan wewenang.

Kedaulatan ke dalam berarti bahwa kekuasaan negara tersebut dapat mengatur kehidupan negaranya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(Sumber : www.kapustakaan-presiden.pnri.go.id)

Gambar 1.6. 🗨 *Dengan proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi negara yang berdaulat.*

Kedaulatan ke luar berarti bahwa kekuasaan negara tersebut dapat mempertahankan negaranya sebagai negara merdeka dan berdaulat. Negara pun dapat menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya. Negara lain harus pula menghormati kekuasaan negara yang bersangkutan, dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya.

d. Pengakuan dari Negara Lain

Pengakuan dari negara lain merupakan unsur deklaratif. Unsur pengakuan dari negara lain meliputi pengakuan secara *de facto* dan secara *de jure*.

Pengakuan dari negara lain merupakan unsur tambahan bagi berdirinya suatu negara. *Mengapa demikian?* Suatu negara yang berdiri yang baru memerlukan adanya pengakuan dari negara lain yang berdaulat hal ini dikarenakan adanya pengakuan dari negara lain berarti awal bagi adanya hubungan diplomatik antarnegara.

Pengakuan secara *de facto* adalah pengakuan berdasarkan kenyataan (fakta). Pengakuan *de facto* bersifat sementara. Pengakuan secara *de facto* untuk berdirinya negara Republik Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945.



(Sumber :www.presidensby.info/)

Gambar1.7. ☞ *Kunjungan dari kepala negara sahabat merupakan pengakuan atas Kedaulatan Indonesia*

Pengakuan secara de jure adalah pengakuan terhadap syahnya suatu negara menurut hukum internasional. Dengan adanya pengakuan secara de jure, suatu negara yang baru berdiri mendapat hak-hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat internasional.

Hak yang diperoleh adalah suatu negara dapat diperlakukan sebagai negara yang berdaulat penuh oleh negara lain. Adapun yang menjadi kewajibannya adalah bertindak sebagai negara dan berusaha menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan internasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia secara de jure oleh dunia internasional sejak tanggal 18 Agustus 1945.

Tugas

Keingintahuan : Belajar Lebih Jauh

Carilah buku referensi tentang negara-negara mengakui kemerdekaan Indonesia setelah diproklamasikan. Hasilnya laporkan kepada gurumu!

3. Terbentuknya Negara

Pada awalnya manusia kehidupannya tidak terorganisasi secara teratur. Akan tetapi, dalam perkembangan kehidupan manusia dihadapkan adanya berbagai persoalan yang semakin

rumit. Persoalan demi persoalan yang dihadapi manusia baik secara individu maupun sosial silih berganti bermunculan. Untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan manusia, kemudian membentuk suatu organisasi yang bernama negara.

Terbentuknya suatu negara dapat terjadi secara primer dan terjadi secara sekunder.

a. *Terjadinya Negara Secara Primer*

Terjadinya suatu negara diawali dengan adanya kesadaran manusia, bahwa sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia membentuk kelompok-kelompok yang dinamakan keluarga. Dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum yang dinamakan suku.

Dalam salah satu suku dipimpin oleh seorang kepala suku. Kepala suku berperan sebagai *primus inter pares*, artinya orang yang pertama di antara yang sederajat. Kemudian satu suku, terus berkembang menjadi dua suku, tiga suku dan seterusnya menjadi semakin komplek dan besar.

Terbentuknya kelompok besar ini didasari adanya persamaan nasib, persamaan budaya dan lain-lain. Kelompok ini kemudian dipimpin oleh seorang di antara mereka yang dianggap terkemuka yang disebut raja. Kemudian muncul suatu gagasan dari tiap-tiap kelompok mempunyai keinginan untuk memiliki atas kekayaan, seperti tanah, harta benda lainnya.

Dengan adanya keinginan-keinginan tersebut kemudian mendorong tumbuhnya kesadaran untuk membentuk negara. Dengan terpilihnya seorang pemimpin, maka rakyat menyerahkan kekuasaan tertinggi kepada penguasa.

b. *Terjadinya Negara Secara Sekunder*

Terjadinya negara secara sekunder adalah terjadinya suatu negara dipandang dari lingkungan negara lain. Negara yang baru dapat dinyatakan sebagai negara apabila telah memperoleh pengakuan dari lain.

Pengakuan dari negara lain apabila suatu negara telah memproklamasikan kemerdekaan bangsa atau kelompok. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang penting bagi berdirinya suatu negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelumnya merupakan negara yang terjajah. Dengan proklamasi kemerdekaan berarti mengakhiri pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, negara-negara lain mau tidak mau harus mengakui baik secara *de facto* ataupun secara *de jure*. Pemerintah baru Indonesia berhak menyusun kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri.

Perjalanan berikutnya, negara Indonesia mempunyai pemerintah yang mandiri, tertib, stabil, dan kuat. Akhirnya negara Indonesia dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan baik, sehingga secara de facto dan de jure keberadaannya diakui dunia.



(Sumber : ClipArt CorelDraw)

Gambar 1.8. 🗨️ Tujuan negara Indonesia dilambangkan sila ke-lima dari Pancasila

4. Tujuan dan Fungsi Negara

Negara merupakan organisasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap negara mempunyai tujuan yang berbeda. Apakah tujuan dan fungsi dari suatu negara itu?

a. Tujuan Negara

Yang dimaksud tujuan negara adalah suatu sasaran yang hendak dicapai oleh negara. Tujuan negara merupakan ide yang statis dan bersifat abstrak-ideal kalau sudah ditetapkan. Tujuan negara adalah harapan yang dicita-citakan. Meskipun pada akhir dari tujuan itu sama, yaitu menciptakan kebahagiaan rakyatnya (*bonum publicum / commonwealth*).

Untuk mencapai tujuan negara tersebut negara bertugas mengatur kehidupan dalam negara sebaik-baiknya agar tujuan negara tercapai. Pada saat ini tujuan tiap-tiap negara mengutamakan adanya keamanan dan ketentraman umum, pertahanan negara, pemerintahan dalam negeri, dan keadilan.

Keamanan dan ketentraman umum artinya menjamin keselamatan jiwa dan harta benda warga negara. Pertahanan negara artinya negara mampu menghadapi berbagai ancaman yang datang. Negara bertujuan untuk memberikan keadilan bagi rakyatnya.

Mengenai tujuan negara Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- b. memajukan kesejahteraan umum,
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa,
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan demikian negara Indonesia suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan membentuk masyarakat yang adil dan makmur.


Secara umum suatu negara yang merupakan suatu organisasi kekuasaan yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang mendiami suatu wilayah dan memiliki suatu tujuan yang sama. Maka tujuan negara dapat dikelompokkan menjadi tiga hal yaitu:

- a. untuk memperluas kekuasaan semata,
- b. menyelenggarakan ketertiban umum,
- c. mencapai kesejahteraan umum.

Untuk memahami tentang tujuan negara, berikut ini pendapat para ahli mengemukakan tujuan negara.



(Sumber :
www.philosophyprofessor.com)

Gambar 1.9. 
Thomas Aquinas

1. **Plato**

Tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia baik sebagai perseorangan (individu) maupun sebagai makhluk sosial.

2. **Roger H. Soltau**

Tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.

3. **Thomas Aquinas dan St. Agustinus**

Tujuan negara adalah untuk menciptakan penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan.

4. **Charles E. Merriam**

Tujuan negara adalah sebagai berikut:

- a) Keamanan ekstern (*external security*), artinya negara bertugas melindungi warga negaranya terhadap ancaman dari luar,
- b) Pemeliharaan ketertiban intern (*maintenance of intenal order*), artinya dalam masyarakat yang tertib terdapat pembagian kerja dan tanggung jawab masyarakat yang tertib terdapat pembagian kerja dan tanggung jawab pelaksanaan peraturan-peraturan segenap fungsionaris negara, terdapat pula badan-badan, prosedur dan usaha-usaha yang dimengerti oleh segenap warga negara dan yang dianggap dilaksanakan untuk memajukan kebahagiaan bersama.

- c) Keadilan (*justice*), terwujudnya suatu sistem di mana terdapat saling pengertian dan prosedur-prosedur yang diberikan kepada setiap orang apa yang telah disetujui dan telah dianggap patut.
- d) Kesejahteraan (*welfare*), kesejahteraan meliputi keamanan, ketertiban, keadilan dan kebebasan.
- e) Kebebasan (*freedom*), adalah kesempatan mengembangkan dengan bebas hasrat-hasrat individu akan ekspresi kepribadiannya yang harus disesuaikan gagasan kemakmuran umum.

Tugas

Wawasan Produktivitas : Etos Kerja

Buatlah suatu karya ilmiah dengan tema peran serta siswa dalam mencapai tujuan negara. Apabila mengalami kesulitan bertanyalah kepada gurumu. Hasilnya bacakan di depan kelas.

b. Fungsi Negara

Setiap negara selain mempunyai tujuan juga memiliki suatu fungsi. Apakah fungsi suatu negara? Untuk mengetahui tentang fungsi suatu negara, perlu kiranya mengetahui pengertian fungsi negara terlebih dahulu.

Fungsi negara adalah pelaksanaan dari tujuan yang hendak dicapai. Fungsi negara menunjukkan gerak dalam suasana kenyataan atau dunia nyata. Negara yang baik adalah negara yang dapat menggerakkan jalannya roda pemerintahan secara efektif sehingga apa yang menjadi fungsi negara juga berfungsi dengan baik.

Miriam Budiardjo (1986:45), menyatakan bahwa tiap negara pada umumnya menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. *Melaksanakan penertiban.* Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat negara berusaha untuk menertibkan.
- b. *Mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat.* Fungsi ini merupakan fungsi hakiki. Negara berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- c. *Mengusabakan pertahanan.* Pertahanan ini diperlukan untuk menjaga berbagai ancaman atau serangan dari luar.
- d. *Menegakkan keadilan.* Upaya untuk menegakkan keadilan dilaksanakan melalui badan-badan penegak hukum dan badan-badan penegak hukum dan badan-badan peradilan.

Sedangkan menurut Charles E. Merriam, menyebutkan bahwa negara mempunyai lima macam fungsi yaitu; keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan.



(Sumber : www.mediaindo.co.id)

Gambar 1.10. 🗨 *Fungsi pertahanan dilaksanakan oleh TNI*

Untuk mewujudkan tujuan negara, Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi pertahanan negara, fungsi keamanan dan ketertiban, kesejahteraan dan kemakmuran, dan fungsi keadilan.

Fungsi pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala macam ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara. Untuk menjalankan fungsi pertahanan dilaksanakan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat ditugaskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Agar dalam masyarakat tidak timbul adanya kesenjangan sosial, pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan adanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dan pemerintah berusaha untuk menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum.

Wawasan Kebangsaan : Apresiasi Kekayaan Daerah

Indonesia kaya akan sumber daya alam. Banyak perusahaan asing yang ikut mengolah kekayaan alam tersebut. Apakah keberadaan perusahaan asing tersebut merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia? Diskusikan dengan temanmu!

B. Kewajiban Membela Negara

Membela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. *Apakah kalian telah mengetahui apa yang dimaksud dengan upaya bela negara?*

1. Pengertian Membela Negara

Upaya bela negara merupakan suatu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dilaksanakan secara teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi rasa cinta pada tanah air.

Membela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam UUD 1945. Selain sebagai hak dan kewajiban, membela negara merupakan suatu kehormatan bagi setiap warga negara yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu, membela negara sudah sepatutnya dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.



(Sumber : 50 Tahun Indonesia Merdeka)

Gambar 1.11. 🇮🇩 TNI siap untuk mempertahankan kedaulatan negara RI

Dalam kehidupan bernegara, pertahanan dan keamanan merupakan suatu hal yang utama untuk menjamin kelangsungan hidup negara. Negara yang tidak mampu mempertahankan diri dari segala macam ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, negara tidak dapat mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 diperoleh dengan melalui pengorbanan jiwa dan raga dari para pahlawan. Sudah sepantasnya kita untuk membela dan mempertahankan, serta menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kini, kita juga mempunyai tugas untuk mengisi kemerdekaan.

Dengan rasa cinta tanah air dan kemauan yang tinggi untuk maju dapat membawa memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan masyarakat.

Tugas

Wawasan Kebhinekaan : Semangat Nasionalisme

Sri Sultan Hamengkubuwono I diangkat menjadi pahlawan nasional. Beliau sangat gigih melawan penjajah. Carilah berita di media massa tentang perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono I.

2. Dasar Hukum Pembelaan Negara

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam upaya membela negara. Hak dan kewajiban setiap warga negara dalam upaya pembelaan negara diatur dengan undang-undang. Adapun peraturan perundang-undangan dalam upaya pembelaan negara adalah:

a. UUD 1945

- 1) Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hak dan kewajiban ikut serta setiap warga negara dalam upaya pembelaan negara terdapat dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk.

- 2) Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pernyataan tentang hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan dimasukkan ke dalam kelompok Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- c. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional. Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peranan Tentara Nasional Republik Indonesia dan Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- e. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Menurut pasal 9 UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

3. Prinsip-Prinsip dalam Pembelaan Negara

Bagi suatu negara yang merdeka dan berdaulat, pertahanan negara merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negaranya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara berprinsip bahwa Indonesia mempunyai hak dan kewajiban membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Tidak ada seorang warga negara yang boleh menghindarkan diri dari kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Prinsip ikut serta dalam pembelaan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara mengandung makna bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, mengenai pertahanan negara bangsa Indonesia berpandangan sebagai berikut:

- a. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
- b. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- c. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- d. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Saronji Dahlan (2005:133) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan segala ancaman.
- b. Pembelaan negara dapat diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara.
- c. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Segala perselisihan dan pertikaian yang timbul dari hubungan antarbangsa atau antarnegara penyelesaian melalui cara damai. Bagi bangsa Indonesia, kekerasan (perang) merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan pertikaian dan perselisihan jika secara damai tidak berhasil.

Prinsip demikian ini menunjukkan pandangan bahwa bangsa Indonesia tentang perang dan damai.

- d. Bangsa Indonesia menentang segala macam bentuk penjajahan dan menerapkan politik bebas aktif. Untuk pertahanan negara keluar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam.
- e. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta yang berarti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai kesatuan pertahanan.
- f. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut, bangsa Indonesia tidak terikat atau tidak turut serta dalam suatu pakta pertahanan yang ada pada saat ini. Indonesia menjadi anggota negara-negara Nonblok.

4. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. *Setelah merdeka, sebagai warga negara apa yang harus kita lakukan agar kemerdekaan tidak jatuh ke tangan bangsa lain lagi?* Kita berkewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Keikutsertaan dalam upaya pembelaan negara telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Mengapa kita harus ikut serta dalam upaya pembelaan negara?

Membela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Membela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. Selain sebagai hak dan kewajiban membela negara merupakan suatu kehormatan bagi setiap warga negara yang diberikan oleh negara.

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, juga dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Dengan demikian dalam penyelenggaraan pertahanan negara mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia mempunyai hak dan kewajiban membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak ada seorang warga negara yang tidak mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan. Pembelaan negara hendaknya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada diri sendiri.

Tugas

Life Skills : Kecakapan Sosial

Diskusikan dengan kelompok diskusi kalian!

Bagaimana menurut pendapat kalian, jika pembelaan negara itu sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada seluruh lapisan masyarakat!

Apakah pernyataan tersebut sesuai dengan suara hati nurani kalian, sebagai warga negara Indonesia.

Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas.

C. Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara

1. Hakikat Pertahanan Negara

Salah satu fungsi dari pemerintah negara Indonesia adalah mengatur dan menyelenggarakan seluruh upaya untuk menjamin keberadaan bangsa dan negara serta keutuhan wilayah Indonesia. Upaya ditempuh melalui pemeliharaan dan peningkatan keamanan nasional yang dilaksanakan dengan penyelenggaraan upaya pertahanan negara secara berlanjut.

Menurut pasal 6 UU No. 3 tahun 2002, upaya pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.



(Sumber: www.geocities.com)

Gambar 1.12. **☞ Kekayaan alam Indonesia yang melimpah wajib kita pertahankan**

Mengapa masalah pertahanan negara Indonesia, telah memiliki konsep pertahanan negara? Hal ini dikarenakan Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samodra. Indonesia terletak pada posisi silang, Indonesia memiliki wilayah kedaulatan yang luas. Wilayah lautan yang luas dengan potensi sumber daya alam yang besar. Selain itu, Indonesia wilayahnya berupa kepulauan yang terpisah-pisah. Inilah tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sejak merdeka sampai saat ini.

Dengan adanya tantangan yang berat ini, maka dalam undang-undang pertahanan negara Indonesia dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Untuk mempertahankan kehidupan kenegaraan, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat mutlak untuk menjamin kelangsungan hidup negara.

Tugas

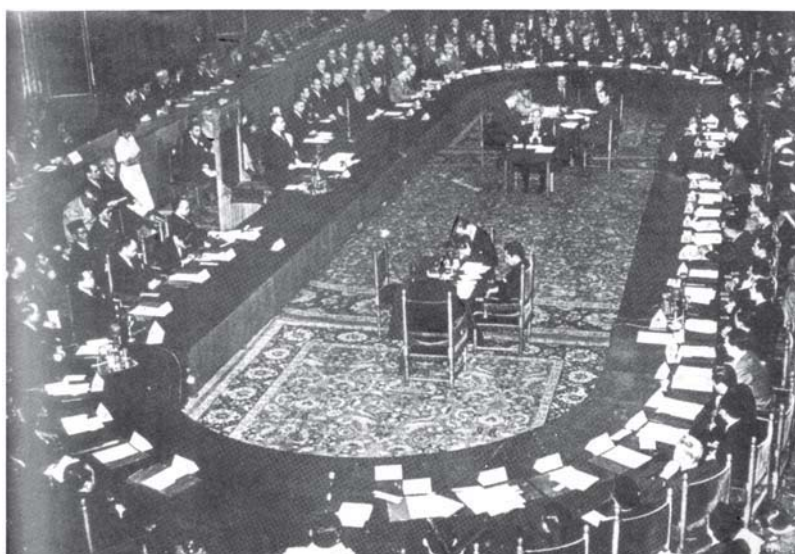
Wawasan Kebhinekaan : Kekayaan Daerah

Kalian wajib mengenal kekayaan alam di daerahmu. Kekayaan alam itu wajib di jaga agar tidak diambil oleh bangsa lain tanpa izin negara. Buatlah daftar kekayaan alam daerahmu serta bagaimana cara menjaganya

2. Ancaman terhadap Kedaulatan Negara

Semenjak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, berbagai ancaman telah dihadapi. Ancaman-ancaman tersebut datang dari luar negeri maupun yang datang dari dalam negeri. *Apakah yang dimaksud dengan ancaman?*

Ancaman adalah setiap usaha dan aktifitas, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman yang dapat membahayakan atas kelangsungan hidup bangsa dapat berupa ancaman militer dan dapat juga ancaman yang berbentuk nonmiliter.



(Sumber : Atlas Sejarah)

Gambar 1.13. ☞ *Konferensi Meja Bundar (KMB). Perjuangan mempertahankan dilakukan melalui meja perundingan*

Ancaman militer merupakan suatu ancaman dengan mempergunakan kekuatan senjata terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman militer yang datang dari luar negeri yang pernah kita hadapi, misalnya datangnya pasukan Belanda yang bersama-sama dengan pasukan Sekutu yang bermaksud ingin menjajah Indonesia kembali.

Mereka tidak rela Indonesia menjadi negara merdeka. Untuk menghadapi kedatangan Belanda dan Sekutu, bangsa Indonesia mengobarkan perlawanan melalui berbagai pertempuran, seperti di Surabaya pada tanggal 10 Nopember 1945, pertempuran di Bandung, dan pertempuran di Semarang dan lain-lain. Sejak 21 Juli 1947 Belanda melakukan Agresi Militer ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan rasa cinta tanah air, rakyat Indonesia tetap teguh dan gigih dalam menghadapi tindakan agresi yang dilakukan pasukan Belanda. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dilakukan melalui pertempuran di medan perang dan melalui meja perundingan.

Belum selesai bangsa Indonesia menghadapi Agresi Belanda, telah muncul adanya ancaman yang datangnya dari dalam negeri sendiri. Ancaman yang datangnya dari dalam negeri ini misalnya adanya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Republik Maluku Selatan (RMS), PRRI/Permesta di Sumatra Barat, dan Pemberontakan G 30 S/PKI pada tahun 1965. Akan tetapi, atas ketangguhan bangsa Indonesia semua dapat diatasinya.

Dalam UU No.3 tahun 2002, ancaman yang bersifat militer yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dapat berupa sebagai berikut.

- a. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
- b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat militer.
- c. Spionase yang dilakukan negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.
- d. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.

Bangsa Indonesia pada masa kini, tetap menghadapi berbagai tantangan yang mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia. Berbagai ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia yang datangnya dari dalam negeri dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a. Ancaman kerusuhan dalam masyarakat yang ditimbulkan dari adanya kesenjangan sosial ekonomi. Hal ini terjadi dikarenakan pembangunan nasional tidak berhasil memperkecil ketidakadilan sosial ekonomi.
- b. Ancaman kerusuhan masyarakat yang disertai kekerasan. Ini dapat terjadi dikarenakan golongan tertentu memaksakan kepentingan sepihak, mereka melakukan pemaksaan sepihak.
- c. Ancaman pemberontakan bersenjata ditimbulkan oleh golongan yang inginkan mengubah ideologi negara dan membentuk negara baru. Hal ini dilakukan oleh kelompok eksterm kiri maupun kanan yang berkeinginan untuk mengubah pandangan dasar negara Indonesia dengan pandangan dasar mereka.

Keingintahuan : Belajar Lebih Jauh

Bacalah buku referensi tentang ancaman nonmiliter terhadap kedaulatan negara dan cara menanggulangnya


3. Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta

Menurut pasal 30 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. *Apakah yang dimaksud dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta?*”

Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Hankam rata) adalah suatu sistem pertahanan keamanan dengan komponen-komponen yang terdiri atas seluruh potensi, kemampuan dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral, serta berlanjut dalam rangka mencapai ketahanan nasional. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta bersifat semesta dalam konsep, semesta dalam ruang lingkup, dan semesta dalam pelaksanaan, dengan menggunakan dua cara pendekatan yaitu sistem senjata teknologi dan sistem senjata sosial.



(Sumber : www.sukiman.com)

Gambar 1.14.  Sistem pertahanan keamanan Rakyat semesta telah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia

Sesuai dengan pasal 30 UUD 1945 ayat 1 dan 2 mengandung makna yang perlu kita pahami sebagai berikut:

- a. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan merupakan hak dan kewajiban.
- b. Pertahanan dan keamanan negara RI, menggunakan sistem pertahanan dan keamanan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
- c. Kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedang dalam sistem keamanan adalah Polri.
- d. Kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung.

Hakikat pertahanan keamanan adalah perlawanan rakyat semesta untuk menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara, yang penyelenggaraannya disusun dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Pertahanan itu didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab tentang hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan menang dan tidak kenal menyerah, baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah.

Bentuk akhir perlawanan rakyat semesta adalah perang rakyat semesta. Perang rakyat semesta artinya adalah perlawanan secara total dari seluruh rakyat Indonesia terhadap usaha dari musuh yang ingin merampas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.

Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta terdiri dari tiga komponen yaitu, komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.

Komponen utama sistem ini adalah TNI dan Polri. TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Komponen cadangan meliputi warga negara, sumber daya alam, serta sarana prasarana yang dipersiapkan.

Komponen pendukung sistem ini adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan komponen utama ataupun cadangan.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU nomor 3 tahun 2002 bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara". Sedangkan dalam pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. melalui Pendidikan Kewarganegaraan,
- b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib,
- c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib, dan
- d. pengabdian secara Profesi.

a. Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan pasal 9 ayat (2) UU nomor 3 tahun 2003 dinyatakan bahwa "dalam Pendidikan Kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara". Pembinaan terhadap kesadaran akan bela negara dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan baik tingkat persekolahan maupun pendidikan tinggi melalui pendidikan kewarganegaraan. Dengan pendidikan kewarganegaraan dapat menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

b. Pelatihan Dasar Kemiliteran

Komponen warga negara yang mendapat pelatihan dari militer. Pelatihan dasar militer diikuti oleh mahasiswa yang tersusun dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa).



(Sumber : www.pikiran-rakyat.com)

Gambar 1.15.  Tugas Polri adalah memelihara ketertiban masyarakat

c. Pengabdian sebagai Prajurit TNI

Menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2002, yang dimaksud pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan negara gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Adapun yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pertahanan keamanan dewasa ini TNI berperan sebagai alat pertahanan negara. Sedangkan Polri sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, dan pelayanan ke pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam mempertahankan negara menurut pasal 10 ayat (3) UU No. 3 tahun 2002 TNI memiliki tugas sebagai berikut:


- a. mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah,
- b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa,
- c. melaksanakan operasi militer selain perang, dan
- d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Berdasarkan penjelasan UU No. 3 tahun 2002, ancaman militer dapat berbentuk antara lain:

- a. agresi yang menggunakan kekuatan senjata oleh negara lain,
- b. pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain,
- c. spionases sabotasi untuk merusak instalasi militer dan obyek vital nasional,
- d. perang saudara akhirnya menjadi upaya awal,
- e. perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya,
- f. aksi teror yang dilakukan jaringan terorisme internasional, dan
- g. pemberontakan bersenjata.



(Sumber : www.walubi.or)

Gambar 1.16.  Tim medis melaksanakan pengabdian dengan mengobati korban bencana alam

d. Pengabdian sesuai dengan Profesi

Pengabdian secara profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Sesuai dengan UU No. 3 tahun 2002 yang termasuk dalam pengabdian yang sesuai profesi antara lain petugas PMI, tim SAR, para medis, dan bantuan sosial.

Dengan demikian setiap warga negara sesuai dengan kedudukan dan peranannya mempunyai hak dan kewajiban dalam membela negara baik pada masa berperang maupun dalam masa aman dan damai.

Tugas

Life Skills : Kecakapan Akademik

Diskusikan dengan kelompok diskusi Anda!

Mengapa dalam sistem hankamrata, TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Apakah kalian setuju konsep pertahanan keamanan rakyat semesta tersebut.

Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas!

Tugas

Keingintahuan : Belajar Lebih Jauh

Buat sebuah kliping tentang aktifitas setiap warga negara yang giat dalam pembangunan dan berilah analisis secukupnya!

D. Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara

1. Partisipasi dalam Upaya Pembelaan Negara

Sesuai pasal 30 ayat (1) UUD 1945, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Apakah yang dimaksud dengan partisipasi/ peranserta dalam upaya pembelaan negara? Partisipasi/peranserta adalah sikap dari setiap warga negara turut berperan serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan pengertian tersebut setiap warga negara dituntut berperan secara aktif dalam suatu kegiatan bela negara. Dalam upaya pertahanan dan keamanan negara mencakup pembentukan dan penggunaan sumber daya buatan dan segenap prasarana fisik dan psikis bangsa dan negara.

Usaha pembelaan negara secara fisik rakyat dapat dilibatkan dalam penanganan ancaman yang ada. Rakyat disiapkan dan dilatih sehingga menjadi rakyat terlatih. Rakyat terlatih mempunyai empat fungsi yaitu, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat.

Ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat merupakan fungsi negara yang pelaksanaannya pada waktu negara keadaan damai atau dalam menghadapi suatu bencana alam atau dalam keadaan darurat. Sedangkan fungsi perlawanan rakyat dilaksanakan negara dalam keadaan darurat perang.

Disini rakyat terlatih sebagai unsur bantuan ikut terlibat membantu TNI dalam mengusir musuh di medan perang.

Di samping adanya ancaman bersifat fisik ada juga ancaman yang bersifat nonfisik. Ancaman yang bersifat non-militer setiap waktu selalu dihadapi oleh negara. Bela negara nonfisik dilakukan oleh setiap warga negara dalam berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam berbagai situasi. Misalnya, dengan meningkatkan kesadaran diri akan makna berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi, dan dapat dengan mewujudkan rasa cinta tanah air melalui pengabdian pada masyarakat secara tulus ikhlas pada masyarakat.



(Sumber : [www .presidensby.info/](http://www.presidensby.info/))

Gambar 1.17. 🇮🇩 *Tim olahraga Indonesia di pertandingan internasional*

2 Perwujudan Upaya Bela Negara dalam Suatu Kehidupan

Pertahanan dan keamanan negara mencakup segenap aspek kehidupan, dan pertahanan dan keamanan tidak dilaksanakan dengan mempersenjatai seluruh rakyat. Akan tetapi, mengikutsertakan seluruh unsur kekuatan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam mengikutsertakan seluruh unsur kekuatan yang ada dalam masyarakat didasarkan pada profesi masing-masing dan dalam pelaksanaannya bahu-membahu.

Sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita harus ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan yang dimulai dari lingkungan sekitar.

Rasa cinta tanah air dan bangsa dari para pejuang kemerdekaan mendorong mereka rela berkorban untuk bangsa dan negara. Para pejuang kemerdekaan dalam berjuang tidak mengharapkan suatu imbalan. Mereka berjuang tanpa pamrih. Sikap yang demikian adalah sikap seorang patriot sejati.

Seorang yang memiliki jiwa patriotisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. cinta tanah air,
- b. rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara,
- c. menempatkan persatuan dan kesatuan, dan
- d. mengutamakan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, ditegaskan bahwa keikutsertakan warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara dapat diwujudkan melalui pendidikan pendahuluan bela negara, keanggotaan rakyat terlatih, keanggotaan angkatan bersenjata (TNI), Polri secara sukarela atau wajib, dan keanggotaan perlindungan masyarakat secara suka rela. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Berdasarkan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai profesi.



(Sumber : www.barat-jakarta.go.id)

Gambar 1.18. **Peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban dilaksanakan oleh anggota pertahanan sipil (Hansip)**

Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat merupakan suatu dambaan dari setiap anggota masyarakat. Keamanan dan ketertiban dapat terwujud bukan lagi tanggung jawab TNI dan Polri, akan tetapi merupakan tanggung jawab segenap warga negara Indonesia. Dengan ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berarti telah ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Keikutsertaan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan setempat akan dapat menciptakan adanya:

- a. keamanan dan ketertiban lingkungan,
- b. ketenangan dan ketentraman hidup,
- c. suasana kehidupan menjadi sejuk,
- d. kehidupan masyarakat menjadi sejuk,
- e. tidaknya suatu kerusakan dan kekacauan.

Keikutsertaan setiap warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan negara.

a. Di Lingkungan Keluarga

Upaya pertahanan dan keamanan dalam lingkungan keluarga dapat diwujudkan dengan menampilkan sikap-sikap sebagai berikut:

1. Setiap anggota keluarga menjalankan tugasnya dengan tertib.
2. Setiap anggota keluarga berusaha menjaga nama baik keluarga.
3. Setiap anggota keluarga menjaga kerukunan hidup.

b. Di Lingkungan Sekolah



(Sumber : www.bpkpenabur.or.id)

Gambar 1.19. ☞ *Mengikuti upacara bendera dengan tertib merupakan wujud upaya pertahanan dan keamanan sekolah*

Upaya pertahanan dan keamanan dalam lingkungan sekolah dapat diwujudkan melalui berbagai sikap sebagai berikut :

1. menaati tata tertib sekolah,
2. hidup rukun sesama warga sekolah,
3. menjalin kerja sama antarsiswa tanpa pandang dulu,
4. mengikuti upacara bendera dan tertib, dan
5. menyelesaikan tugas yang diberikan guru.



(Sumber : www.pikiran-rakyat.com)

Gambar 1.20. ☞ *Bergotong royong adalah upaya perwujudan pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat*

c. Di Lingkungan Masyarakat

Upaya pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai sikap sebagai berikut :

1. ikut bergotong royong dalam masyarakat,
2. ikut menjaga keamanan lingkungan,
3. tidak membuang sampah sembarang tempat,
4. menjalin hubungan yang baik sesama anggota masyarakat, dan
5. tidak membuat keonaran di masyarakat.



(Sumber : www.as.wn.com)

Gambar 1.21. ☞ *Kegiatan terorisme dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara*

d. Di Lingkungan Kenegaraan

Upaya pertahanan dan keamanan di lingkungan kenegaraan dapat ditampilkan melalui berbagai sikap berikut ini:

1. mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara,
2. mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945,
3. rela berkorban untuk bangsa dan negara,
4. menjaga kelestarian tanah air Indonesia,
5. mempertaruhkan diri untuk kejayaan bangsa dan negara,
6. mencegah adanya terorisme,
7. mencegah sikap radikalisme,
8. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,
9. tidak main hakim sendiri, dan
10. membela negara sampai titik penghabisan.

Tugas

Life Skills : Kecakapan Sosial

Diskusikan dengan kelompok diskusi Kalian!

Bagaimanakah apabila sebagai anggota masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam pembelaan negara? Dalam bentuk bagaimanakah rakyat berpartisipasi dalam membela negara?

Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas.

Tugas

Keingintahuan : Belajar Lebih Jauh

Carilah sebuah berita dari berbagai media massa yang ada di sekitar Anda mengenai gangguan keamanan masyarakat. Kemudian tempelkan pada selembar kertas dan berilah analisis mengenai berita tersebut!

Rangkuman

- Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.
- Unsur-unsur negara terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan.
- Terjadinya negara secara primer dan secara sekunder.
- Fungsi utama negara adalah sebagai penggerak jalannya roda pemerintahan secara efektif sehingga apa yang menjadi fungsi negara juga berfungsi dengan baik.
- Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan untuk berkorban guna meniadakan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang dijamin dengan undang-undang.
- Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.
- Membela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.
- Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

- Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman kedaulatan bersifat militer dan nonmiliter.
- Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta adalah suatu sistem pertahanan keamanan dengan komponen-komponen yang terdiri atas seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, intergral, serta berlanjut dalam rangka mencapai ketahanan nasional.
- Partisipasi dalam upaya bela negara adalah turut berperan sertanya setiap warga dalam upaya bela negara atau pertahanan keamanan negara.
- Upaya bela negara dapat diwujudkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.

Uji Kompetensi

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berdiam di wilayah tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh
 - a. Meriam Budiardjo
 - b. Prof. Mr. Soenarko
 - c. George Jellineck
 - d. Mr. Kranenburg
2. Unsur deklaratif atau pengakuan dari negara lain diperlukan oleh suatu negara yang merdeka dan berdaulat untuk
 - a. mewujudkan fungsinya
 - b. mendapatkan pengakuan PBB
 - c. memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional
 - d. mendapatkan dukungan dari rakyat internasional

3. Berikut ini yang termasuk fungsi negara Indonesia, **kecuali**
 - a. putusan dan kebijakan
 - b. keamanan dan ketertiban
 - c. kesejahteraan dan keadilan
 - d. pertahanan
4. Menurut Pembukaan UUD 1945, kemerdekaan adalah
 - a. hak sebagian bangsa
 - b. hak segala bangsa
 - c. hak setiap negara
 - d. hak seluruh rakyat
5. Peranan TNI dan Polri diatur dalam
 - a. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000
 - b. Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000
 - c. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
 - d. Undang-Undang No. 2 tahun 2002
6. Berikut ini yang termasuk sifat-sifat perlawanan rakyat semesta, **kecuali**
 - a. kesemestaan
 - b. kewilayahan
 - c. kerakyatan
 - d. pemerintahan
7. Hak dan kewajiban setiap warga negara dalam usaha pembelaan negara-negara diatur dalam UUD 1945, yaitu
 - a. pasal 27 ayat (3)
 - b. pasal 28
 - c. pasal 30 ayat (1)
 - d. pasal 31 ayat (1)
8. Dalam sistem pertahanan rakyat semesta kedudukan rakyat adalah sebagai
 - a. unsur utama
 - b. unsur pendukung
 - c. unsur terlatih
 - d. unsur cadangan

9. Berikut ini yang termasuk pengabdian profesi, **kecuali**
- petugas PMI
 - tim SAR
 - para medis
 - anggota TNI
10. Apabila negara diserang negara lain, tindakan kita adalah
- menyerahkan persoalan itu kepada TNI
 - turut mengusir musuh apabila terpaksa
 - memperhatikan situasi dan tetap sekolah
 - turut serta membela/mempertahankan bangsa dan negara

II. Isilah titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan benar!

- Menurut Konvensi Montevideo (1933), unsur-unsur negara, meliputi unsur konstitutif dan unsur
- Semua orang yang mendiami suatu negara dan tunduk terhadap kekuasaan negara disebut
- Sungai, laut, danau, pegunungan, atau lembah merupakan batas wilayah suatu negara yang bersifat
- Kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan negara disebut
- Secara de facto berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
- Terbentuknya negara secara sekunder adalah terjadinya negara dipandang dari
- Pelaksanaan dari tujuan yang hendak dicapai, menunjuk gerak dalam dunia nyata merupakan pengertian dari

8. Membela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang dijamin dalam
9. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, bunyi pasal
10. Menurut pasal 9 UU No. 3 tahun 2002 dinyatakan bahwa “dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang ...”.

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat!

1. Sebutkan unsur-unsur konstitutif berdirinya negara!
2. Mengapa setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan?
3. Apa yang dimaksud dengan sistem pertahanan rakyat semesta?
4. Sebutkan 3 (tiga) contoh ancaman yang bersifat nonmiliter menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002!
5. Sebutkan 2 (dua) bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya bela negara yang bersifat fisik!

Bab II Pelaksanaan Otonomi Daerah

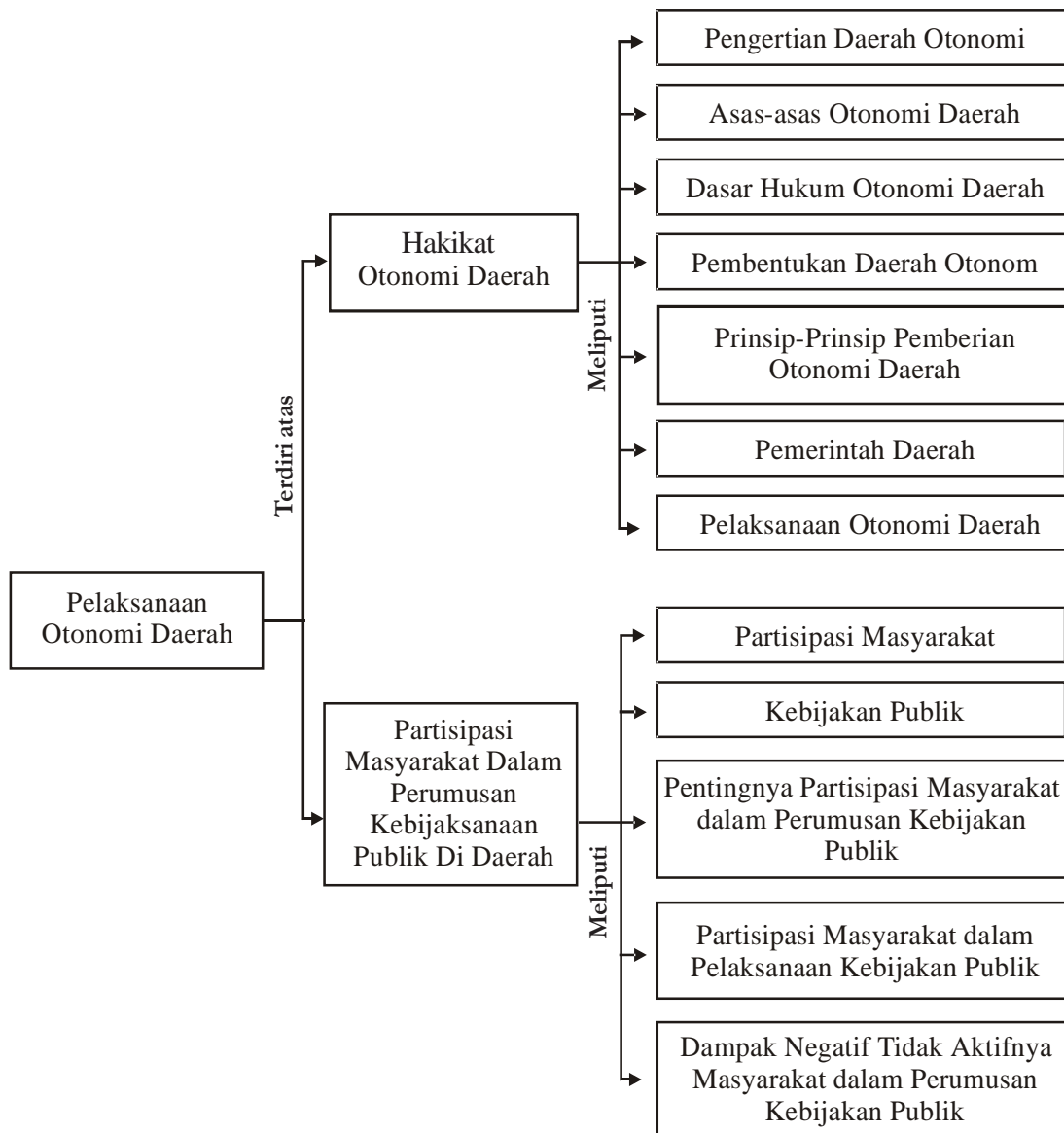


(Sumber : www.presidensby.info/)

Gambar 2.1. 📌 *Penghargaan Otonomi Award*

Pemerintah telah menetapkan pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah diberi kewenangan untuk mengurus daerahnya, mulai dari pemerintahan sampai dengan pengelolaan kekayaan alamnya. Pemerintah memberikan penghargaan pada daerah yang berhasil melaksanakan otonomi daerah.

PETA KONSEP



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian dapat:

1. mendeskripsikan pengertian otonomi daerah.
2. menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah.

Negara Indonesia merupakan, negara yang wilayahnya terdiri atas beribu-ribu pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan agama dan budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing.

Hak apa yang diberikan kepada daerah tersebut? Untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat tersebut diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam mengatur dan mengelola daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mengapa demikian? Dengan adanya partisipasi masyarakat akan mempercepat terbentuknya masyarakat yang demokratis. Segala kebijakan publik-publik yang dibuat oleh daerah akan selalu memperhatikan aspirasi masyarakat yang akhirnya dalam pelaksanaannya akan mendapat dukungan dari masyarakat.

Dalam bab ini kita akan belajar tentang otonomi daerah, mulai dari hakikat otonomi daerah sampai dengan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mempermudah dalam mempelajari materi ini terlebih dahulu memahami peta konsep bagian depan.

Kata Kunci

Otonomi, kebijakan, pemerintah daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, partisipasi, kebijakan, publik

A. Hakikat Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Wilayah negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau, yang membujur dari Sabang sampai Merauke. Luas wilayah Indonesia $\pm 5.193.252 \text{ km}^2$ dengan jumlah pulau ± 17.508 pulau. Pulau-pulau tersebut dihuni lebih dari dua ratus juta jiwa dengan beraneka ragam agama, budaya, bahasa, adat istiadat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan setiap daerah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan daerahnya sendiri. *Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah?*

Otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan. Berdasarkan arti tersebut, para ahli memberikan pengertian otonomi sebagai pengundangan sendiri, mengatur, atau memerintah sendiri. Dengan demikian, kata otonomi dapat diartikan sebagai kemerdekaan dan kebebasan menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberlakukannya otonom daerah tidak hanya sekedar pemecahan penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, bertujuan untuk mengubah tatanan ketatanegaraan yang bersifat sentralistik yang otoriter menjadi desentralisasi dan demokratis. Otonomi daerah yang mandiri dan demokratis akan dapat mendekatkan pemerintah dengan rakyat karena kepentingan rakyat dapat dilayani dengan baik.

Yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan otonomi daerah senantiasa harus tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah suatu negara dimana hanya ada satu negara dan satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Negara kesatuan yang bersifat *sentralisasi*, yaitu apabila semua urusan negara diatur negara dan diurus oleh pemerintah pusat.
- b. Negara kesatuan yang bersifat *desentralisasi*, yaitu pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

2. Asas-Asas Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi. Sedangkan penyelenggaraan pemerintah daerah pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. *Apakah yang dimaksud dengan desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi?*

Menurut pasal 1 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan:

- a. *Asas desentralisasi* adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
- b. *Asas dekonsentrasi* adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. *Asas tugas pembantuan* adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sebagai negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas

Life Skills : Belajar Lebih Jauh

Carilah buku referensi yang menyebutkan contoh negara yang bersifat sentralisasi dan desentralisasi.

3. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Agar otonomi daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka dalam pelaksanaannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah?*

Pelaksanaan otonomi daerah berpedoman pada konstitusi negara (hukum dasar) yang tertulis, yaitu UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Undang-Undang Dasar 1945

1) Pasal 18

- a) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- b) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.



(Sumber : www.indonesia.org.bn)

Gambar 2.2 🍷 Kepala daerah dipilih secara demokratis

- c) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- d) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

- e) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan urusan Pemerintah Pusat.
 - f) Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
 - g) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang.
- 2) Pasal 18A
- a) Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
 - b) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
- 3) Pasal 18B
- a) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

b. *Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000, tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*

c. *Undang-Undang*

- 1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 2) UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut pasal 1 ayat (5) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pembentukan Daerah Otonom

Menurut pasal 18 ayat (1) UU 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang. *Apakah yang syarat-syarat terbentuknya daerah otonom?*

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur batas daerah tertentu dan wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Untuk menjadikan daerah otonomi diperlukan adanya berbagai persyaratan, yaitu syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

a. Syarat Administratif

Sebagai syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan syarat administratif untuk kabupaten/kota adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

b. Syarat Teknis

Sebagai syarat teknis pembentukan daerah adalah kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, potensi daerah, luas daerah, sosial budaya, sosial politik, dan pertahanan keamanan yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

c. Syarat Fisik

Untuk membentuk daerah otonom dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 7 (tujuh) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Di samping daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, bagi daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain.

Tugas

Life Skills : Kecakapan Sosial

Diskusikan dengan kelompokmu. Mengapa terjadi konflik di beberapa daerah di Indonesia karena persebaran wilayah! Hasilnya presentasikan di depan kelas.

5. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Setiap daerah dapat memiliki hak otonom. Dengan otonomi daerah dapat mengatur daerah sesuai dengan kemampuannya.

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pemberian otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, dalam arti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintah pusat. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan berbagai hal yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi, serta di dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah fungsi lebih meningkatkan peran dan fungsi legislatif daerah, ataupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi yang kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

6. Pemerintahan Daerah

Kebijakan otonomi daerah merupakan pengalihan sebagian tugas dan wewenang dari pusat kepada daerah. Daerah mempunyai kesempatan untuk memberdayakan potensi daerah, mengatur dan mengurus rumah tangga daerah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat sehingga daerah akan lebih mandiri dan berusaha mencukupi kebutuhan daerahnya. *Apa yang dimaksud pemerintahan daerah?*

Pemerintah daerah terdiri atas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Kepala daerah provinsi adalah Gubernur Kepala Daerah, Kabupaten disebut Bupati, dan kepala daerah kota adalah walikota. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasang calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD. Pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis.



(Sumber : www.pikiran-rakyat.com)

Gambar 2.3. 📍 *Setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah dan dibantu seorang wakil kepala daerah*

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah,
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat,
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun,
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter,
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih,

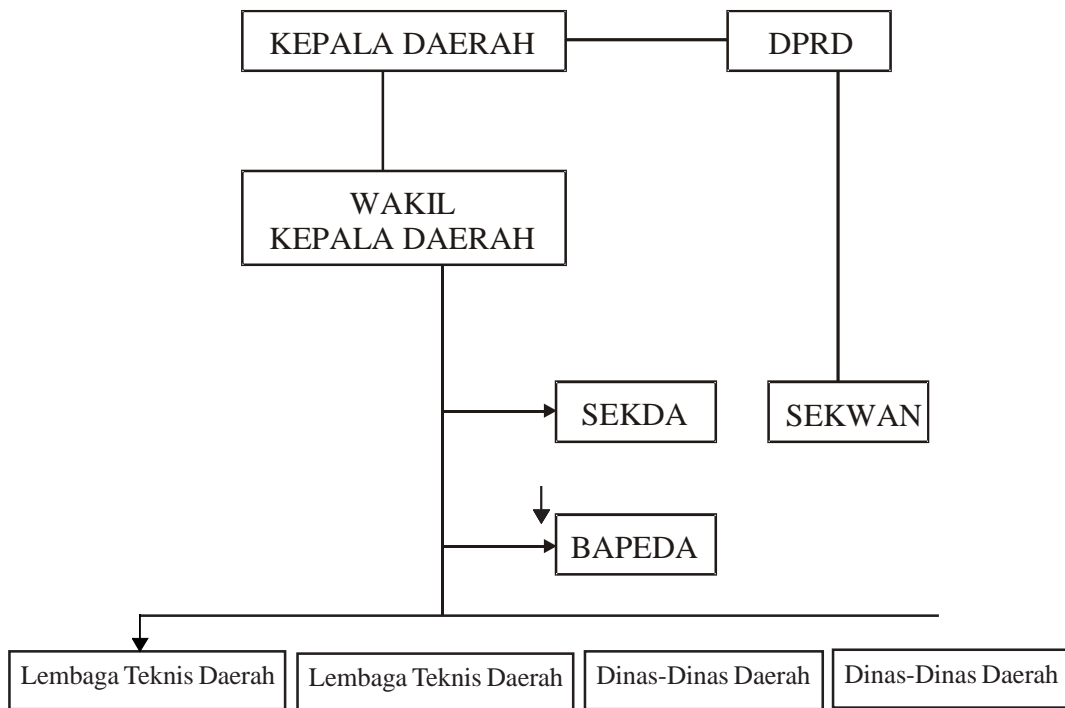
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya,
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan,
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara,
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela,
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak,
- n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri,
- o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama, dan
- p. tidak dalam status pejabat kepala daerah.

Dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang;

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD,
- b. mengajukan rancangan Perda,
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD,
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama,
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah,
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- g. melakukan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan perangkat daerah otonom terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Untuk memahami tentang pemerintahan daerah perhatikan struktur organisasi pemerintahan daerah di bawah ini:

Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah



Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat,
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat,

- d. melaksanakan kehidupan demokrasi,
- e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan,
- f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,
- g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah,
- h. melaksanakan prinsip taat pemerintahan yang bersih dan baik,
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah,
- j. menajalin hubungan kerja dengan dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah, dan
- k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Dalam pemerintahan daerah selain ada kepala daerah beserta perangkat lainnya terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.



(Sumber : 50 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 2.4 ♡ DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan

Berdasarkan pasal 42 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama,
- b. membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala daerah,
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah,
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota,
- e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah,
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah,
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah,
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,
- i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah,
- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan
- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Selain mempunyai tugas dan wewenang DPRD juga mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. DPRD sebagai lembaga legeslatif daerah memiliki alat kelengkapan, antara lain pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang selaku kepala daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi, sedangkan Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten/kota. Dalam wewenang pengaturan, dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah, sedangkan wewenang pengurusan dilakukan oleh kepala daerah beserta perangkat yang lain. Dalam hal ini DPRD mempunyai peranan sebagai pengawas, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD.

7. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia sebelum diberlakukan UU No. 32 tahun 2004, pemerintah Orde Baru telah memberlakukan UU No. 5 tahun 1974. Akan tetapi, undang-undang ini belum dapat mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah. Hal ini dikarenakan undang-undang ini masih memiliki kelemahan dan daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah Orde Baru setelah mendapatkan kritikan atas lemahnya konsep dan aturan, serta tidak terlaksananya otonomi daerah maka pada tahun 1992 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II.

Untuk mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah, pada tanggal 25 April 1995 Pemerintah meluncurkan Proyek Percontohan Otonomi Daerah kepada satu daerah kabupaten di setiap provinsi. Akan tetapi dalam perjalanannya masih terjadi tarik ulur kekuasaan. Gagasan otonomi daerah untuk mengembangkan kesejahteraan ditingkat daerah belum dapat terlaksana.

Seiring dengan lahir reformasi, desakan otonomi daerah semakin kuat. Aspirasi yang berkembang dari berbagai kalangan menuntut akan adanya kewenangan daerah yang lebih luas untuk mengatur daerah sendiri dan adanya ruang partisipasi masyarakat yang luas dalam berbagai bidang kehidupan.

Sebagai tindak lanjut tuntutan tersebut, maka lahirlah Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata serta bertanggung jawab pemerintah mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 5 tahun 1974.

Pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999, dan UU No. 25 tahun 1999 terealisasi sejak Januari 2001. Namun sebelumnya telah berkembang adanya aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya revisi terhadap undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut tidak memperhatikan konteks kelahirannya yang diliputi suasana transisi, abnormal, dan krisis. Dengan berdasarkan keadaan tersebut akhirnya pemerintah mengeluarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sejak diberlakukan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Permasalahan otonomi daerah tersebut, timbul dari lembaga pemerintah itu sendiri atau timbul dari luar lembaga pemerintah.

Adapun masalah-masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. sikap ketergantungan daerah dari pusat masih terlalu tinggi,
- b. kemampuan daerah untuk mengurus daerahnya sendiri masih sangat kurang,
- c. masyarakat bersikap apatis terhadap pemerintah,
- d. masyarakat kurang memahami arti pentingnya otonomi daerah,
- e. masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah,
- f. sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga etos kerjanya menjadi lebih baik,
- g. korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin merebak dimana-mana sehingga sulit untuk diberantas.



Gambar 2.5. Unjuk rasa menentang KKN di era otonomi daerah

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul sebagai penghambat terlaksananya otonomi daerah, dapat dilakukan dengan melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi keberadaan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat,

- b. mengikutsertakan berpartisipasinya masyarakat dalam segala bidang kehidupan,
- c. menumbuhkan sikap kepercayaan diri masyarakat terhadap pemerintahan daerah,
- d. meningkatkan sumber daya manusia (SDM) menjadi aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dengan etos kerjanya yang baik,
- e. menumbuhkan sikap kreatif dan inisiatif,
- f. meningkatkan sikap kemandirian,
- g. melakukan pemberantasan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme secara nyata.

Tugas

Wawasan Produktivitas : Inovasi

Mengapa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum diperlukan adanya otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab? Padahal sebagian masyarakat saat ini, menghendaki sistem sentralisasi diperlakukan kembali. Bagaimana tanggapan kalian dengan adanya usulan kembali ke sentralisasi tersebut?

Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas!

Tugas

Life Skills : Kecakapan Personal

Kerjakan secara individu!

Carilah sebuah berita dari surat kabar/media massa yang lain tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang ekonomi daerah! Kemudian berita tersebut berilah analisis secukupnya pada lembar kertas!

B. Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik di Daerah

1. Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan otonomi daerah luas, nyata dan tanggung jawab keberhasilannya tidak akan lepas dari partisipasi masyarakat. Masyarakat daerah merupakan bagian yang penting dalam sistem pemerintahan daerah. *Apakah yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat?*

Partisipasi dapat diartikan sebagai pengambilan bagian dari kegiatan bersama. Selain itu, dapat dikatakan bahwa partisipasi merupakan suatu kesadaran masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan berhasilnya suatu program yang telah ditetapkan dengan tidak mengorbankan kepentingannya sendiri.

Sedangkan menurut Davis yang diterjemahkan oleh Ibnu Kencana Syafiie (2001:141) partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.



(Sumber : fpks.dpr.or.id)

Gambar 2.6 *Masyarakat dapat memberikan masukan kepada DPRD*

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah mewujudkan masyarakat daerah menjadi sejahtera. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masyarakat ikut serta dalam penyelenggaraannya. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan masyarakat tidak lagi menjadi obyek akan tetapi masyarakat menjadi subyek dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Partisipasi masyarakat terhadap pemerintah maupun pada lembaga legeslatif (DPRD) mempunyai manfaat bagi kehidupan masyarakat. Di era otonomi daerah ini, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi, terlebih dalam perumusan kebijakan publik. *Mengapa demikian?* Hal ini dikarenakan masyarakat lebih tahu akan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapinya.

Dengan berpartisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat membentuk budaya demokrasi, membentuk masyarakat yang sadar hukum, membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia, dan membentuk masyarakat yang madani.

Dalam kebijakan publik apabila perumusannya mengikutsertakan masyarakat, maka kebijakan publik yang dihasilkan dapat berpihak pada kepentingan rakyat, sesuai dengan keinginan rakyat. Hal ini dapat menumbuhkan semangat persatuan, serta menumbuhkan adanya semangat kerja keras masyarakat.

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian

Kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani *polis* yang berarti negara/kota. Dalam bahasa Latin disebut *politia* yang berarti negara, dan menurut bahasa Inggris *policy* yang berarti masalah yang berhubungan dengan masalah publik dan administrasi pemerintah.

Publik berasal dari bahasa Inggris, *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Dengan berdasar arti kata, maka kebijakan publik adalah setiap keputusan atau kegiatan yang dikeluarkan atau dijalankan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan negara.

Berikut ini pengertian kebijakan publik dari beberapa ahli yang terdapat dalam buku Kewarganegaraan yang ditulis Bambang Margono dkk, (2003 : 6) adalah sebagai berikut:

1) A. Hoogerwert

Kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.

2) Anderson

Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu.

3) Thomas R. Dye

Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu.

4) R.C. Chandler dan J.c. Plano

Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

b. Perumusan Kebijakan Publik

Pelaksanaan otonomi daerah luas, nyata, dan bertanggung jawab memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk itu, setiap daerah otonom selalu merumuskan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Adanya perumusan kebijakan publik ini, merupakan suatu kesempatan yang paling tepat bagi masyarakat untuk mengajukan usulan.

Sedangkan proses perumusan kebijakan publik sebagai berikut:

1) *Penyusunan agenda*

Pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat hendaknya menempatkan masalah pada agenda publik. Tanpa adanya tahapan penyusunan agenda dikhawatirkan banyaknya masalah yang tidak tersentuh sama sekali, dan masalah yang tertunda dalam waktu yang lama.

2) *Formulasi kebijakan*

Pada tahap ini para pejabat merumuskan suatu alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legeslatif.

3) *Adopsi kebijakan*

Pada tahap ini, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.

4) *Implementasi kebijakan*

Pada tahap ini kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya keuangan dan manusia.

5) *Penilaian kebijakan*

Pada tahap ini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legeslatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Wawasan Produktivitas : Inovasi

Di sekolah kalian tentu ada pengurus OSIS. Tanyakan kepada mereka cara merumuskan kegiatan anggota OSIS. Berikan saranmu apabila masih terdapat kekurangan cara merumuskan kegiatan itu!

c. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat dan ditetapkan oleh para penyelenggara negara dengan melibatkan segenap lapisan masyarakat.

Kebijakan publik dapat ditetapkan dalam berbagai bentuk antara lain:

- 1) Peraturan Perundang-Undangan, meliputi:
 - a) UUD 1945,
 - b) Ketetapan MPR,
 - c) Undang-Undang,
 - d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
 - e) Peraturan Pemerintah,
 - f) Peraturan Presiden, dan
 - g) Peraturan Daerah.
- 2) Pidato Pejabat Tinggi, meliputi:
 - a) Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus,
 - b) Pidato Presiden atau menteri pada waktu hari besar nasional, dan
 - c) Pernyataan pejabat negara
- 3) Program-program Pemerintah, meliputi:
 - a) RAPBN,
 - b) RAPBD,
 - c) Arah kebijakan, dan
 - d) Proyek-proyek.
- 4) Tindakan yang dilakukan pemerintah, meliputi:
 - a) kunjungan presiden atau menteri ke negara lain, dan
 - b) kehadiran presiden atau menteri ke suatu daerah, kongres, muktamar, dan sebagainya.

Adapun yang termasuk kebijakan publik, antara lain:

- a. kebijakan pajak kendaraan mewah,
- b. kebijakan cukai tembakau,
- c. kebijakan kenaikan tarif angkutan,
- d. program transmigrasi, dan
- e. program wajib belajar sembilan tahun
- f. kenaikan harga BBM

3. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik



(Sumber : 50 Tahun Indonesia Merdeka)

Gambar 2.7 ✎ *Transmigrasi termasuk kebijakan publik karena menyangkut banyak orang*

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dalam perumusan dan penetapannya harus selalu mengikutsertakan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah unsur yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat dapat menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik.

Dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi maka kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945, tidak menyimpang dengan peraturan perundang-undangan, dan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Bentuk partisipasi masyarakat yang positif terhadap pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain:

- a. membayar pajak bumi dan bangunan,
- b. menjaga kelestarian lingkungan hidup,
- c. menyampaikan aspirasi dengan cara santun kepada pemerintah daerah.
- d. mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah, dan
- e. melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban lingkungan.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik

Dalam negara demokrasi, partisipasi masyarakat dalam segala aspek sangat diperlukan. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan wujud nyata dukungan masyarakat terhadap pemerintah.

Kebijakan publik tidak akan terlaksana secara efektif jika tidak ada partisipasi dari masyarakat. Perlu kita sadari bahwa setelah kebijakan publik terbentuk sering kali kebijakan publik yang terdapat dalam masyarakat tidak sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hambatan-hambatan tidak dapat berjalannya kebijakan publik yang terjadi dalam masyarakat kadangkala berasal dari masyarakat. Mengapa demikian?

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam kehidupan manusia dalam masyarakat disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan publik, dan adanya unsur kesengajaan dari masyarakat untuk melanggar karena sanksi tidak tegas.

Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses dan wujud partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan kenegaraan. Tingkat kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mempengaruhi terhadap kebijakan publik. Sekian tinggi kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat melaksanakan kebijakan publik semakin bersifat membantu dan tanggung jawab. Apabila kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat masih rendah dapat melahirkan kebijakan publik yang bersifat merusak dan kurang bertanggungjawab. Setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diupayakan mendapatkan dukungan masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik dapat dilakukan melalui empat macam, yaitu: pada tahap proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemanfaatan hasil, dan tahap evaluasi.

a. Partisipasi proses pembuatan kebijakan publik

Dalam proses ini, masyarakat berpartisipasi aktif maupun pasif dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan berpartisipasinya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat menunjukkan adanya kekhasan daerah. Semakin besarnya masyarakat untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Contoh partisipasi masyarakat dalam tahap ini adalah masyarakat memberikan masukan atau pertimbangan baik secara lisan atau tertulis kepada pemerintah daerah untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan publik daerah sebelum ditetapkan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini, merupakan partisipasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik atau pembangunan, dapat dilakukan dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari melalui dengan menyumbangkan tenaga, harta, pikiran, dan lain-lain.



(Sumber Kedaulatan Rakyat)

Gambar 2.8. ☞ *Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atau pertimbangan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan*

Contoh partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat, bila kebijakan daerah menetapkan adanya wilayah bebas sampah. Masyarakat dapat terlibat langsung sebagai pelaksana kebijakan daerah dan selalu mewujudkannya.

c. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil

Telah kita ketahui bersama bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati hasil pembangunan. Masyarakat di daerah harus dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dalam arti mendapatkan pembagian sesuai dengan pengorbanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rendahnya partisipasi untuk menikmati hasil dari sebuah kebijakan publik dapat menimbulkan sikap tidak puas bagi masyarakat. Dengan belum meratanya pembangunan dan hasilnya di setiap daerah mendorong kepada kelompok-kelompok tertentu ingin memisahkan diri dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Setiap kebijakan publik di daerah dinyatakan berhasil, jika dapat memberikan manfaat kehidupan bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diberi kesempatan untuk menilai hasil yang telah dicapai. Partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kebijakan publik merupakan sikap dukungan yang positif terhadap pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dapat dilakukan dengan memantau hasil kebijakan publik dan pelaksanaannya. Masyarakat harus bersikap kritis apakah kebijakan publik sudah mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat atau belum. Dan apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan ditetapkan kebijakan. Tanpa adanya evaluasi dari masyarakat pelaksanaan kebijakan publik dapat terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Dalam memberikan evaluasi terhadap kebijakan publik harus bersifat konstruktif dan bukan bersifat destruktif. Apabila kita menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan publik melalui demonstrasi kita lakukan dengan santun, tidak dengan cara-cara kekerasan, dengan merusak fasilitas-fasilitas umum.

Pada umumnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik sebagian besar terletak pada tahap pelaksanaan, dan pemanfaatan, bukan pada proses pembuatan ataupun evaluasi.

Tugas

Wawasan Produktivitas : Kewirausahaan

Buatlah usulan tentang peningkatan pengadaan sarana pendidikan di sekolahmu. Usulan itu ditujukan kepada kepala daerahmu. Mintalah bimbingan gurumu cara membuat usulan yang baik.

5. Dampak Negatif tidak Aktifnya Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

Dengan diberlakukannya otonomi daerah luas, nyata dan bertanggungjawab, pemerintah memberi peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Segala bentuk partisipasi masyarakat ditampung oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, pemerintah harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Mengapa demikian?

Hal ini, dikarenakan masyarakat lebih tahu tentang kebutuhan dan keinginan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Partisipasi masyarakat merupakan cara keikutsertaan dalam perumusan kebijakan publik di daerah, antara lain dalam hal pembentukan Peraturan Daerah. Dalam pasal 139 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Dengan keaktifannya masyarakat memberikan masukan, diharapkan akan melahirkan suatu kebijakan publik yang dapat melindungi, mengayomi, meningkatkan kesejahteraan, serta selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.



(Sumber : www.mbeproject.net)

Gambar 2.9. ☞ *Dialog dengan para pejabat daerah merupakan cara paling efektif dalam menyampaikan aspirasi*

Apabila, masyarakat tidak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik, akan melahirkan adanya kebijakan publik di daerah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat juga bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Kebijakan publik yang demikian ini dapat menimbulkan dampak yang negatif dan merugikan masyarakat.

Tidak adanya kesesuaian antara kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan kepentingan masyarakat selain merugikan masyarakat, juga dapat menurunkan kewibawaan pemerintah sendiri. Dengan demikian kebijakan publik ini tidak dapat diterima oleh masyarakat, dan pelaksanaan otonomi daerah akan terhambat. Masyarakat tidak lagi mempercayai terhadap pemerintahnya. Selain masyarakat dituntut untuk aktif memberikan masukan dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik, masyarakat harus aktif memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan masyarakat sangat penting karena tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat terjadi penyimpangan kebijakan publik. Misalnya, kebijakan

pemerintah dalam memberikan subsidi langsung tunai tersebut menjadi salah sasaran. Yang semestinya mendapat bantuan tidak mendapat dan yang semestinya tidak berhak untuk mendapatkan bantuan malah menerima bantuan.

Hal ini, perlu diwaspadai karena setiap kebijakan selalu memiliki kemungkinan terjadi penyimpangan. Jika masyarakat menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan maka masyarakat dapat melaporkan kepada yang berwajib.

Tugas

Life Skills : Kecakapan Sosial

Diskusikan dengan kelompok diskusi kalian!

Mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting dalam perumusan kebijakan publik? Bagaimana menurut kalian apabila masyarakat tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik?

Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas.


Tugas

Keingintahuan : Belajar Lebih Jauh

Carilah sebuah berita dari surat kabar atau dari media massa yang lain yang ada di sekitarmu yang isinya berhubungan pengembangan potensi daerah! Tempelkan pada selembar kertas dan berilah analisis berita tersebut!

Rangkuman

- Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Daerah otonomi merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pelaksanaan otonomi daerah menerapkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas pembantuan.
- Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 pasal 18, Tap MPR No. IV/MPR/2000, UU No.32 tahun 2004, dan UU No. 33 tahun 2004.
- Pembentukan daerah otonomi berdasarkan syarat, yaitu syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan.
- Prinsip otonomi daerah adalah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab.
- Pemerintahan daerah otonom terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah lainnya sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legeslatif daerah.
- Pelaksanaan otonomi secara luas, nyata, dan bertanggung jawab sejak Januari 2001.
- Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi masyarakat menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik.
- Kebijakan publik meliputi apa yang dinyatakan, dilakukan, atau tidak dilakukan oleh pemerintahan yang memuat sasaran dan tujuan program pemerintah.

- 
- Adanya partisipasi masyarakat kepada pemerintah maupun DPRD, maka banyak sekali manfaat bagi masyarakat.
 - Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik meliputi partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan, dan partisipasi dalam evaluasi.
 - Jika masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik dapat merugikan masyarakat, kebijakan publik tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Kebijakan publik akan ditolak oleh masyarakat.

Uji Kompetensi

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan
 - a. peraturan perundang-undangan
 - b. kehendak pemerintah
 - c. kehendak rakyat
 - d. potensi daerah
2. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini diatur dengan Undang-Undang No.

a. 5 tahun 1974	c. 25 tahun 1999
b. 22 tahun 1999	d. 32 tahun 2004
3. Berikut ini asas-asas otonomi daerah, **kecuali**

a. asas demokrasi	c. asas pembantuan
b. asas desentralisasi	d. asas dekonsentrasi

4. Syarat teknis, yang menjadi dasar pembentukan daerah otonom adalah sebagai berikut, **kecuali**
 - a. kemampuan ekonomi
 - b. potensi daerah
 - c. persetujuan DPRD
 - d. sosial budaya
5. Contoh salah satu masalah yang muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah
 - a. adanya sikap apatis dari masyarakat
 - b. partisipasi masyarakat yang dominan
 - c. meningkatnya etos kerja aparatur pemerintah
 - d. terdapatnya sumber daya manusia yang berkualitas
6. Di era otonomi daerah, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dengan harapan antara lain, **kecuali**
 - a. kebijakan publik sesuai dengan kehendak pemimpin
 - b. kebijakan publik sesuai dengan kehendak rakyat
 - c. kebijakan publik mengutamakan kepentingan masyarakat
 - d. kebijakan publik meningkatkan persatuan dan kesatuan
7. Yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah
 - a. apapun yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu
 - b. apapun yang dipilih rakyat, apakah untuk dikerjakan atau tidak melakukan sama sekali
 - c. apapun yang mendukung, atau sama sekali tidak mendukung atas kebijakan yang ditentukan bersama
 - d. segala program yang selalu mengedepankan atas terlibatnya semua tokoh-tokoh masyarakat yang berkuasa
8. Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik
 - a. sebagian besar pada tahap perencanaan
 - b. sebagian besar pada tahap penilaian
 - c. sebagian besar pada tahap penetapan
 - d. sebagian besar pada tahap pelaksanaan

9. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik dapat terlihat pada
 - a. kepekaan masyarakat
 - b. partisipasi masyarakat
 - c. kesadaran masyarakat
 - d. kedisiplinan masyarakat
10. Salah satu akibat dengan tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah adalah
 - a. kebijakan publik yang ditetapkan sangat sesuai dengan kehendak masyarakat
 - b. kebijakan publik dijalankan oleh seluruh masyarakat
 - c. kebijakan publik yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat
 - d. kebijakan publik mendapat dukungan masyarakat luas

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar!

1. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia adalah
2. Dengan diberlakukan otonomi daerah mengubah ketatanegaraan yang bersifat sentralistik, otoriter menjadi
3. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau kepada instansi pertikal di suatu wilayah adalah pengertian dari asas
4. Pasal 18B UUD 1945, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang
5. Kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, potensi daerah, dan luas daerah, serta sosial budaya merupakan syarat

6. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas
7. Pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah dan
8. Kebijakan publik merupakan hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya. Pernyataan ini dikemukakan oleh
9. Perumusan kebijakan publik menurut William N. Dunn diawali dengan penyusunan
10. Kebijakan publik tidak dapat terlaksana secara efektif jika tidak ada

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud daerah otonomi!
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Jelaskan yang dimaksud dengan otonomi luas!
3. Sebutkan tugas dan wewenang pemerintah daerah!
4. Sebutkan macam-macam keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik!
5. Jelaskan akibatnya apabila kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat!

Latihan Ulangan Semester Gasal

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Organisasi yang menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu masyarakat wilayah tertentu dengan berdasarkan hukum dinamakan
 - a. partai politik
 - b. pemerintah
 - c. negara
 - d. organisasi masa
2. Berdasarkan Konvensi Montevideo (1933), tiga unsur utama negara adalah
 - a. pimpinan, rakyat, daerah
 - b. rakyat, wilayah, pemerintah
 - c. wilayah, raja, rakyat
 - d. bangsa, negara, pemerintah
3. Fungsi negara adalah usaha untuk mengubah harapan atau cita-cita negara menjadi
 - a. misi dan visi bangsa
 - b. kenyataan negara
 - c. kesejahteraan bersama
 - d. tujuan negara
4. Di antara fungsi negara adalah memelihara fakir miskin, membangun kehidupan bangsa. Fungsi yang demikian ini sesuai dengan
 - a. fungsi esensial
 - b. fungsi kesejahteraan
 - c. fungsi perdagangan
 - d. fungsi balas jasa
5. Sekumpulan manusia yang dipersatukan adanya persamaan nasib dan bersama dalam suatu wilayah disebut
 - a. bangsa
 - b. penduduk
 - c. rakyat
 - d. warga negara

6. Batas antara dua negara dapat berupa perbatasan alam, misalnya
 - a. pagar tembok
 - b. tiang pancang
 - c. pagar kawat
 - d. sungai
7. Selain batas alam dan buatan, pembatasan wilayah negara dapat digunakan dengan batas
 - a. menurut perjanjian
 - b. menurut ilmu pengetahuan
 - c. berdasarkan realitanya
 - d. berdasarkan sejarah bangsa
8. Semangat rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan negara didasarkan pada
 - a. anjuran pemerintah
 - b. cinta tanah air
 - c. pengorbanan para pejuang
 - d. kebencian terhadap penjajah
9. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 pasal
 - a. 27 ayat (1)
 - b. 27 ayat (2)
 - c. 27 ayat (30)
 - d. 28 A
10. Usaha pertahanan dan keamanan negara di Indonesia dilaksanakan dengan sistem pertahanan dan
 - a. keamanan menyeluruh
 - b. keamanan daerah
 - c. keamanan bela negara
 - d. keamanan rakyat semesta
11. Tentara Nasional Indonesia (TNI) alat negara yang bertugas untuk
 - a. mempertahankan negara
 - b. menjaga kerukunan
 - c. menegakkan hukum
 - d. membina kerjasama yang baik

12. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang mempunyai tugas
- mempertahankan negara
 - mengayomi masyarakat
 - memelihara kedaulatan
 - mengawasi keseimbangan rakyat
13. Komponen utama dalam mempertahankan dan keamanan negara adalah
- seluruh warga negara
 - seluruh rakyat Indonesia
 - TNI dan pemerintah
 - TNI dan POLRI
14. Keikutsertaan warga negara dalam sishamkamrata dapat diwujudkan dengan melalui
- rakyat sukarelawan
 - pahlawan bangsa
 - polisi
 - rakyat terlatih
15. Berikut yang **bukan** termasuk sifat-sifat perlawanan rakyat semesta ialah
- | | |
|----------------|----------------|
| a. kesemestaan | c. kewilayahan |
| b. kerakyatan | d. dwi wilayah |
16. Peranan TNI dan POLRI dalam sistem pertahanan keamanan diatur dalam
- UU No. 3 tahun 2002
 - UU No. 2 tahun 2003
 - Tap MPR No. IV/MPR/2000
 - UUD 1945
17. Berikut ini yang **bukan** termasuk pengabdian profesi ialah
- | | |
|---------------|------------------|
| a. para medis | c. petugas PMI |
| b. tim SAR | d. anggota POLRI |

18. Berikut ini yang **bukan** ciri-ciri seorang patriotisme adalah
- mengharapkan penghargaan
 - cinta tanah air
 - menempatkan persatuan dan kesatuan
 - rela berkorban
19. Pernyataan di bawah ini yang **bukan** termasuk upaya pertahanan dan keamanan adalah
- menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
 - menciptakan keteraturan hidup
 - menciptakan ketenangan masyarakat
 - setelah lulus mencoret-coret baju seragam
20. Upaya pertahanan dan keamanan dalam lingkungan kenegaraan dapat diwujudkan melalui
- bergotong royong memperbaiki jalan kampung
 - mengamalkan nilai-nilai Pancasila
 - menaati tata tertib sekolah
 - menghormati kedua orang tua
21. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal
- | | |
|---------------|---------------|
| a. 1 ayat (1) | c. 3 ayat (1) |
| b. 2 ayat (1) | d. 5 ayat (1) |
22. Yang menjadi dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah
- pasal 1 UUD 1945
 - pasal 2 UUD 1945
 - pasal 18 UUD 1945
 - pasal 23 UUD 1945
23. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri disebut
- otonomi daerah
 - kewenangan daerah
 - daerah otonom
 - kemampuan daerah

24. Berikut ini yang **tidak** termasuk asas otonomi daerah adalah
- a. tugas perbantuan
 - b. sentralisasi
 - c. desentralisasi
 - d. dekonsentrasi
25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu badan
- a. legislatif daerah
 - b. eksekutif daerah
 - c. federatif daerah
 - d. yudikatif daerah
26. Berikut ini yang **tidak** termasuk kewenangan daerah otonom adalah
- a. pendidikan
 - b. moneter
 - c. kebudayaan
 - d. kesehatan
27. Berikut ini yang **bukan** termasuk lembaga teknis guna memperlancar pelaksanaan pemerintah daerah adalah
- a. desa
 - b. kelurahan
 - c. kecamatan
 - d. kawedanan
28. Yang menjadi prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah
- a. kekayaan alam
 - b. keanekaragaman
 - c. kesamaan
 - d. keseimbangan
29. Dengan diberlakukannya otonomi daerah pengalihan pembagian tugas dan wewenang dari
- a. daerah ke daerah lain
 - b. daerah kembali ke pusat
 - c. daerah bagian-bagian wilayah
 - d. pusat kepada daerah
30. Yang menjadi dampak negatif dari otonomi daerah, **kecuali**
- a. kesejahteraan masyarakat meningkat
 - b. munculnya kriminalitas yang tinggi
 - c. meningkatnya KKN di daerah
 - d. meningkatkan sifat sukuisme

31. Jika manusia memiliki moralitas, dan mentalitas yang tinggi dapat mengakibatkan
- pelaksanaan otonomi daerah tertunda
 - otonomi daerah mengalami hambatan
 - otonomi daerah berjalan lancar
 - tidak berpengaruh terhadap otonomi daerah
32. Berikut ini yang **bukan** faktor mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah
- kebijaksanaan
 - organisasi
 - keuangan
 - manusia
33. Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah UU No.
- 22 tahun 1998
 - 39 tahun 1999
 - 32 tahun 2004
 - 33 tahun 2004
34. Bentuk partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik yang aspiratif adalah
- mengkritik kebijakan pemerintah
 - menolak kebijakan pemerintah
 - mendukung kebijakan pemerintah
 - menerima karena ada ancaman
35. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat diwujudkan dalam bentuk
- penolakan perencanaan pembangunan
 - saran untuk perencanaan pembangunan
 - kritik terhadap pembangunan
 - pelaksanaan pembangunan
36. Besarnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik dipengaruhi oleh adanya kesadaran hukum dan
- kesadaran politik masyarakat dalam suatu negara
 - kesadaran hankam masyarakat di dalam suatu negara
 - kesadaran ekonomi masyarakat dalam suatu negara
 - kesadaran budaya masyarakat dari suatu negara

37. Yang **tidak** termasuk dalam tahapan perumusan kebijakan publik adalah
- penyusunan agenda
 - penilaian kebijakan
 - formulasi kebijakan
 - pelaksanaan kebijakan
38. Dalam pelaksanaan otonomi daerah partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik
- sebagian besar pada tahap penilaian
 - sebagian besar pada tahap perencanaan
 - sebagian besar pada tahap pelaksanaan
 - sebagian besar pada tahap penetapan
39. Berikut ini yang merupakan pentingnya partisipasi dalam perumusan kebijakan publik adalah
- menunjukkan bahwa kita sangat menghargai demokrasi
 - kebijakan sangat memihak kepada pemerintah
 - menghormati hak-hak yang dimiliki masyarakat
 - kebijakan publik akan sesuai dengan keinginan masyarakat
40. Apabila kebijakan publik tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka dalam pelaksanaannya
- masyarakat sering melakukan unjuk rasa
 - tidak menanggapi karena tidak berkepentingan
 - kurang mendapat respon dari masyarakat
 - tetap mematuhi semua kebijakan publik

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

- Sekelompok manusia yang menghuni wilayah suatu negara disebut
- Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara termasuk hak

3. Istilah negara dalam bahasa Belanda disebut
4. Landasan konstitusional pembelaan negara tercantum dalam UUD 1945, pasal
5. Tujuan negara Republik Indonesia tertuang dalam
6. Yang menjadi unsur utama dalam pertahanan dan keamanan negara adalah
7. Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom disebut
8. Kepada daerah dan perangkatnya dalam mengambil kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk
9. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan kebijakan publik yang berbentuk
10. Pejabat yang berwenang selalu menempatkan masalah dalam suatu agenda publik merupakan pengertian dari

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan unsur-unsur berdirinya suatu negara!
2. Sebutkan 2 (dua) fungsi negara Republik Indonesia!
3. Sebutkan unsur-unsur dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta!
4. Jelaskan asas-asas otonomi daerah!
5. Apa yang harus kalian lakukan jika ada kebijakan publik yang tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat!

Bab III

Globalisasi dalam Kehidupan

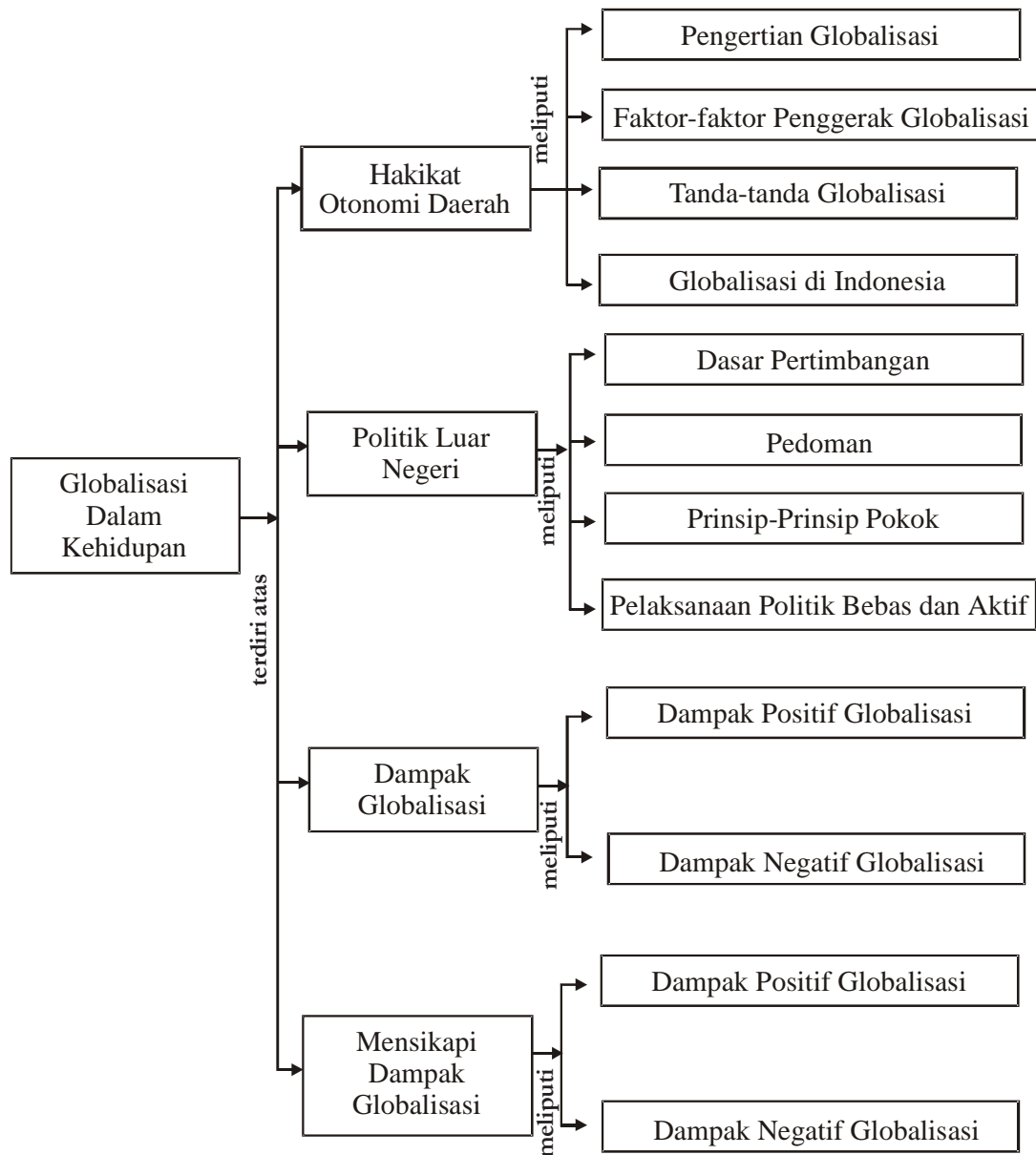


(Sumber : kutaikartanegara.go.id)

Gambar 3.1. 🏠 *Penggunaan internet di era globalisasi menunjukkan kemajuan teknologi informasi*

Dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi membuat peradaban manusia menjadi berubah, kehidupan masyarakat dunia semakin menyempit dan jarak yang jauh menjadi semakin dekat. Begitu pula masyarakat Indonesia mau tidak mau harus menerima perubahan peradaban kehidupan manusia yang telah mendunia. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia. Perubahan kehidupan masyarakat dunia didorong dengan adanya globalisasi. *Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan globalisasi ?*

PETA KONSEP



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu :

1. menjelaskan pengertian dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia,
2. mendeskripsikan praktik luar negeri dalam hubungan internasional di era globalisasi,
3. mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
4. menentukan sikap terhadap dampak globalisasi.

Sebagai bangsa yang merdeka dengan memiliki kedaulatan yang penuh, bagaimana dengan adanya globalisasi?. Lalu bagaimana sebagai bangsa yang memiliki kebebasan dalam mensikapi adanya globalisasi dunia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagai bangsa yang memiliki kepribadian yang luhur, kita harus memiliki sikap yang kritis dengan adanya globalisasi.

Kata Kunci

Globalisasi, bebas aktif, dampak


A. Hakikat Globalisasi

1. Pengertian Globalisasi

Sebagai langkah awal untuk memahami istilah dan pengertian globalisasi, terlebih dahulu kita perlu mengetahui asal-usul istilah globalisasi. Istilah globalisasi berasal dari bahasa Inggris disebut *globe* yang berarti dunia atau bola dunia. Globalisasi merupakan suatu proses menuju lingkup dunia. *Apakah yang dimaksud dengan globalisasi?*



(Sumber : www.thesavytraveller.com)

Gambar 3.2  *Globe yang digunakan sebagai dasar berpikir globalisasi*

Berdasarkan istilah tersebut di atas maka yang dimaksud dengan globalisasi adalah suatu proses mendunia, di mana semua peristiwa dari ekonomi, politik, budaya yang terjadi di belahan dunia telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia ini. Atau dapat disebut dengan pengertian yang lain bahwa globalisasi merupakan suatu proses di mana hubungan sosial dan saling ketergantungan antarmanusia di dunia ini semakin besar.

Untuk memahami pengertian globalisasi secara luas, selanjutnya marilah kita pahami pendapat dari beberapa ahli tentang globalisasi berikut ini:

a. Martin Albrown

Globalisasi menyangkut seluruh proses di mana penduduk dunia terhubung ke dalam komunitas dunia yang tunggal, komunitas global.

b. M. Waters

Globalisasi adalah sebuah proses sosial di mana halangan-halangan bersifat geografis pada tatanan sosial dan budaya semakin menyusut dan setiap orang kian sadar bahwa mereka semakin dekat satu sama lain.

c. Emmanuel Richter

Jaringan kerja globalisasi yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi dalam planet ini ke dalam ketergantungan dan peraturan dunia.

d. A. G. Mc Grew

Globalisasi mengacu pada keserbaragaman hubungan dan ke saling keterkaitan antar dan masyarakat yang membantu sistem dunia modern.

Globalisasi adalah proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain.

e. R. Robertson

Globalisasi adalah proses mengecilnya dunia dan meningkatnya kesadaran akan dunia sebagai satu kesatuan, kesaling ketergantungan dan kesadaran global akan dunia yang menyatu di abad ke- 20.

f. Wikipedia Encyclopedia Indonesia

Globalisasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan dalam masyarakat (changes) dalam perekonomian dunia yang dihasilkan oleh meningkat pesatnya perdagangan dan pertukaran kebudayaan. Dalam arti ekonomi, globalisasi mengacu terutama pada liberalisasi perdagangan bebas (*free trade*).

g. Bank Dunia

Globalisasi berarti kebebasan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk memprakarsai transaksi ekonomi dengan orang-orang dari negara lain.

h. Dana Moneter Internasional (IMF)

Globalisasi berarti meningkatnya ke saling tergantung ekonomi antar negara-negara di dunia yang ditandai oleh meningkatnya beragamnya volume transaksi barang dan jasa lintas negara dan penyebaran teknologi yang meluas dan cepat.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas secara jelas globalisasi membuat suatu perubahan kehidupan dunia yang dulunya sangat sederhana menjadi bersifat multidimensional. Dalam konsep awal orang beranggapan bahwa globalisasi merupakan suatu gejala ekonomi. Dengan adanya globalisasi seperti Toyota, Siemens, Coca Cola, Samsung, MC Donald's yang semua ini berada di berbagai negara di seluruh dunia. Tidak mengherankan apabila globalisasi membuat semakin kuatnya ikatan ekonomi, politik, teknologi, dan budaya yang mampu menghubungkan individu, komunitas, perusahaan, dan pemerintah di seluruh dunia.

Kehidupan manusia telah digerakan adanya perkembangan informasi dan teknologi komunikasi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Globalisasi membuat ruang lingkup interaksi antarmanusia di seluruh dunia semakin menyempit.

Globalisasi membuat suatu kenyataan bahwa kehidupan dunia menjadi satu kesatuan dalam "satu dunia", yang membuat sebuah desa global (*global ville*) dengan kehidupan manusia secara individu, kelompok, atau bangsa-bangsa menjadi saling ketergantungan (*interdependent*) dalam semua aspek kehidupan.

Tugas

Keingintahuan : Belajar Lebih Jauh

Banyak para ahli Indonesia mengemukakan pengertian globalisasi. Carilah dua pengertian globalisasi dari dua tokoh Indonesia. Hasilnya serahkan kepada gurumu !

2. Faktor-Faktor Penggerak Globalisasi

Dengan adanya globalisasi membuat kehidupan masyarakat dunia menjadi semakin menyempit dan masyarakat dunia menjadi saling ketergantungan. *Faktor apa sajakah yang dapat menggerakkan adanya globalisasi?*

Banyak para ahli, yang menyatakan bahwa hubungan masyarakat dunia dan sikap ketergantungannya dalam segala aspek kehidupannya semakin nyata. Hal ini, dipengaruhi adanya dua faktor yang dapat mendukung proses globalisasi menjadi semakin cepat tersebut, yaitu teknologi komunikasi informasi, dan teknologi transportasi.

a. *Teknologi Komunikasi dan Informasi*

Berkembangnya teknologi dan informasi dunia yang pesat membuat hubungan manusia antar manusia di dunia semakin mudah. Teknologi komunikasi dan informasi yang canggih ini merupakan hasil dari perusahaan multinasional dan transnasional yang telah mendunia. Teknologi komunikasi dan informasi yang canggih ini telah banyak yang dimiliki oleh setiap rumah, kantor instansi pemerintah ataupun swasta. Setiap rumah, kantor pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta saat ini telah memiliki mesin faksimili, televisi kabel dan digital, mail elektronik, serta internet, dan lain-lain.



(Sumber:www.psbacademy.edu.sg)

Gambar 3.3 🗨️ *Telepon seluler memungkinkan kita senantiasa terhubung satu lain di manapun pun kita berada.*

Sebelum terciptanya alat-alat komunikasi yang canggih, tempo dulu manusia dalam berkomunikasi menggunakan sarana komunikasi yang sangat sederhana. Sarana yang sederhana ini membuat kualitas dan kuantitas komunikasi sangat terbatas.

Saat ini sarana komunikasi dan informasi mudah didapatkan serta harganya terjangkau. Masalah waktu, jarak, dan tempat berkomunikasi sudah dapat dipecahkan. Telepon seluler/genggam yang dimiliki setiap orang dapat memungkinkan setiap waktu dapat berkomunikasi dengan siapa saja di mana mereka berada.

Internet merupakan sarana komunikasi yang paling cepat dan paling lengkap informasinya. Dengan internet manusia dapat mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Internet dapat mempermudah suatu transaksi-transaksi dalam dunia bisnis di seluruh dunia. Dalam dunia pendidikan internet melahirkan adanya *E-learning*, yaitu model pembelajaran dimana para siswa tidak perlu datang di sekolah-sekolah. Mereka cukup berada di depan layar komputer dan berkomunikasi secara visual melalui internet dengan pengajar atau sesama pelajar.

Teknologi satelit komunikasi dapat dipergunakan oleh stasiun televisi untuk menyiarkan secara langsung suatu peristiwa yang terjadi salah satu belahan dunia ke seluruh dunia dengan waktu yang bersamaan kejadian peristiwa yang tersebut. Misalnya, adanya bencana alam nasional, olahraga, peperangan, dan hiburan.

b. Teknologi Transportasi

Sebelum terciptanya alat transportasi mutakhir, orang menghabiskan waktu untuk dapat sampai pada daerah tujuannya. Lain halnya dengan saat ini, orang menjadi semakin cepat dan mudah untuk mencapai daerah yang dituju. Hal ini, dikarenakan telah tersedia teknologi transportasi yang memadai.

Teknologi transportasi yang mutakhir dapat mempermudah untuk menjangkau suatu daerah yang sulit. Teknologi transportasi yang canggih, seperti pesawat yang bermesin jet dapat dipergunakan untuk membawa penumpang dari salah satu negara ke negara lain dalam waktu pendek. Pesawat terbang saat ini bukan lagi menjadi sarana transportasi yang mahal. Setiap anggota masyarakat dari berbagai golongan telah banyak yang menggunakan pesawat terbang sebagai alat transportasi dalam kesehari-harinya.



(Sumber Kompas)

Gambar 3.4 🏠 *Teknologi transportasi dapat mempermudah pendek waktu tempo perjalanan dunia*

Tersedia sarana transportasi yang semakin canggih dapat mempercepat terjadi perubahan perekonomian suatu negara maupun bidang-bidang kehidupan yang lain, misalnya politik, sosial, dan budaya.

Tugas

Life Skills : Kecakapan Personal

Tanyakan kepada orang tuamu perkembangan sarana komunikasi dan informasi yang dialaminya : Bandingkan dengan keadaan saat ini.


3. Tanda-tanda Globalisasi

Suatu kehidupan negara yang telah memasuki dunia globalisasi, memiliki pertanda yang khusus. Globalisasi dapat ditunjukkan adanya beberapa tanda. Secara umum Budiyanto (2005:90) menyebutkan bahwa tanda-tanda globalisasi adalah sebagai berikut:

- meningkatnya aliran data lintas batas, seperti penggunaan internet, satelit komunikasi, dan telepon,
- meningkatkan perdagangan global,
- adanya desakan berbagai pihak untuk mengadili para penjahat perang di Mahkamah Internasional (*Internasional Criminal Court*), dan adanya gerakan untuk menyerukan keadilan internasional,
- meningkatnya pertukaran budaya (*cultural exchange*) internasional,
- menyebarluasnya faham multikulturalisme dan semakin besarnya akses individu terhadap berbagai macam budaya
- meningkatnya perjalanan dan turisme lintas negara,



(Sumber : 50 Tahun Indonesia Merdeka)

Gambar 3.5  *Imigran gelap semakin meningkat di era globalisasi ini.*

- meningkatnya imigrasi, termasuk imigrasi gelap,
- berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global,
- berkembangnya sistem keuangan global,
- meningkatnya aktivitas perekonomian dunia, yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional,
- meningkatnya peran organisasi-organisasi internasional, seperti WTO, WIPO, IMF, yang berurusan dengan transaksi-transaksi internasional.

4. Globalisasi di Indonesia

Di dunia ini, tidak ada satu negara pun yang menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat pengaruh globalisasi. *Bagaimanakah globalisasi di Indonesia?* Indonesia sebenarnya sejak dulu telah menerima pengaruh budaya dari luar.

Globalisasi di Indonesia saat ini sifat dan bentuknya lebih kompleks ketimbang daripada globalisasi tempo dulu. Oleh karena itu, globalisasi bagi Indonesia merupakan suatu tantangan dan suatu kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu bermain dan mengambil bagian dalam kancah globalisasi dunia.

Indonesia harus tetap mengikuti hukum globalisasi, di mana suatu peristiwa yang terjadi Indonesia akan memberikan pengaruh pada dunia internasional, sebaliknya peristiwa yang terjadi di dunia internasional akan memberikan dampak bagi Indonesia.



(Sumber : 50 Tahun Indonesia Merdeka)

Gambar 3.6 📌 *Pendidikan sebagai sarana untuk membina sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam menghadapi globalisasi.*

Agar bangsa Indonesia dapat ikut bermain dalam globalisasi internasional, maka perlu suatu persiapan diri yang matang dan senantiasa memiliki sikap terbuka. Untuk menghadapi semakin deras arus globalisasi diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu berhasil atau tidaknya Indonesia memainkan perannya

dalam persaingan global. Untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan adanya suatu pelatihan dan pendidikan yang mampu mempersiapkan manusia yang dapat bersaing dalam arus globalisasi. Dalam penjelasan umum UU No. 20 tahun 2003 pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Tugas

Life Skills : Kecakapan Sosial

Diskusikan dengan kelompokmu. Globalisasi menjadikan bangsa-bangsa di dunia terikat dalam suatu dunia. Mengapa bangsa Indonesia harus mengikuti adanya arus globalisasi? Langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan bangsa Indonesia guna untuk menghadapi pengaruh globalisasi yang semakin kuat dan cepat? Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas!

Tugas

Keingintahuan : Belajar Lebih Jauh

Carilah berita yang membahas tentang globalisasi bidang informasi dari surat kabar atau majalah. Kemudian tempelkan pada selembar kertas dan berilah analisis tentang berita tersebut! Hasilnya kumpulkan pada gurumu!

B. Politik Luar Negeri Bebas Aktif

1. Dasar Pertimbangan

Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat. Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat bangsa Indonesia harus menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa di dunia, dan dalam memenuhi kebutuhan tetap memerlukan bantuan dari bangsa lain.

Bantuan yang diterima bangsa Indonesia adalah bantuan yang tidak bersyarat atau tidak mengikat sehingga dapat memperkuat kedaulatan bangsa dan negara. Dengan demikian bangsa Indonesia kedudukannya menjadi sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Kedaulatan Indonesia akan menjadi semakin kuat setelah mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Dengan kedaulatan yang kuat, berarti bangsa Indonesia mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk dalam hal kebijakan-kebijakan luar negerinya.

Dalam bentuk apakah kebijakan luar negeri suatu negara Indonesia? Kebijakan luar negeri dapat disebut politik luar negeri. Politik luar negeri adalah suatu strategi, pola perilaku, dan kebijakan suatu negara berhubungan dengan negara lain atau pun dunia internasional.

Semenjak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah dihadapkan dua kekuatan besar, yaitu munculnya dua kekuatan besar di dunia. Satu pihak Barat (Amerika Serikat dengan sekutunya) dengan ideologi liberal dan di pihak Blok Timur (Uni Soviet dengan sekutunya) yang berideologi komunis. Keadaan yang demikian ini berpengaruh terhadap usaha-usaha bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. Selain itu, bangsa Indonesia masih menghadapi Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Kenyataan yang demikian ini, memberikan dorongan bangsa Indonesia untuk menentukan sikap dalam merumuskan politik luar negerinya.

Pada tanggal 2 September 1948, di hadapan Badan Pekerja Nasional Pusat pemerintah Indonesia mengumumkan pendirian politik luar negeri yang antara lain berbunyi” ... *tetapi mestikah*

kita, bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?"

Bangsa Indonesia dalam perjuangannya melaksanakan berdasarkan keyakinan percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan diri sendiri. Untuk itu, dalam menjalin hubungan internasional, bangsa Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif yang diabadikan pada kepentingan nasional.

Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif sebagai perwujudan salah satu tujuan negara yang termuat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sebagai bagian bangsa-bangsa di dunia, Indonesia meskipun mendapat dampak dari globalisasi tetap mempertahankan politik yang bebas aktif.

2. Pedoman Politik Luar Negeri

Apakah yang menjadi pedoman pelaksanaan politik luar negeri Indonesia? Untuk melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif bangsa Indonesia berdasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Dasasila Bandung yang mencerminkan solidaritas negara-negara Asia dan Afrika, dan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan segala manifestasinya, serta mengandung sifat non-intervensi (tidak turut campur urusan negara lain).
- b. Prinsip bahwa masalah Asia hendaknya dipecahkan oleh bangsa Asia sendiri dengan kerjasama regional.
- c. Pemulihan kembali kepercayaan negara-negara lain terhadap maksud dan tujuan revolusi Indonesia dengan cara memperbanyak kawan daripada lawan, menjauhkan kotradiksi dengan mencari keserasian yang sesuai dengan falsafah Pancasila.
- d. Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan penanggapan sehingga pengarahannya harus dilakukan untuk kepentingan nasional terutama kepentingan ekonomi rakyat.

3. Prinsip-Prinsip Pokok

Sesuai dengan pernyataan pemerintah pada tanggal 2 September 1948 yang disampaikan di depan Badan Komite Nasional Pusat, bahwa prinsip-prinsip dasar untuk melaksanakan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut:

- a. Negara Indonesia menjalankan politik damai.
- b. Negara Indonesia menjalin persahabatan dengan segenap bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri masing-masing.
- c. Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal.
- d. Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.
- e. Negara Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB.
- f. Negara Indonesia membantu PBB menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih terjajah. Hal ini, disebabkan karena tanpa kemerdekaan tidak mungkin terciptanya rasa persaudaraan dan perdamaian internasional.

4. Pelaksanaan Politik Bebas dan Aktif

Dengan melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, diharapkan dapat menciptakan adanya perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera. *Apa yang dimaksud dengan politik bebas aktif?*

- a. *Bebas*, artinya bangsa Indonesia menentukan sikap dan pandangan terhadap berbagai permasalahan internasional terlepas dari ikatan antara blok Barat maupun blok Timur.
- b. *Aktif*, artinya Indonesia senantiasa aktif memperjuangkan terwujudnya perdamaian dunia. Aktif dalam memperjuangkan adanya kemerdekaan dan kebebasan, aktif dalam memperjuangkan ketertiban dunia, aktif turut serta menciptakan keadilan sosial dunia.

Sebagai upaya merealisasi perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif di kancah internasional, maka Indonesia selalu aktif dalam ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Berikut ini, contoh perwujudan Indonesia melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif adalah sebagai berikut:



(Sumber : 50 Tahun Indonesia Merdeka)

Gambar 3.7 *Penyelenggaraan KAA di Bandung merupakan pelaksanaan politik bebas dan aktif*

- a. Indonesia pada tahun 1955, menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Deklarasi Bandung.
- b. Indonesia aktif dalam pendirian Gerakan Nonblok, pada tahun 1961 berusaha membantu dunia internasional untuk meredakan ketegangan perang dingin antara blok Barat dan blok Timur.
- c. Indonesia aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
- d. Indonesia aktif ikut membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik di Philipina, dan masih banyak lagi yang lain.

Dalam pergaulan internasional, Indonesia membina dan mempererat persahabatan dan kerja sama yang saling menguntungkan antarbangsa. Untuk meningkatkan peranan politik luar negeri yang bebas aktif dalam forum internasional dilakukan melalui, pemantapan dasar pemikiran kenusantaraan. Selain itu, memperluas ekspor kepasar dunia bebas, menarik para investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, kerja sama di bidang pengetahuan dan teknologi.

Tugas

Wawasan Produktivitas : Daya Saing

Indonesia melaksanakan pelatihan luar negeri bebas dan aktif. Indonesia melibatkan diri dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Tindakan apa yang harus dilakukan Indonesia untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah?

Keingintahuan : Belajar Lebih Jauh

Carilah berita dari surat kabar, berita TV atau berita-berita radio tentang peranan pasukan perdamaian keamanan PBB dari Indonesia dalam perdamaian dunia. Kemudian berita tersebut dianalisis dan ditulis pada selembar kertas!

C. Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Globalisasi berarti penyebaran segala secara cepat di seluruh dunia. Dengan penyebaran yang cepat ini, bukan berarti tidak memberikan dampak dalam kehidupan manusia.

Jelaskan dampak-dampak dengan adanya globalisasi! Kita harus mengakui bahwa globalisasi telah membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan globalisasi tidak semuanya bersifat positif bagi kehidupan manusia akan tetapi ada juga yang berdampak negatif bagi kehidupan manusia.

1. Dampak Positif Globalisasi

Globalisasi yang berkembang saat ini, telah merambah dalam segala aspek kehidupan manusia. Globalisasi memberikan dampak pada bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang teknologi.

a. Bidang Politik

Globalisasi memberikan perubahan terhadap kedaulatan negara yang pada mulanya dimiliki secara penuh oleh suatu negara. Akan tetapi, secara berangsur-angsur kedaulatan negara itu mengalami penyesuaian dengan kepentingan global.

Globalisasi memberikan dampak yang positif di bidang politik dan pemerintahan dalam suatu negara di dunia ini. Meskipun politik dan pemerintahan merupakan hak kedaulatan setiap negara, akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahannya negara-negara lain menuntut adanya sikap keterbukaan, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia.

b. Bidang Ekonomi

Globalisasi membuat maraknya perkembangan industri di negara-negara yang berkembang dengan tenaga ahlinya dari bangsa lain. Globalisasi dapat memberikan peluang adanya

kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Globalisasi juga membuka adanya pasar internasional sehingga barang-barang produk luar negeri telah terpasarkan di dalam suatu negara.

Globalisasi mendorong terbentuknya lembaga-lembaga ekonomi dunia yang beranggotakan negara-negara yang berada di dunia ini. Misalnya *Internasional Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), *International Monetary Fund* (IMF), dan *World Trade Organization* (WTO), yaitu organisasi dunia yang membantu mengatur laju perdagangan dan perputaran uang antarnegara. Globalisasi ikut berperan untuk membentuk perjanjian kerja sama perdagangan regional seperti *Asia-Pasifik Economic Cooperation* (APEC), *Nort American Free Trade* (NAFTA), *Asian Free Trade Area* (AFTA), dan adanya pembentukan mata uang bersama negara-negara Eropa yang dinamakan Euro.



(Sumber : www.bpa.gov.my.gif)

Gambar 3.8 ↑ Pelabuhan sebagai sarana perdagangan internasional

c. Bidang Teknologi dan Informasi

Globalisasi memberikan dampak yang positif dalam bidang teknologi dan informatika dalam suatu negara. Dengan semakin canggihnya teknologi dan informasi dapat memungkinkan setiap orang mampu melewati batas-batas negara dalam waktu yang singkat sehingga menghemat waktu dan tenaga.

Dengan adanya globalisasi di bidang teknologi dan informasi, seseorang yang menginginkan informasi tentang peluang kerja ke luar negeri dapat mencarinya melalui internet.

2. Dampak Negatif Globalisasi

Globalisasi tidak semua memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia. Globalisasi dapat menimbulkan pengaruh yang kurang menguntungkan bagi banyak negara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa globalisasi mempengaruhi terhadap berbagai bidang kehidupan manusia.

a. Bidang Politik

Setiap negara di dunia ini, setelah adanya globalisasi pemerintahan negara yang berdaulat dalam mengatur dirinya sendiri semakin berkurang. Hal ini, dikarenakan adanya aturan-aturan baru yang telah disepakati bersama dengan lembaga-lembaga global misalnya PBB dan WTO. Campur tangan masyarakat internasional dan masuknya nilai-nilai budaya yang baru dari dunia luar memberi perubahan bidang politik dalam suatu negara.

Di era globalisasi ini, Indonesia dalam bidang politik setelah merebaknya nilai-nilai politik barat masuk secara langsung atau tidak langsung membuat lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong-royong.

Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan negara semakin mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat.

Semakin banyaknya partai politik, organisasi nonpemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjadi sponsor kepentingan tertentu dengan menyuarakan hak asasi manusia, supremasi hukum, demokratisasi, lingkungan. Dengan masuknya nilai-nilai politik barat baik secara langsung atau tidak langsung memberikan inspirasi timbulnya unjuk rasa, demonstrasi yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum.

b. Bidang Ekonomi

Adanya globalisasi perekonomian suatu negara akan mengalami perubahan yang drastis. Hal ini terjadi adanya sektor-sektor ekonomi rakyat yang semula mendapat subsidi sekarang semakin berkurang, lembaga ekonomi seperti koperasi sulit untuk berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya mulai ditinggalkan.



(Sumber : www.serambinews.com)

Gambar 3.9 🗨 Sejak era globalisasi jumlah unjuk rasa semakin meningkat

Kompetisi produk dan harga semakin meninggi sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin selektif. Ini semua tidak lepas adanya semangat kapitalisme yang tumbuh makin subur dan berpotensi menciptakan kesenjangan ekonomi antara negara-negara kaya dengan negara-negara yang berkembang. Negara-negara yang kuat ekonominya bersekongkol dalam rangka mencari keuntungan sebesar-besarnya meskipun dapat merugikan bagi negara-negara yang ketahanan ekonominya lemah.

c. Bidang Sosial Budaya

Globalisasi memberikan dampak yang negatif terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat dunia. Melalui teknologi informasi dan komunikasi yang canggih masyarakat seantero dunia dapat menikmati nilai-nilai budaya modern yang dapat melenturkan nilai-nilai-nilai lokal yang dapat mengakibatkan terjadinya krisis nilai dan identitas.

Orang-orang cenderung bergaya hidup individualisme, pragmatisme, hedonisme, dan konsumerisme. Semangat gotong royong ditinggalkan, solidaritas, dan setiakawan sosial semakin berkurang. Kehidupan masyarakat semakin meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Globalisasi juga memberikan pengaruh adanya kadar dan kualitas kejahatan semakin canggih dengan mempergunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Tugas

Life Skills : Kecakapan Sosial

Diskusi dengan kelompok diskusi kalian. Akhir-akhir ini sebagian warga negara Indonesia memprotes terhadap perusahaan asing di Indonesia. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai keberadaan perusahaan tersebut sejalan dengan adanya globalisasi saat ini? Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas!

Tugas

Keingintahuan : Belajar Lebih Jauh

Bacalah berita dari beberapa sumber/media masa yang berada di lingkunganmu tentang tenaga kerja Indonesia di luar negeri! Tulis atau tempelkan pada selembar kertas kemudian berilah analisis tentang berita tersebut!

D. Mensikapi Dampak Globalisasi

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia, tidak dapat terhindar dari globalisasi. *Bagaimanakah sikap bangsa Indonesia terhadap globalisasi?* Bangsa Indonesia dalam mensikapi globalisasi dunia selalu bersikap selektif. Untuk itu berikut ini akan kita kaji dua sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi.

1. Sikap Menerima Dampak Positif Globalisasi

Sebagai bangsa yang tidak dapat menghindari dari dampak globalisasi, harus disadari bahwa kenyataan yang terjadi walaupun tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Kita membayangkan bahwa globalisasi membuat kehidupan manusia dalam bidang ekonomi menjadi semakin baik. Kesejahteraan semakin meningkat, serta transportasi, dan komunikasi semakin mudah.

Memang harus kita akui bahwa globalisasi dapat menciptakan permasalahan bagi masyarakat global. Tidak sedikit orang mulai berbalik menolak konsep-konsep globalisasi dan pasar bebas. Menurut pemikiran mereka globalisasi hanya menguntungkan bagi negara kaya dan globalisasi akan melahirkan adanya penjajahan gaya baru.

Menurut Wijianto (1005:68) pemikiran mengenai baik buruknya globalisasi secara umum negara dapat dikelompokkan menjadi tiga sebagai berikut:

- a. Sebagian besar negara dapat menerima dan mendukung globalisasi. Dengan demikian, kelompok ini beranggapan bahwa globalisasi merupakan jalan keluar untuk memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan rakyat di dunia ini.
- b. Sebagian bersikap kritis dan menolak globalisasi
Kelompok ini beranggapan bahwa globalisasi dianggap sebagai bentuk penjajahan dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang dan miskin. Dengan adanya globalisasi semakin membuat semakin meningkatnya kemiskinan dan ketidakadilan bagi masyarakat.
- c. Sebagian menerima globalisasi sebagai sebuah kenyataan yang tidak bisa ditolak akibat begitu kuatnya pengaruh informasi dan teknologi telekomunikasi.

Kelompok ini tetap kritis terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh globalisasi.

Indonesia mengakui bahwa globalisasi memberikan keuntungan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Adapun keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan adanya globalisasi adalah sebagai berikut:

- a. Indonesia menerima nilai-nilai budaya barat secara selektif.
- b. Indonesia dengan menerima globalisasi ini berarti Indonesia tidak terkucilkan dari pergaulan dunia.
- c. Indonesia mampu mengekspor produk-produk Indonesia ke berbagai negara.
- d. Indonesia dapat berperan serta dalam perdagangan dunia secara terbuka.



(Sumber : www.presidensby.info)

Gambar 3.10  *Indonesia berperan aktif dalam perdagangan dunia.*

Adanya berbagai keuntungan dari dampak globalisasi ini perlu kita syukuri. Berbagai peluang yang ditawarkan jika meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia harus kita manfaatkan sebaik-baiknya.

Tugas

Wawasan Produktivitas : Daya Saing

Di era globalisasi Indonesia mampu mengeksport berbagai macam produk. Berikan contoh produk Indonesia yang dijual ke luar negeri. Apa keunggulan produk Indonesia dibandingkan dengan produk negara lain. Tulislah hasilnya dan serahkan kepada gurumu!

2. Sikap Menolak Dampak Negatif Globalisasi

Indonesia selain menerima dampak positif dari globalisasi juga menerima adanya dampak negatifnya dari globalisasi. Adapun dampak negatif dari globalisasi yang dihindari bangsa Indonesia sebagai berikut:

a. Ketidakadilan dan Kemiskinan

Globalisasi dapat menciptakan adanya ketidakadilan dan kemiskinan akibat adanya aturan-aturan pasar bebas yang disepakati secara global. Dengan adanya globalisasi, setiap negara melakukan penghapusan terhadap segala bentuk subsidi pada rakyat dan pemerintah melakukan praktek monopoli.

Sikap seperti ini, tidak sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Nilai ketidakadilan ini harus dihindarkan oleh bangsa Indonesia.

b. Tumbuh Nilai Budaya Negatif



(Sumber : mstar.com.my)

Gambar 3.11 📖 **Globalisasi banyak menumbuhkan nilai budaya negatif**

Masyarakat telah banyak menerima nilai-nilai budaya barat secara utuh tidak lagi secara selektif. Nilai-nilai budaya yang bersifat dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia tetap diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini, karena sebagian masyarakat Indonesia berkeinginan untuk menerapkan pola hidup kebarat-baratan (westernisasi). Nilai-nilai kehidupan tersebut jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut harus kita tolak karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dari sejak dulu telah memiliki nilai-nilai luhur seperti halnya:

- a. bersikap relegius,
- b. pola hidup sederhana,
- c. bermusyawarah,
- d. rasa kebersamaan dan gotong royong,
- e. bersikap sopan santun,
- f. solidaritas,
- g. toleransi,
- h. setia kawan, dan
- i. semangat kerja keras.


Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia harus selalu kita pertahankan meskipun arus globalisasi mengalir dengan deras dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus tetap mempertahankan Pancasila. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia harus dijadikan pedoman untuk menentukan baik-buruknya sesuatu di era globalisasi ini.

c. Masuknya Barang-barang Ilegal

Globalisasi di Indonesia memberikan peluang untuk masuknya barang-barang produk luar negeri ke Indonesia



(Sumber : www.pikiran-rakyat.com)

Gambar 3.12  *Penyelundupan barang dari luar negeri sangat merugikan negara*

dengan secara tidak resmi. Hal ini menimbulkan persaingan harga yang kurang sehat. Masyarakat yang memiliki kecenderungan pola hidup konsumtif banyak terjebak dengan barang-barang yang ilegal karena dapat diperoleh dengan harga yang rendah. Kejadian ini, dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi negara ataupun masyarakat sendiri.

Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memiliki sikap yang selektif terhadap hal-hal yang bersifat negatif. Tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bangsa dan negara harus kita hindarkan. Nilai budaya bangsa kita dapat dipergunakan untuk menangkal dampak negatif dari globalisasi tersebut. Sebagai pedomannya adalah Pancasila.

Tugas

Life Skills : Kecakapan Sosial

Diskusikan dengan kelompok diskusi kalian, globalisasi telah memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkinkah bangsa Indonesia menghindari pengaruh globalisasi dengan mempertahankan pola hidup yang sudah lama berjalan dalam masyarakat Indonesia?

Hasil diskusi dipresentasikan!

Tugas

Keingintahuan : Belajar Lebih Jauh

Carilah berita dari surat kabar, majalah, atau media masa lainnya tentang dampak globalisasi yang dirasakan masyarakat berkaitan dengan budaya bangsa Indonesia. Kemudian tempelkan pada selembar kertas dan berilah analisis secukupnya!

Rangkuman

- Globalisasi adalah suatu peristiwa di mana kehidupan manusia telah dipengaruhi semua peristiwa ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi informasi, dan transportasi yang telah mendunia
- Globalisasi membuat ruang lingkup interaksi antarmanusia di seluruh dunia menjadi semakin sempit dan saling ketergantungan tinggi.
- Globalisasi banyak dipengaruhi adanya teknologi informasi dan transportasi yang semakin canggih
- Globalisasi bagi bangsa Indonesia, merupakan suatu tantangan dan suatu kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia mampu bersaing dan ambil bagian dalam kancah pergaulan internasional.
- Politik luar negeri bebas aktif dilaksanakan bangsa Indonesia diabadikan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional Indonesia.
- Politik luar negeri yang bebas aktif oleh bangsa Indonesia dipergunakan untuk mewujudkan adanya pelaksanaan tujuan negara yang bersifat internasional.
- Globalisasi dengan segala dampaknya baik yang positif atau dampak yang negatif tetap merambah kehidupan bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa di dunia.
- Bangsa Indonesia selalu bersikap positif terhadap adanya pengaruh dari nilai-nilai budaya barat yang masuk di Indonesia
- Bangsa Indonesia dalam menerima pengaruh budaya bersikap selektif, budaya yang masuk tetap disaring. Penyaringan budaya dengan mempergunakan Pancasila sebagai filternya

Kerjakan di buku latihanmu!

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Globalisasi membuat hubungan antar manusia di dunia semakin dekat. Dengan demikian globalisasi merupakan sebuah
 - a. nasionalisme
 - b. gejala *global village*
 - c. imperialisme lama
 - d. internasionalisme
2. Supaya bangsa Indonesia tidak ketinggalan dengan adanya globalisasi, sudah sewajarnya untuk
 - a. menjalin hubungan dengan negara yang terdekat
 - b. membatasi diri dari kemajuan teknologi dan informasi modern
 - c. menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia
 - d. menolak segala perubahan jaman
3. Dengan terciptanya teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan adanya
 - a. sikap tertutupnya hubungan antar bangsa
 - b. ketergantungan antar manusia semakin lemah
 - c. kemudahan hubungan antar manusia
 - d. kedekatan antar orang yang berkepentingan
4. Dasar pertimbangan Indonesia untuk menerapkan politik bebas aktif adalah
 - a. wilayah Indonesia berupa kepulauan
 - b. hasil rapat BP-KNIP 2 september 1948
 - c. Indonesia mengingnlam menjadi obyek
 - d. Indonesia menyadari sebagai bagian negara terjajah

5. Dalam melaksanakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia senantiasa
 - a. memperhatikan kepentingan internasional
 - b. memperhatikan kepentingan global
 - c. mempertimbangkan kepentingan regional
 - d. memperhatikan kepentingan nasional
6. Berikut ini yang **bukan** termasuk upaya peningkatan politik Indonesia dalam forum internasional adalah
 - a. pemantapan dasar pemikiran kenusantaraan
 - b. melakukan inspirasi kenegara tetangga terdekat
 - c. memperluas ekspor ke pasaran dunia bebas
 - d. menjalin kerja sama di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan
7. Globalisasi juga membawa dampak negatif bagi sejumlah negara yang berkembang dan akan membangkitkan adanya
 - a. semangat kapitalisme
 - b. semangat kekeluargaan
 - c. sikap solidaritas yang tinggi
 - d. peningkatan subsidi terhadap kebutuhan pokok
8. Munculnya berbagai bentuk ketidakadilan dalam suatu negara merupakan
 - a. ancaman globalisasi ekonomi
 - b. dampak positif demokrasi ekonomi
 - c. tujuan dari globalisasi ekonomi
 - d. hakekat globalisasi ekonomi
9. Banyak orang tidak setuju dengan adanya globalisasi, mereka beranggapan bahwa globalisasi merupakan
 - a. sistem perekonomian baru
 - b. sistem kepemimpinan yang baru
 - c. bentuk baru penjajahan dari negara lain
 - d. bentuk kerja sama baru dalam

10. Berikut ini yang bukan menjadi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era globalisasi adalah
 - a. meningkatkannya ekspor produk-produk pertanian ke luar negeri
 - b. meningkatnya masuk barang-barang ilegal ke wilayah Indonesia
 - c. tumbuhnya nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia
 - d. adanya penghapusan dari berbagai subsidi dan tumbuhnya praktek-praktek monopoli pemerintah

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan benar!

1. Globalisasi merupakan proses di mana hubungan sosial dan saling ketergantungan antarnegara dan antarmanusia di dunia
2. Pada mulanya globalisasi sering digambarkan sebagai sebuah
3. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi hubungan
4. Bagi Indonesia globalisasi merupakan sebuah tantangan dan
5. Tersedia lapangan kerja baik di dalam negeri atau di luar negeri merupakan dampak positif globalisasi di bidang
6. Politik luar negeri Indonesia adalah politik
7. Konferensi Asia-Afrika pertama kali dilaksanakan di

8. Salah satu keaktifan Indonesia dalam mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif pada tahun 1961 memprakarsai berdirinya
9. Bangsa Indonesia dalam menerima nilai-nilai budaya baru bersifat
10. Alat dipergunakan bangsa Indonesia untuk menyaring masuknya nilai-nilai budaya asing di Indonesia di Indonesia adalah

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan globalisasi?
2. Sebutkan faktor-faktor yang dapat mendorong berkembang globalisasi dunia!
3. Apa yang melatar belakangi lahirnya politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif!
4. Sebutkan 3 (tiga) dampak-dampak positif adanya globalisasi bangsa Indonesia!
5. Apa yang harus dilaksanakan bangsa Indonesia dengan adanya globalisasi?

Bab IV Prestasi Diri

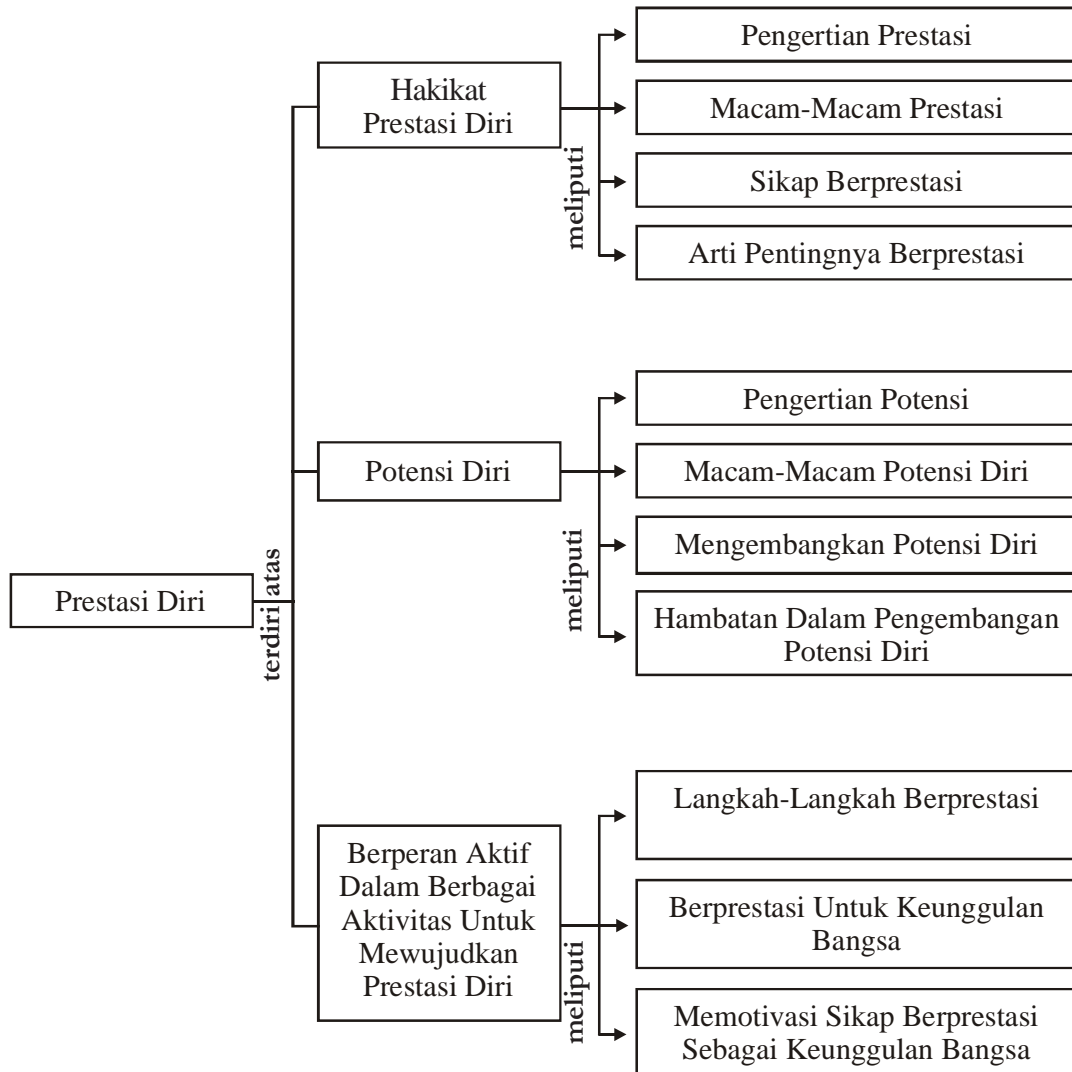


(Sumber : www.presidensby.info)

Gambar 4.1

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Manusia dikaruniai daya cipta, karsa, dan rasa. Dengan cipta, rasa, dan karsa mampu memperoleh suatu prestasi. *Apa yang dimaksud prestasi?* Hasil prestasi yang dicapai setiap orang berbeda-beda. Hasil prestasi yang diperoleh setiap orang tergantung dalam mendayagunakan potensi yang dimiliki setiap orang. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan potensi diri?.

PETA KONSEP



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu:

1. menjelaskan pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa,
2. mengenal potensi diri untuk berprestasi sesuai dengan kemampuan, dan
3. menampilkan peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai dengan kemampuan demi keunggulan bangsa.

Dalam bab ini, akan kita pelajari mulai hakekat prestasi, potensi diri, sampai dengan berperan aktivitas dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri. Untuk mempermudah memahami materi terlebih dahulu cermati peta konsep di bagian depan.

Kata Kunci

Prestasi diri, potensi, tantangan, ambisi, motivasi

A. Hakikat Prestasi Diri

1. Pengertian Prestasi


Istilah prestasi bukan lagi suatu hal yang baru dan setiap saat telah kita dengar. *Apakah kalian telah mengetahui yang dimaksudkan dengan prestasi?* Untuk memahami tentang prestasi terlebih dahulu kita ketahui arti kata prestasi itu sendiri. Prestasi berasal dari bahasa Belanda *prestate* yang artinya hasil usaha. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia prestasi diartikan sebagai hasil yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang sudah diusahakan. Berdasarkan pengertian tersebut, prestasi merupakan hasil dari suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan.

Prestasi diri merupakan suatu hasil usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang dianggap berprestasi jika mereka telah meraih apa yang telah diusahakan, baik melalui belajar, bekerja ataupun lewat olahraga, dan lain sebagainya. Prestasi dapat dicapai oleh setiap orang apabila telah melakukan segala upaya dengan memanfaatkan kemampuan intelektual, emosional, spiritual, dan ketahanan diri dalam berbagai aspek kehidupan.

Sudah barang tentu kalian juga menginginkan menjadi orang yang berprestasi. Untuk itu, apa yang dimaksud dengan orang yang berprestasi itu? Orang yang berprestasi merupakan orang yang telah meraih kesuksesan dalam salah satu bidang kehidupan.

Pada umumnya orang yang sukses adalah orang yang memiliki suatu kelebihan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang yang berprestasi merupakan orang yang mampu mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sebagai orang yang memiliki potensi diri, kita harus bersikap realistis bahwa tidak ada suatu prestasi yang diperoleh tanpa kerja keras.



Gambar 4.2.  (Sumber : blogsimages.skynet.be)
Suatu keberhasilan harus dicapai melalui kerja keras dan pantang menyerah

Banyak para atlet yang menginginkan prestasi di tingkat dunia. Oleh karena itu, mereka selalu bekerja keras dalam berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Begitu pula para ilmuwan untuk mencapai kesuksesan yang besar mereka tidak hentinya melakukan penelitian-penelitian atau eksperimen-eksperimen dengan tiada mengenal putus asa meskipun berulang kali mengalami kegagalan. Mereka selalu berusaha mencari permasalahan mengapa usahanya mengalami kegagalan.

Melalui kerja keras dengan tidak putus asa akhirnya mereka berhasil mencapai prestasi yang luar biasa.

2. Macam-Macam Prestasi

Setiap usaha akan menghasilkan suatu prestasi yang bermanfaat untuk meningkatkan status sosial dalam kehidupan. Akan tetapi juga ada yang memperoleh prestasi sangat minim. Hal ini dikarenakan dalam usaha yang dilakukan kurang optimal dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki. Sebutkan macam-macam prestasi yang diperoleh setiap orang dari usaha yang dilakukan! Prestasi yang dicapai setiap orang dalam setiap usaha ada berbagai prestasi, yaitu antara lain:

- a. prestasi belajar, merupakan hasil yang dicapai dari seorang pelajar dalam usaha belajarnya,
- b. prestasi kerja, merupakan hasil yang dicapai seorang pekerja dari usaha kerja yang dilakukan,



(Sumber : www.anjjabar.go)

Gambar 4.3. 🏠 *Prestasi seni merupakan hasil melalui olah seni*

- c. prestasi seni, merupakan hasil yang diperoleh seseorang melalui usaha olah seninya,
- d. prestasi olah raga, merupakan suatu prestasi yang diperoleh seorang olah ragawan melalui kompetisi olah raga,
- e. prestasi lingkungan hidup, merupakan suatu prestasi yang diperoleh melalui usaha penyelamatan lingkungan hidup.

Seperti apa yang telah dikemukakan di depan, bahwa semua orang selalu menginginkan untuk berprestasi dalam hidupnya. Adapun orang yang dapat dikatakan berprestasi adalah orang-orang yang memiliki motivasi sebagai berikut:

- a. memiliki keberanian mengambil resiko,
- b. memiliki rasa tanggung jawab yang besar,
- c. menerima dan menggunakan kritik sebagai umpan balik,
- d. memiliki sikap yang berorientasi pada masa depan atau cita-cita,
- e. memiliki sikap yang berorientasi pada keberhasilan, dan
- f. memiliki sikap yang kreatif, inovatif, dan mampu menggunakan waktu secara baik.

Tugas

Wawasan Produktivitas : Inovasi dan Kreativitas.

Bacalah berita di bawah ini. Ambil hikmah di balik berita tersebut

Sri Wulandari Si Pemuda Pelopor

Juara I Pemuda Pelopor di Bidang Pendidikan Tingkat Propinsi Jawa Timur

“Memakai jilbab dan tampak sederhana merupakan sosok pemuda yang begitu peduli dan mempunyai rasa sosial yang tinggi terhadap masyarakat di sekitarnya. Hal yang sudah sangat jarang dipunyai pemuda sebayanya”.

Hal ini dibuktikan oleh Wulan dengan mendirikan FPDP2 (Forum Putra Daerah Peduli Pendidikan) dengan dibantu 6 orang temannya. Latar belakang didirikannya FPDP2 ini karena Wulan merasa kebanyakan pemuda

kurang bisa memanfaatkan potensi mereka, walaupun di sekitar lingkungan Kelurahan Dandangan terdapat Pabrik Rokok Gudang Garam, ternyata banyak pemuda yang putus sekolah dan tidak ada kerjaan. Oleh karena itu Wulan mendirikan Organisasi FPDP2 sebagai wadah pemuda untuk mengabdikan potensinya dengan keberpihakan pada masyarakat kalangan bawah dengan membangun kelompok-kelompok studi sebanyak-banyaknya dengan basis sekolah dan masyarakat.

FPDP2 memilih Bahasa Inggris sebagai fokus gerakannya pada bidang pendidikan, karena Bahasa Inggris merupakan kebutuhan di era globalisasi. Namun tidak banyak orang menguasainya. Terlebih keberadaan kursus-kursus ataupun lembaga-lembaga pendidikan Bahasa Inggris yang kurang memihak pada masyarakat kalangan bawah yang notabenehnya berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Kendala awal seperti biasanya organisasi adalah masalah modal. Cara mengatasinya adalah dengan mengajak semua pihak untuk ikut peduli dan sadar akan pentingnya pendidikan dengan cara menjadi donator mengingat sadar dan peduli pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Serta menjalin kerja sama dengan semua pihak dan instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan. Pemkot Kediri memberikan tempat di belakang gedung GNI sebagai sekretariat FPDP2. Organisasi ini juga mengadakan English Course secara gratis. Di tingkat SD ada 40 siswa dan SMP ada 10 orang. Mungkin

kalaupun membayar dipastikan lebih murah dari English Course yang lainnya, karena program ini tetap berpihak kepada ekonomi lemah dan sebagian dananya digunakan untuk administrasi FPDP2 dan menggaji guru-gurunya karena guru-guru tersebut harus mandiri juga.

FPDP2 ternyata digunakan rekan pemuda dan mahasiswa yang belum memiliki media untuk mengaplikasikan potensi yang dimiliki sehingga bisa langsung dipetik manfaatnya, seperti menjadi instruktur dan pengelola. FPDP2 di Kota Kediri ini ternyata telah diikuti oleh daerah lain seperti FP3S (Surabaya), SEC dan El Fata (Gresik), SEC (Bojonegoro), FGMTP2 (Tulungagung) dan FP4 (Blitar).

Jerih payah Sri Wulandari ini ternyata diketahui oleh Pemerintah Kota Kediri dengan menjadikannya sebagai wakil Pemuda Pelopor di bidang Pendidikan pada tingkat Jawa Timur dan mendapatkan Juara I tingkat Propinsi Jawa Timur dan berhak mewakili Jawa Timur di tingkat Nasional.

Selasa Malam (12/09) sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Penilai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga datang ke Kediri dan diterima di Balai Kota oleh Asisten Pembangunan Muhaimin. Setelah itu menuju ke Dandangan tepatnya di sebuah rumah sederhana sekali di pinggir jalan menuju pabrik Gudang Garam yang dindingnya terbuat dari gedek dengan genteng terlihat dan lantai masih berupa tanah liat. Kunjungan ke sana ini dalam rangka rangkaian penilaian Pemuda Pelopor Tingkat Nasional. Wulan yang didampingi Ibu, teman, Perangkat Kelurahan Dandangan, Camat Kota dan beberapa orang dari Bagian Kesra,

diserbu berbagai pertanyaan oleh tim penilai tentang kesungguhan Wulan dalam kepeloporannya tetapi ternyata Wulan sangat lancar menjawab pertanyaan tersebut. Dan hal ini didukung keterangan dari masyarakat

sekitarnya. Setelah itu Tim Penilai mengunjungi sekretariat FPDP2 di belakang gedung GNI dan sangar belajar Bahasa Inggris di Kelurahan Singonegaran dan rangkaian acara penilaian ini selesai sekitar jam 23.30 WIB.(ad)

28 Sep 2006

Sumber : www.kotakediri.com

3. Sikap Prestasi

Bagaimanakah sikap untuk berprestasi itu? Untuk mendapatkan prestasi yang tinggi diperlukan adanya motivasi diri yang tinggi. Kesuksesan yang dicapai setiap orang dalam memperoleh prestasi tidak hanya dicapai oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga selalu diperlukan bantuan orang lain.

Bantuan yang dibutuhkan seseorang dalam upaya mencapai prestasi yang tinggi dapat bermacam-macam wujudnya dari yang berupa material, spiritual, dan atau dalam bentuk yang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat John Robert Power yang terdapat dalam buku Budiyanto (2005:11) dinyatakan bahwa diri kita merupakan *people who make things happening* (pelaku yang mampu mewujudkan sesuatu). Pernyataan ini memang membenarkan adanya pernyataan yang menyatakan bahwa seseorang tidak mungkin meraih sukses tanpa bantuan orang lain.

Kita harus menyadari bahwa untuk meraih prestasi kunci utamanya berada dalam diri kita sendiri. Tidak adanya semangat untuk berprestasi dalam diri kita sendiri, apa yang kita lakukan tidak ada lagi memiliki arti yang positif bagi diri kita sendiri. Untuk memperoleh hasil yang optimal, kita tidak boleh bersikap pesimis terlebih dahulu. Bangunlah dalam jiwa kita adanya sikap optimis terhadap diri kita sendiri. Dengan memiliki sikap optimis, kepercayaan diri, selalu tertantang untuk menyelesaikan dengan baik adanya berbagai kesulitan yang dihadapi.



(Sumber : www.sekolahalabandung.com)

Gambar 4.4. 🏠 *Dalam meraih prestasi jangan memiliki perasaan takut dalam menghadapi resiko*

Untuk mendapatkan suatu prestasi, kita harus mampu menghadapi adanya berbagai tantangan yang harus disikapi dengan penuh kesadaran diri. Sebagai orang yang berkeinginan untuk berprestasi jangan memiliki perasaan takut dalam menghadapi suatu resiko. *Dari mana sajakah tantangan yang mempengaruhi akan keberhasilan suatu usaha itu?* Dalam mencapai suatu prestasi memang tidak semudah orang memimpikan. Di hadapan setiap orang tentu saja sudah ada suatu tantangan yang menghadang.

Adapun tantangan yang dapat memberikan pengaruh terhadap setiap usaha yang dilakukan oleh setiap orang ada 2 (dua) hal, yaitu:

- a. berasal dari sendiri, misalnya bakat atau potensi, kecerdasan atau intelektual minat, motivasi, kebiasaan, emosi, kesehatan, dan pengalaman diri, dan
- b. berasal dari lingkungan, misalnya keluarga, sekolah masyarakat, sarana prasarana, fasilitas, gizi, dan tempat tinggal.

Kedua tantangan tersebut saling mendukung satu sama lain. Prestasi yang dicapai setiap orang akan optimal apabila antara kemampuan yang dimiliki daya yang kuat dan didukung lingkungan positif. Hal ini akan berbeda apabila kemampuan yang dimiliki kurang memiliki daya meskipun dukungan lingkungan optimal prestasi yang diperoleh tetap kurang maksimal. Begitu pula jika kemampuan sudah maksimal akan tetapi dukungan dari lingkungan kurang hasilnya juga kurang menggembirakan. Berbagai tantangan ini yang harus kita hadapi sebagai pendorong untuk mencapai prestasi yang kita inginkan.

Agar apa yang kita usahakan dapat prestasi yang tinggi, A.A Qowiy memberikan sepuluh kiat dalam menghadapi suatu kesulitan supaya dalam hidup dapat berprestasi.

Kesepuluh kita itu, adalah sebagai berikut:

- a. bersikap tenang dalam segala tindakan,
- b. memiliki kebiasaan suka bekerja keras,

- c. mampu menikmati indahnya kesulitan,
- d. adanya kemauan menjalin kerja sama saling menguntungkan,
- e. bersikap tegar dalam menghadapi suatu kesulitan,
- f. dapat mengambil hikmah dari suatu kesulitan,
- g. bersikap gigih dalam mencari ilmu,
- h. mempunyai keberanian dalam mengambil resiko,
- i. selalu menjalankan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
- j. mengembangkan sikap tawakal.

Sedangkan menurut Barbara Bartlein dalam buku Budiyanto (2005:13), menyebutkan sepuluh kiat untuk mencapai suatu kesuksesan dan prestasi kerja dalam *Ten Measures of Success* (Sepuluh Ukuran Kesuksesan), sebagai berikut:

- a. memberikan sumbangsih pada masyarakat dengan sukarela,
- b. belajar dari kegagalan dan penolakan,
- c. menghabiskan waktunya untuk melakukan apa yang diinginkan,
- d. mempunyai gaya hidup yang sehat secara fisik,
- e. menjaga kehidupan spiritual,
- f. mendapatkan penghasilan yang baik dari hasil pekerjaan yang baik,
- g. mempunyai visi dan tujuan,
- h. memperoleh cinta dan penghormatan dari orang-orang lain di sekitar Anda,
- i. berusaha untuk meraih kesempurnaan, dan
- j. mempercayai bahwa anda adalah seorang yang sukses.

Tugas

Merangsang Keingintahuan : Belajar Lebih Jauh

Bacalah buku, berita, atau artikel yang berisi tentang rahasia meraih sukses seorang tokoh. Buatlah kesimpulan dari bacaan itu!

4. Arti Pentingnya Berprestasi

Seseorang dinyatakan berprestasi jika dalam melakukan kegiatan mampu mendapatkan hasil yang optimal. *Apakah kalian telah mengetahui arti pentingnya berprestasi?*

Prestasi setiap orang pada umumnya berbeda-beda. Prestasi yang dicapai setiap orang ada yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang dicita-citakan. Akan tetapi, ada prestasi yang diperoleh seseorang jauh dari apa yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Untuk itu agar dapat mencapai prestasi yang tinggi diperlukan adanya kerja keras. Dalam melakukan usaha selain kerja keras harus dilandasi sikap yang disiplin.



(Sumber Kedaulatan Rakyat)

Gambar 4.5. **☞ Prestasi dapat menjadikan kebanggaan bagi diri sendiri**

Kerja keras dan disiplin merupakan kunci untuk mendapatkan prestasi yang tinggi. Memperoleh prestasi yang tinggi merupakan dambaan setiap orang. Prestasi yang tinggi dapat memberikan nama baik bagi diri sendiri, dan juga memberikan nama harum keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan segala potensi yang ada pada diri kita masing-masing untuk mendapatkan prestasi setinggi-tingginya.

Prestasi yang tinggi dapat tercapai apabila didahului dengan perencanaan yang disusun dengan baik dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Arti pentingnya prestasi bagi seseorang adalah:

- a. Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang dari usaha yang telah dilaksanakan.
- b. Prestasi merupakan sebuah pengalaman yang berharga dan menjadi sumber informasi untuk masa depan.
- c. Prestasi dapat menjadikan kebanggaan bagi diri sendiri, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara.
- d. Prestasi dapat dipergunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan dan keterampilan seseorang, sebuah kelompok, atau masyarakat.

Karena prestasi mempunyai arti yang sangat penting bagi diri seseorang, untuk itu mari kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang berprestasi yang sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing.

Tugas

Life Skills : Kecakapan Sosial

Diskusikan dengan kelompok diskusi Anda dengan beranggotakan 5 (lima) siswa! Setiap prestasi yang dicapai setiap orang diperlukan adanya suatu pengorbanan. Mengapa setiap orang dalam upaya mencapai prestasi yang telah direncanakan perlu memperhatikan kemampuan yang dimilikinya? Apakah mungkin seseorang dalam mencapai prestasi tidak perlu melakukan perencanaan ataupun pelaksanaan? Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas!

B. Potensi Diri

1. Pengertian Potensi

Sebelum membicarakan pengertian potensi, terlebih dahulu perlu dipahami istilah potensi. Potensi berasal dari bahasa Inggris *to potent* yang berarti keras, atau kuat. Istilah lain potensi dapat disebut kemampuan, kekuatan, kesanggupan, atau daya, baik sudah terwujud atau belum terwujud, tetapi belum optimal. *Berdasarkan dari istilah tersebut, jelaskan apa yang dimaksud dengan potensi?*

Guna memahami pengertian potensi marilah kita simak terlebih dahulu pengertian potensi dalam kamus umum Bahasa Indonesia. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.

Berdasarkan pengertian di atas potensi merupakan daya yang dimiliki oleh setiap manusia. Hanya saja, daya itu belum terwujud atau belum dimanfaatkan secara maksimal. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk paling sempurna diantara makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia dianugerahi cipta, rasa, dan karsa. Ketiga hal tersebut yang disebut potensi dasar. Dengan daya cipta, manusia mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan diri sendiri atau dimanfaatkan oleh orang lain.

Melalui perasaan, manusia mampu merasakan atau membedakan mana yang baik atau mana yang buruk. Sedangkan dengan karsa, manusia mempunyai kemauan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.



(Sumber : www.rsantoni.us.com)

Gambar 4.6. ☞ *Dengan daya cipta yang dimiliki, manusia mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat*

Dalam hidupnya, manusia berkewajiban memanfaatkan secara optimal tiga potensi dasar. Dengan memanfaatkan potensi dasar secara optimal manusia dapat mencapai prestasi yang bermanfaat dalam kehidupan.

2. Macam-Macam Potensi Diri

Setiap manusia memiliki potensi diri. Akan tetapi, potensi yang dimiliki setiap manusia berbeda-beda. Dengan adanya potensi yang berbeda-beda, maka harus saling memahami bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Dengan sikap yang saling memahami kehidupan manusia menjadi lebih harmonis.

Manusia merupakan makhluk dwitunggal yaitu makhluk pribadi dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup diperlukan bantuan atau pertolongan dari orang lain sehingga hidupnya menjadi sempurna.

Untuk memahami potensi diri yang dimiliki setiap manusia, terlebih dahulu sebutkan macam-macam potensi. Secara umum, Budiyanto (2006:3) menyebutkan bahwa potensi diri setiap manusia terdiri atas berikut ini:

- a. *Potensi fisik (psychomotoric)*, adalah organ fisik manusia yang dapat dipergunakan dan diperdayakan untuk berbagai kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup. Setiap potensi fisik yang dimiliki manusia mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Misal, kaki untuk berjalan, mulut untuk bicara, lidah untuk mengecap, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, dan lain sebagainya.



(Sumber : 50 Tahun Indonesia Merdeka)

Gambar 4.7. ☞ ***IQ berfungsi untuk menganalisis dan menghitung***

- b. *Potensi mental intelektual (intellectual quotient/IQ)* adalah potensi kecerdasan yang ada dalam otak manusia. Potensi ini berfungsi untuk menganalisis, merencanakan, menghitung, dan lain sebagainya.
- c. *Potensi sosial (emotional quotinet/EQ)*, adalah potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia (otak belahan kanan). Potensi berfungsi untuk mengendalikan marah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri, dan lain sebagainya.

- d. *Potensi mental spiritual (spiritual quotient/SQ)*, adalah potensi kecerdasan yang bertumpu bagian dalam diri sendiri yang berhubungan kearifan di luar ega atau jiwa sadar (bukan hanya mengetahui nilai, tetapi menemukan nilai). Melalui *spiritual quotient (SQ)* manusia memiliki intelektual, emosional, dan spiritual. SQ dapat terbentuk melalui pendidikan agama formal.
- e. *Potensi ketahananmalangan (adversity quotient/AQ)*, adalah potensi kesadaran manusia yang bersumberkan pada bagian diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang. AQ adalah faktor spesifik sukses (prestasi) seseorang karena mampu merespon berbagai kesulitan. Melalui AQ manusia mampu mengubah suatu rintangan sebagai penghalang menjadi peluang.



(Sumber : www.tzzz.hr)

Gambar 4.8. ☞ ***Kemampuan mengubah rintangan penghalang menjadi peluang adalah AQ***

Semua potensi tersebut di atas, merupakan kemampuan yang belum terwujud secara optimal. Supaya potensi-potensi yang berada pada diri manusia dapat didayagunakan secara optimal diperlukan adanya ambisi, dan kemauan untuk mengasah.



(Sumber : www.mbeproject.net)

Gambar 4.9. ♣ *Hanya dengan berlatih secara teratur potensi dapat diasah dengan baik*

Ambisi dapat mendorong manusia untuk memperoleh apa yang diinginkan manusia. Manusia dalam hidupnya tidak memiliki ambisi merupakan manusia yang tidak mau mengubah dirinya. Akan tetapi dalam mewujudkan ambisi manusia harus melihat kemampuan dirinya sendiri. Hal ini dapat membahayakan dirinya sendiri. Selain ambisi, manusia harus mempunyai kemauan untuk mengasah potensi-potensi yang ada dalam dirinya.

Mengasah berarti melatih secara terus menerus potensi agar dapat berdayaguna. Potensi yang ada pada diri manusia harus diasah melalui kegiatan yang positif, yaitu dengan berlatih secara terencana dan teratur. Jika tidak dilatih secara terencana dengan dilaksanakan secara terus menerus potensi akan menjadi melemah dengan sendirinya.

3. Mengembangkan Potensi Diri

Setelah mengenal bahwa setiap manusia memiliki potensi. *Apa yang harus dilakukan agar potensi dapat memiliki daya yang optimal?*

Sebagai individu yang sempurna, terlebih dahulu mengenali potensi dirinya sendiri. Setelah mengenal akan kelebihan dan kekurangan yang berada dalam diri sendiri manusia harus mau bekerja keras untuk mengembangkan potensi. Adanya bakat dan kegemaran merupakan potensi yang ada pada diri setiap manusia jika dikembangkan secara positif akan berubah menjadi suatu prestasi.

Banyak manusia yang berprestasi diawali dengan mengembangkan kegemaran itu secara teratur dan kesadaran yang tinggi. Tanpa adanya kemauan untuk mengembangkan kemampuan yang ada pada diri sendiri secara teratur tidak akan memperoleh hasil yang optimal.

Dalam mengembangkan potensi diri hendaknya bersifat obyektif dan realistis. *Apa yang dimaksud obyektif dan realistis?* Manusia dalam mengembangkan potensi diri harus bersikap jujur, apa adanya, tidak berlebih-lebihan, dan tidak mengurangi apa yang telah menjadi kenyataannya.

Dengan sikap obyektif ini manusia dalam mengembangkan potensi dirinya akan bersikap proporsional, sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun yang dimaksud dengan realistis adalah bahwa dalam mengembangkan potensi diri manusia selalu berlandaskan kenyataan.

Dengan sikap realistis manusia dalam mengembangkan potensi diri akan mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan, apa yang dikembangkan sudah sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. *Bagaimanakah jika dalam mengembangkan potensi tanpa tujuan yang jelas?* Mengembangkan potensi tanpa menghitung kemampuan yang dimiliki akan banyak mengalami kegagalan.



(Sumber : www.google.co.id.)

Gambar 4.10. ☞ *Lingkungan pergaulan mempengaruhi pengembangan potensi diri.*

Pengembangan potensi diri mempunyai manfaat untuk mengembangkan *nature* dan *nurture*. *Apa yang dimaksud dengan nature dan nurture?* Yang dimaksud dengan *nature* adalah sikap pribadi manusia yang terbentuk dari pembawaan sejak lahir. Sedangkan yang dimaksud dengan *nurture* sikap pribadi manusia yang terbentuk karena pengaruh lingkungan.

Untuk itu, pengembangan potensi diri berarti berusaha mengembangkan kepribadian yang berasal dari dalam/bakat dan dikembangkan melalui interaksi dalam lingkungan kehidupan manusia berada.

Pengembangan potensi sebagai upaya untuk memaksimalkan seluruh potensi yang positif dan meminimalkan seluruh kelemahan yang ada pada diri manusia. Pada akhirnya mampu bersikap sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk pribadi, sosial, dan makhluk Tuhan Yang Esa yang paling sempurna diantara makhluk yang lain.

Menurut La Rose, pengembangan diri dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

- a. bergaul dengan yang bukan satu profesi dalam artian beda profesi,
- b. pilihlah teman yang dapat diajak diskusi dan tidak mudah tersinggung, serta mau memberi umpan balik yang sesuai realita,
- c. bersikap dan berpikir positif tentang sesama,
- d. biasakan mengucapkan berterima kasih,
- e. biasakan mengatakan hal-hal yang menghargai orang lain, dan
- f. biasakan berbicara aktif (Budiyanto, 2005:8).

La Rose (1991:56), menyebutkan bahwa orang yang berpotensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. suka belajar dan mau melihat kekurangan dirinya,
- b. memiliki sikap yang luwes,
- c. berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan,

- d. tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan,
- e. memiliki sikap yang tulus bukan kelicikan,
- f. memiliki rasa tanggung jawab,
- g. menerima kritik saran dari luar, dan
- h. berjiwa optimis tidak mudah putus asa.

Tugas

Wawasan Produktivitas : Etos Kerja

Kalian tentu memiliki kegemaran atau hobi. Kegemaran itu dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi diri.

Buatlah suatu karya tulis tentang mengembangkan potensi diri melalui kegemaran diri sendiri.

4. Hambatan dalam Pengembangan Potensi Diri

Untuk mencapai suatu prestasi tidak semudah apa yang kita bayangkan. Setiap usaha yang kita lakukan selalu mendapatkan hambatan. *Jelaskan hambatan-hambatan yang sering kita hadapi dalam pengembangan potensi diri!*

Dalam upaya pengembangan diri diperlukan adanya usaha kerja keras. Tanpa adanya kemauan bekerja keras seseorang tidak mampu mengatasi suatu hambatan yang menghadang untuk kesuksesannya.

Hambatan-hambatan yang sering muncul sebagai penghalang dalam pengembangan potensi diri adalah sebagai berikut:

a. Hambatan yang berasal dari diri sendiri

Hambatan yang lahir dari diri sendiri seseorang meliputi adanya tidak adanya tujuan yang jelas, adanya prasangka buruk, tidak mau mengenal diri sendiri, tidak memiliki sikap sabar, adanya perasaan takut gagal, kurang motivasi diri bersikap tertutup dan sebagainya.



(Sumber : www.pikiran-rakyat.com)

Gambar 4.11. ☞ *Pergaulan yang tidak baik dapat menghambat pengembangan potensi diri*

b. Hambatan dari luar diri sendiri

Hambatan yang datangnya dari luar diri sendiri meliputi lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan bermain, budaya masyarakat, sistem pendidikan, kualitas makanan yang dikonsumsi (gizi), dan sebagainya.

Setelah diketahui adanya berbagai hambatan yang sering menjadikan kegagalan dalam setiap usaha yang kita lakukan maka harus diminimalkan agar potensi diri dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

Tugas

Life Skills : Kecakapan Sosial

Diskusikan dengan kelompok Anda dengan beranggotakan 5 (lima) siswa! Dalam pengembangan potensi diri setiap manusia selalu dipengaruhi faktor diri sendiri juga dipengaruhi dari pergaulan teman sebaya. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika yang memberikan pengaruh terhadap pengembangan potensi diri itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan sebayanya?

Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas!

Tugas

Life Skills : Kecakapan Personal

Tugas individu dikerjakan individu!

Carilah satu berita dari media masa baik yang tertulis atau elektronika mengenai banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para remaja. Tempelkan atau tulis dalam selembar kertas yang kemudian berilah analisis secukupnya!

C. Peran Aktif dalam Berbagai Aktivitas untuk Mewujudkan Prestasi Diri

Setiap saat, kita telah mendengar ucapan adanya siswa berprestasi, guru berprestasi, lurah berprestasi, dokter berprestasi, dan lain sebagainya. *Untuk itu, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar menjadi orang berprestasi?*

Untuk mencapai suatu prestasi sebenarnya setiap orang dapat melakukannya.

1. Langkah-Langkah Berprestasi

Manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi berbagai macam potensi diri. Untuk itu, semua potensi yang ada pada diri seseorang harus didayagunakan secara optimal untuk mendapatkan suatu prestasi. Berbagai upaya untuk mendapatkan suatu prestasi telah dilakukan setiap orang sesuai dengan bidang masing-masing.

Semua prestasi yang dicapai setiap orang bukanlah suatu hal yang secara kebetulan dalam memperolehnya. Akan tetapi, pencapaian suatu prestasi dilakukan dengan melalui perencanaan kegiatan secara sistematis dan dilaksanakan dengan secara proporsional, serta diperlukan adanya suatu evaluasi. Orang yang memiliki prestasi yang tinggi adalah orang-orang yang memiliki semangat kerja keras, disiplin, kreatif dan inovatif, tidak mudah putus asa, dan tahan uji.

Kalian dapat berprestasi di berbagai bidang, misalnya di bidang pendidikan, olahraga, kesenian, dan ekonomi.



(Sumber : www.akbidyo.ac)

Gambar 4.12. *Prestasi akademis dapat tercapai dengan tekun belajar*

a. Bidang Pendidikan

Seorang siswa yang menginginkan prestasi akademis yang tinggi harus memiliki sikap rajin belajar. Dengan belajar yang teratur seorang siswa mampu memperoleh nilai yang terbaik. Nilai yang terbaik inilah yang memberikan predikat pada seorang siswa yang berprestasi. Oleh karena itu, kalian harus memiliki semangat rajin belajar agar dapat menjadi siswa yang berprestasi. Selain berprestasi dalam bidang akademis seorang siswa diharapkan juga memiliki prestasi di bidang yang lain.

b. Bidang Olahraga

Prestasi di bidang olahraga dapat dirintis dari berlatih secara rutin dan disiplin dengan tidak mengenal lelah baik fisik maupun mental. Berlatih dengan disiplin maka seorang atlet dapat meraih prestasi sebagai juara nasional ataupun internasional.

c. Bidang Kesenian

Dalam bidang kesenian untuk mencapai prestasi yang tinggi diperlukan juga sikap tekun dan rajin berlatih, dan apabila telah memiliki kemampuan yang optimal harus berani tampil dalam berbagai perlombaan. Dari mengikuti perlombaan atau kegiatan yang lain akan diperoleh pengalaman yang dapat dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar bakat dan potensi yang dimiliki.

d. Bidang Ekonomi

Untuk mencapai prestasi dalam usaha ekonomi dibutuhkan sikap yang ulet dan kemandirian dalam usaha, serta adanya motivasi yang kuat dalam mengembangkan usaha yang dijalankan. Dalam dunia wiraswasta untuk mendapat suatu prestasi diperlukan juga adanya kemampuan dalam menjalin hubungan kerja sama dengan mitra kerja dengan memegang teguh suatu kepercayaan.

Untuk itu, sebagai wiraswasta yang menginginkan prestasi yang tinggi harus memiliki sikap ketahanan diri yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dalam dunia usaha.



Tugas

Wawasan Produktivitas : Semangat Kewirausahaan

Bacalah buku tentang Keterampilan. Misal keterampilan elektronika dan membuat makanan kecil. Praktikkanlah keterampilan itu sehingga menghasilkan karya yang dapat dijual.

2. Berprestasi untuk Keunggulan Bangsa

Apa yang harus dilakukan sebagai putra bangsa yang dalam memasuki era globalisasi? Guna menghadapi era globalisasi bangsa Indonesia harus ikut bersaing secara positif. Bangsa Indonesia tidak boleh sekedar sebagai penonton terjadinya perubahan kehidupan manusia di muka jagat raya ini. Di tengah-tengah persaingan yang dahsyat ini bangsa Indonesia harus berusaha meraih keunggulan diri. Bangsa Indonesia harus mampu berkompetensi dengan bangsa-bangsa lain.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan sumber alam yang melimpah harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Segala hasil industri Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing dengan hasil industri dari luar negeri. Dengan terbukanya pasar bebas maka produk-produk dari luar negeri telah tersedia di negara Indonesia secara bebas. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berusaha untuk meningkatkan kualitas hasil produksi dalam negeri sehingga dapat diminati oleh bangsanya sendiri.

Lalu apa yang harus kita perbuat? Sebagai bangsa yang memiliki harga diri sudah semestinya untuk berupaya supaya tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia harus berbenah diri, berupaya berani bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Dalam sejarah pembangunan Indonesia telah pernah mengalami puncak kejayaan meskipun setelah terjadi krisis ekonomi bangsa Indonesia menjadi terpuruk. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Dengan tersedia sumber daya manusia (SDM) berkualitas bangsa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Selain itu, bangsa Indonesia mampu mengelola sumber alam sendiri. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan mendapatkan hasil produksi yang berkualitas yang mempunyai daya saing dalam dunia internasional. Akan tetapi, apabila Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas maka akan tetap menjadi bangsa yang tertinggal dengan bangsa-bangsa lain.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pembangunan sektor pendidikan sudah seharusnya menjadi prioritas utama.

Adanya pendidikan yang bermutu tinggi akan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Suatu bangsa akan dihargai, dihormati, dan disegani oleh bangsa-bangsa lain apabila bangsa memiliki suatu keunggulan dalam berbagai bidang kehidupan. Keunggulan yang dimiliki suatu bangsa dapat menjadikan suatu bangsa itu menjadi sederajat dengan bangsa-bangsa yang telah maju, serta menjadikan suatu bangsa yang mandiri tidak lagi menggantungkan dengan bangsa-bangsa lain.

Bangsa Indonesia, sebenarnya telah pernah mencapai suatu prestasi yang tinggi di tingkat internasional. Prestasi yang pernah diraih bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut:



(Sumber : www.altair.com.pl)

Gambar 4.13. ☞ *Sumber daya manusia yang unggul dapat menghasilkan produk teknologi tinggi*

- a. Para pendiri negara berhasil memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945,
- b. Di sektor pertanian bangsa Indonesia pernah berswasembada pangan,
- c. Di cabang olah raga, putra-putra bangsa meraih berbagai kejuaraan tingkat internasional,
- d. Para pelajar Indonesia meraih juara internasional dalam olimpiade sains tingkat internasional,



(Sumber : www.pikiran-rakyat.com)

Gambar 4.14. ☞ *Indonesia adalah negara cinta perdamaian bagi umat manusia di dunia*

- e. Di bidang politik bangsa-bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika I di Bandung,
- f. Di bidang teknologi Indonesia berhasil membuat pesawat kapal terbang,
- g. Putra-putra bangsa Indonesia melakukan pelayaran keliling dunia dengan kapal layar “Phinisi Nusantara”,
- h. Di bidang pertahanan keamanan dunia Indonesia pasukan keamanan internasional di bawah PBB.

Wawasan Kebhinekaan : Kebangsaan

Carilah berita di media massa tentang keunggulan bangsa Indonesia di berbagai bidang. Buatlah daftar keunggulan tersebut dan berilah analisisnya. Hasilnya serahkan kepada gurumu!

3. Memotivasi Sikap Berprestasi sebagai Keunggulan Bangsa

Hasil prestasi merupakan wujud nyata dari usaha yang dicapai oleh setiap dalam melakukan usaha. Oleh karena itu, agar setiap orang tetap terus berprestasi apa yang dilakukan oleh pemerintah? Agar para putra bangsa terus tetap berkarya dan memperoleh prestasi yang tinggi diperlukan adanya motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang terarah kepada pemenuhan kebutuhan psikis atau kerohanian. Motivasi dalam suatu kegiatan, dapat memberi pengaruh terhadap kekuatan dalam suatu kegiatan dan mempengaruhi terhadap suatu tujuan.

Suatu kegiatan untuk mencapai suatu prestasi tanpa adanya motivasi, kegiatan akan dilakukan secara tidak sungguh-sungguh, tidak terarah, dan kemungkinan tidak akan berhasil. Sebaliknya apabila motivasinya besar dan kuat, maka akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, terarah, dan penuh semangat, sehingga memungkinkan akan berhasil lebih besar.

Dengan adanya motivasi yang besar dan kuat, mendorong para putra bangsa Indonesia berani berkompetisi dalam mencapai suatu prestasi. Persaingan dalam mencapai suatu prestasi hendaknya dilaksanakan secara terbuka dan proporsional.

Sikap terbuka dan proporsional akan memberikan persaingan dalam berkompetensi secara sehat dan dapat menumbuhkan sikap saling mendukung antara satu dengan lainnya. Agar tumbuh sikap kompetisi yang sehat maka diperlukan landasan yang bersifat sebagai berikut:



(Sumber : 50 Tahun Indonesia Merdeka)

Gambar 4.15. 舎 *Pemerintah menyediakan balai latihan kerja untuk memotivasi peningkatan prestasi*

- a. memiliki sikap simpatik dan menghargai hasil karya orang lain,
- b. adanya sikap yang jujur dalam berkompetisi sehingga tidak menghalalkan segala cara dalam mendapatkan prestasi,
- c. adanya sikap yang mengutamakan persahabatan bukan bermusuhan,
- d. adanya sikap yang menganggap orang lain bukan lawan tetapi sebagai kawan dalam mencapai suatu prestasi,
- e. adanya sikap yang berjiwa besar yaitu mau mengakui keunggulan atau kelebihan orang lain,
- f. adanya sikap yang tidak sombong atas keberhasilannya.

Setiap orang yang berhasil mencapai prestasi hendaknya diberikan suatu penghargaan. Melalui penghargaan seseorang akan terus melakukan kegiatan yang lebih keras dengan harapan dapat memperoleh prestasi yang lebih tinggi lagi. Penghargaan terhadap seseorang yang berhasil mengharumkan bangsa dan negara dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk.

Penghargaan yang diberikan kepada orang yang berprestasi dimulai dari piagam penghargaan, piala, medali, dan juga berupa uang. Oleh karena itu, dalam menerima penghargaan janganlah dilihat wujud dan jumlah penghargaan yang diterima. Yang perlu dipahami adalah arti dari penghargaan itu sendiri. Dengan prestasi yang tinggi nilainya dengan mendapatkan suatu penghargaan, seseorang akan mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa dirinya adalah orang yang berprestasi.

Tugas

Wawasan Produktivitas : Etos Kerja

Berkunjuglah kepada tokoh-tokoh masyarakat berprestasi yang berada di lingkungan tempat tinggalmu bersama dengan kelompokmu. Lakukan wawancara dengan mereka tentang langkah-langkah yang pernah dilakukan untuk mencapai prestasi tersebut dan cara-cara mempertahankan prestasinya. Hasil wawancara kemudian dibuat sebuah laporan dan presentasikan di depan kelas.

Tugas

Life Skills : Kecakapan Personal

Kerjakanlah secara individu!

Carilah sebuah berita dari surat kabar, majalah, buletin atau media masa yang lain adanya kisah nyata yang dialami seseorang yang berprestasi, akan tetapi kemudian mengalami kegagalan dan menjadi orang yang sangat menderita. Berita ini ditempelkan pada selembar kertas dan berilah analisis secukupnya.

Rangkuman

- Prestasi merupakan hasil yang diperoleh dari usaha seseorang dalam hidupnya.
Orang yang berprestasi adalah orang yang dianggap sukses dalam bidang tertentu karena ia memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain.
- Prestasi yang dicapai setiap orang meliputi prestasi belajar, karya seni, olahraga dan lingkungan hidup.
- Untuk mendapatkan prestasi yang tinggi diperlukan adanya sikap optimisme, percaya diri, selalu tertantang untuk menyelesaikan semua hambatan yang ada dalam diri sendiri ataupun dari luar diri sendiri.

- Prestasi diri merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh setiap orang. Prestasi diri sebagai sumber informasi, sebagai kebanggaan diri, dan untuk mengetahui kecerdasan seseorang.
- Potensi adalah kemampuan yang kemungkinan dapat dikembangkan. Potensi setiap orang berbeda-beda.
- Potensi yang ada pada setiap orang meliputi potensi fisik, mental intelektual, sosial, mental spiritual dan ketahanan-malangan.
- Dalam era globalisasi bangsa Indonesia harus memiliki kesiapan dan kemampuan untuk bersaing. Pendidikan menjadi prioritas utama dalam peningkatan potensi diri.
- Pengembangan potensi diri pada umumnya merupakan pengembangan nature dan nurture.
- Dalam pengembangan potensi diri sering mendapat hambatan. Hambatan itu berasal dari dalam diri sendiri dan datang dari luar diri sendiri.
- Untuk memperoleh prestasi yang tinggi setiap orang harus mendayagunakan seluruh potensi yang ada pada diri sendiri secara optimal.
- Seseorang yang memiliki motivasi untuk berprestasi yang tinggi memiliki sikap yang positif untuk meraih prestasi yang tinggi.
- Seseorang agar mendapat prestasi yang tinggi perlu dimotivasi dengan diberi penghargaan yang berupa piagam, piala, lencana, uang dan lain sebagainya.

Uji Kompetensi

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Faktor yang paling utama untuk mendapatkan suatu prestasi adalah
 - a. dorongan dari diri sendiri
 - b. bantuan teman sejawat
 - c. dorongan orang tua
 - d. pengarahan guru
2. Berikut ini yang **bukan** termasuk kiat-kiat yang dikemukakan AA. Qowiy untuk menghadapi berbagai permasalahan adalah
 - a. tegar dalam menghadapi permasalahan
 - b. menghabiskan waktu untuk mencapai tujuan
 - c. berani mengambil resiko
 - d. tenang dalam bertindak
3. Berikut ini salah satu berprestasi dalam ekonomi adalah
 - a. menghadiri rapat tahunan koperasi
 - b. membantu para dermawan
 - c. mengikuti lomba pasaran bebas
 - d. mampu mengembangkan usaha yang dijalankan
4. Sikap tekun, teliti, dan daya tahan terhadap tekanan, merupakan unsur-unsur potensi yang termasuk dalam klasifikasi
 - a. kepribadian
 - b. emosional
 - c. sikap kerja
 - d. kemampuan dasar
5. Potensi seseorang akan berkembang dengan baik apabila didukung oleh beberapa faktor berikut ini, **kecuali**
 - a. minat
 - b. motivasi
 - c. intelektual
 - d. perasaan tidak yakin

6. Dengan spiritual quotient (SQ) manusia menjadi makhluk yang utuh secara
 - a. intelektual, emosional, dan spiritual
 - b. intelektual, pisik, dan rohani
 - c. pisik, mental, dan emosi
 - d. bakat, intelektual fisik
7. Potensi diri yang berasal dari diri sendiri adalah
 - a. lingkungan bekerja
 - b. pendidikan yang dianut
 - c. budaya setempat
 - d. tidak mau mengenal diri
8. Prestasi di bidang seni budaya dapat diperoleh lewat
 - a. keanggotaan partai politik
 - b. aktif dalam karang taruna
 - c. mengikuti lomba menyanyi
 - d. aktif dalam organisasi ekonomi
9. Salah satu ciri orang memiliki prestasi adalah
 - a. bersikap optimis terhadap impiannya
 - b. mudah putus asa apabila mengalami kegagalan
 - c. tekun dalam melakukan latihan jika dimotivasi
 - d. memiliki sikap yang ulet dan tidak mudah putus asa
10. AQ adalah potensi yang berhubungan dengan
 - a. emosional
 - b. keuletan
 - c. motivasi
 - d. kesadaran diri

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar!

1. Orang yang berprestasi adalah orang
2. Keinginan untuk mendapat prestasi yang tinggi diperlukan adanya
3. Bakat, kepandaian, minat, dan motivasi merupakan faktor yang berasal
4. Prestasi yang dicapai seseorang akan memberikan kebanggaan

5. Potensi merupakan suatu daya yang
6. Mata, kaki, telinga, dan hidup merupakan contoh potensi manusia berupa
7. Keinginan yang mendorong manusia untuk meraih suatu keinginan dinamakan
8. Kepribadian seseorang yang terbentuk karena pengaruh lingkungan disebut
9. Persaingan dalam mencapai suatu prestasi hendaknya dilakukan secara
10. Suatu bangsa akan mendapat penghargaan dari bangsa lain apabila

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prestasi diri!
2. Sebutkan 2 (dua) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap prestasi seseorang!
3. Sebutkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah potensi diri agar dapat didayagunakan!
4. Mengapa setiap pribadi harus mengenal potensi diri masing-masing?
5. Sebutkan sikap-sikap yang harus diperhatikan oleh siapa saja yang berkeinginan untuk mencapai suatu prestasi diri!

Latihan Ulangan Semester Genap

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Globalisasi merupakan suatu proses mengecilnya dunia dan menguatnya kesadaran akan dunia sebagai satu kesatuan. Pernyataan ini dikemukakan oleh
 - a. Robert Cox
 - b. Robettson
 - c. Bank Dunia
 - d. A.G. McGrew
2. Berikut ini alat komunikasi yang banyak dipergunakan orang untuk berhubungan dengan orang lain ialah
 - a. pesawat
 - b. kamera digital
 - c. mobil
 - d. telepon
3. Organisasi WTO, APEC, dan AFTA merupakan faktor pendorong globalisasi di bidang
 - a. ekonomi
 - b. politik
 - c. teknologi
 - d. budaya
4. Dengan globalisasi membuat perubahan kehidupan masyarakat dunia menjadi semakin
 - a. sederhana
 - b. istimewa
 - c. berkembang
 - d. multidimensional
5. Pada mulanya globalisasi merupakan
 - a. suatu gejala ekonomi
 - b. proses gejala hukum dalam masyarakat
 - c. terbentuknya kerjasama antar dua negara
 - d. globalisasi membuat satu kehidupan masyarakat

6. Bagi Indonesia globalisasi merupakan sebagai
 - a. hal-hal yang biasa saja tidak perlu ditakuti karena globalisasi akan berjalan sesuai dengan jamannya
 - b. tantangan untuk membuktikan pada dunia internasional bahwa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain
 - c. perlu ditanggapi tetapi tidak perlu memaksakan masyarakat, hal ini globalisasi menjadi tanggung jawab pemerintah
 - d. cukup dipergunakan sebagai pertimbangan, karena Indonesia telah merdeka selama 60 tahun lebih

7. Pada saat ini, orang dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain, meskipun jaraknya begitu jauh. Hal ini berkat kemajuan
 - a. di bidang komunikasi
 - b. di bidang informasi
 - c. di bidang politik
 - d. di bidang transportasi

8. Lahirnya globalisasi membuat batas-batas antar negara menjadi semakin kabur. Ini berarti, globalisasi seolah menjadi sebuah fenomena yang dinamakan
 - a. internasionalisasi
 - b. nasionalisme
 - c. global village
 - d. imperialisme

9. Yang menjadi dasar pertimbangan Indonesia menetapkan politik bebas aktif adalah
 - a. wilayah Indonesia sangat strategis
 - b. keinginan merdeka secara menyeluruh
 - c. tidak lagi menjadi subyek
 - d. hasil rapat BP KNIP 1948

10. Berikut ini yang **bukan** perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah
- menolak fusi PBB
 - aktif dalam GNB
 - perintis ASEAN
 - penyelenggaraan KAA 1955
11. Yang menjadi pedoman perjuangan politik luar negeri bebas aktif adalah
- Piagam PBB
 - Dasasila Bandung
 - Piagam Hak Asasi Manusia
 - Piagam Atlantik Charter
12. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- Negara Indonesia menjalankan politik damai
 - Indonesia negara yang sedang berkembang
 - Negara menjalin persahabatan antarbangsa dengan sikap saling menghormati
 - Negara Indonesia menerapkan politik yang melindungi bangsa sendiri
 - Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional
 - Negara Indonesia mengutamakan sendi-sendi hukum nasional saja

Dari pernyataan di atas yang merupakan prinsip-prinsip pokok dasar untuk melaksanakan politik luar negeri adalah

- 1, 3, 5
- 2, 4, 6
- 1, 2, 5
- 2, 4, 6

13. Perhatikan pernyataan berikut ini:
1. Semakin luasnya ekspor produk Indonesia
 2. Indonesia lebih mengutamakan produk dalam negeri
 3. Negara Indonesia, dapat mengikuti perdagangan global
 4. Indonesia selalu menolak semua aspek yang masuk di Indonesia
 5. Indonesia telah terpencil dengan bangsa lain
 6. Di Indonesia tumbuh dan berkembang berbagai budaya baru

Pernyataan di atas yang merupakan dampak positif adanya globalisasi adalah

- | | |
|------------|------------|
| a. 1, 3, 5 | c. 2, 4, 6 |
| b. 1, 2, 5 | d. 2, 5, 6 |
14. Dengan semakin banyaknya budaya asing yang masuk Indonesia, maka sikap kita adalah
- a. menerima secara keseluruhan
 - b. menolak karena tidak sesuai dengan keinginan
 - c. menerima yang sesuai dengan keinginan
 - d. menerima dengan menyeleksi yang sesuai dengan kepribadian bangsa
15. Orang yang tidak setuju terhadap globalisasi menganggap bahwa merupakan
- a. bentuk baru penjajahan yang dilakukan bangsa lain
 - b. untuk mengeksploitasikan bangsa lain
 - c. rekayasa dari bangsa yang maju
 - d. keinginan negara maju untuk menekan negara berkembang
16. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kemajuan daerah tergantung pada
- a. partisipasi masyarakat
 - b. pendapatan asli daerah
 - c. besar kecilnya dana alokasi umum
 - d. bantuan pemerintah pusat

17. Berikut ini yang **tidak** termasuk dampak negatif dari adanya globalisasi adalah
- tumbuhnya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat
 - tumbuhnya budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
 - tumbuhnya semangat berkompetensi yang sehat
 - semakin mudah masuknya barang-barang ilegal
18. Sarana transportasi yang canggih dapat mempengaruhi hal-hal berikut ini, **kecuali**
- politik
 - sosial
 - budaya
 - komunikasi
19. Pencemaran lingkungan merupakan contoh dampak globalisasi di bidang ...
- politik
 - seni
 - ekonomi
 - teknologi
20. Berikut ini nilai globalisasi yang kurang mendukung kemajuan bangsa Indonesia adalah
- kemandirian
 - persaingan sehat
 - kreativitas
 - individualistis
21. Hasil usaha yang diperoleh dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang disebut
- harga diri
 - prestasi diri
 - potensi diri
 - motivasi diri
22. Berikut ini yang termasuk prestasi diri seseorang adalah
- prestasi kerja
 - orientasi diri
 - prestasi belajar
 - prestasi olah raga
23. Berikut ini merupakan ciri orang yang memiliki prestasi diri adalah
- tidak putus asa tetapi kurang semangat juangnya
 - menjalin kerja sama dengan pihak lain tetapi kurang optimis kerjanya
 - berani mengambil resiko dan tidak putus asa
 - selalu berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi

24. Supaya kita memiliki prestasi yang baik, maka sejak dini harus
- membiasakan kerja dengan petunjuk orang lain
 - membuat rencana kerja secara sistematis dan proposional
 - melatih diri secara bersekala untuk berlomba
 - mengikuti segala kegiatan perlombaan
25. Prestasi diri mempunyai arti penting bagi setiap orang dalam hidupnya, di antaranya dapat dipergunakan untuk
- merebutkan penghargaan dalam lomba
 - berkompetisi secara sehat
 - mengetahui tingkat kepandaian seseorang
 - memberi penghargaan seseorang
26. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia telah dilengkapi dengan berbagai potensi. Potensi yang ada pada manusia berupa
- cipta, karsa, dan akal
 - karsa, jiwa, dan kehendak
 - cipta, rasa, dan karsa
 - naluri, rasa, dan hati
27. Kata potensi sering diartikan sebagai berikut ini, **kecuali**
- dorongan
 - daya yang belum terwujud
 - kekuatan
 - kemampuan
28. Potensi yang dipergunakan untuk mengendalikan amarah, tanggung jawab, dan motivasi dinamakan
- Adversity Quotient*
 - Intellectual Quotient*
 - Emotional Quotient*
 - Spiritual Quotient*

29. Berikut ini yang merupakan perilaku yang dapat menghambat pengembangan potensi diri yang timbul dari diri sendiri adalah
- lingkungan kerja
 - lingkungan keluarga
 - tingkat pendidikan
 - berburuk sangka
30. Gardner mengemukakan bahwa seorang komponis dalam berkarya lebih menekankan kecerdasan
- spasial
 - musik interpersonal
 - logis matematis
 - interpersonal
31. Dalam berkompetensi untuk memperoleh suatu prestasi diri diperlukan adanya sikap yang positif yaitu
- berjiwa besar dan mengakui keunggulan orang lain
 - acuh tak acuh pada orang lain
 - mengunggulkan dirinya sendiri
 - optimisme karena akan berhasil dengan sendirinya
32. Contoh prestasi yang pernah dicapai bangsa Indonesia adalah sebagai berikut, **kecuali**
- Indonesia memperoleh dana pinjaman dari Bank Dunia sebagai modal
 - berjiwa besar dan mengakui keunggulan orang lain
 - Indonesia pernah berswasembada beras
 - Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan KAA
33. Untuk meraih keunggulan dan sederajat dengan bangsa-bangsa yang maju, bangsa Indonesia berupaya melalui
- memperkecil pinjaman modal asing
 - meningkatkan sumber daya manusia
 - meningkatkan impor dari negara maju
 - memperbanyak pinjaman dari negara lain

34. Dalam sikap kompetitif harus menghindari sifat
- merendahkan orang lain
 - mengunggulkan diri
 - percaya diri
 - optimis
35. Berikut ini cara berprestasi dalam bidang politik dapat dilakukan dengan
- aktif dalam karang taruna
 - aktif dalam kerja bakti desa
 - mengikuti lomba pidato
 - memberikan suara dalam pemilu
36. Prestasi di bidang seni budaya dapat diperoleh lewat
- keanggotaan partai politik
 - aktif dalam karang taruna
 - mengikuti lomba menari
 - aktif dalam organisasi ekonomi
37. Faktor-faktor dari luar yang dapat mempengaruhi prestasi seseorang ialah
- gizi
 - bakat
 - motivasi
 - potensi
38. Berikut ini yang **bukan** termasuk prestasi yang dicapai setiap orang adalah
- prestasi belajar
 - prestasi kerja
 - prestasi tertunda
 - prestasi olah raga
39. Yang **tidak** termasuk kiat-kiat untuk menghadapi suatu kesulitan untuk berprestasi adalah
- bersikap yang tegar
 - mampu mengambil hikmah dari suatu kesulitan
 - bersikap gigih apabila menuntut haknya
 - bersikap sedih jika mengalami kegagalan
40. Kemampuan untuk mengamati, memahami, dan menyusun pola atau unsur dalam lingkungan alami merupakan kecerdasan
- linguistik verbal
 - kecerdasan visual
 - kecerdasan naturalis
 - kecerdasan kinestetik

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Istilah globalisasi berasal dari kata
2. Globalisasi merupakan suatu proses dimana penduduk dunia terhubung dalam komunitas dunia yang tunggal, komunitas global. Pernyataan ini merupakan pendapat dari
3. Globalisasi ditandai dengan meningkatkan aktivitas perekonomian yang dikuasai perusahaan-perusahaan
4. Indonesia menetapkan politik luar negeri yang
5. Globalisasi memberi dampak negatif terhadap perkembangan
6. Prestasi merupakan wujud nyata optimalisasi dari
7. Potensi yang ada dan paling utama pada diri manusia adalah
8. Pengembangan potensi diri merupakan pengembangan nature dan
9. Untuk memperoleh prestasi yang tinggi setiap orang harus
10. Prestasi dapat diraih di berbagai bidang

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan 2 (dua) faktor-faktor penggerak globalisasi!
2. Apa yang dimaksud politik bebas aktif?
3. Bagaimanakah sikap bangsa Indonesia dengan adanya globalisasi?
4. Apakah yang dimaksud dengan kecerdasan ruang visual?
5. Sebutkan 3 (tiga) prestasi yang pernah diraih bangsa Indonesia!

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Margono, Taufik Rahman, 2003. *Kewarganegaraan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Budiyanto, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta : Erlangga.
-, 2005. *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X*. Jakarta : Erlangga.
-, 2005. *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI*. Jakarta : Erlangga.
-, 2005. *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XII*. Jakarta : Erlangga.
- Citra Triwanto P, 2004. *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas 3*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
-, 2004. *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas 2*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- C.S.T. Kanssil, 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Depdiknas. 2005. *Kurikulum 2004 Pendidikan Kewarganegaraan SMP*. Jakarta : Depdiknas.
-, 2005. *Materi Latihan Terintegrasi Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
-, 2006. *Kurikulum 2006 Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Endang Zaelani Sukaya, 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Paradigma.
- Engkoswara, 1999. *Menuju Indonesia Modern*. Bandung : Yayasan Amal Keluarga. Harian Kedaulatan Rakyat Harian Kompas
- Inu Kencana Syafie, 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.
- La Rose, 1991. *Pengembangan Pesona Pribadi*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- Max Boli Sabon. 1992. *Ilmu Negara* : Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Miriam Budiardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Muhlisin, Cahyaningsih. 2005. *Kewarganegaraan untuk SMP Kelas 3*. Jakarta : Ganeca Exact.
-, 2005. *Kewarganegaraan Untuk SMP Kelas 1*. Jakarta : Ganeca Exact
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2004. *Landasan Psikologi Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Paulus Santosa, M. Siringo-ringo. 2003. *Kewarganegaraan 1*. Bekasi : Galaxy Puspa Mega.

- Saronji Dahlan, Asy'ari . 2005. *Kewarganegaraan*. Jakarta : Erlangga.
- Sugiharsa, Gunawan. 2004. *Kewarganegaraan*. Klaten : Sahabat.
- Sumadi Suryabrata. 2004. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tim Abadi Guru. 2004. *Kewarganegaraan untuk Kelas VII*. Jakarta : Erlangga.
- Vembriarto. 1994. *Kamus Pendidikan*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wijianto. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas IX*. Jakarta : Piranti Darma Kalotama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000
- Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1982. Ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
- PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kamus Kecil

- Adversity quotient** : Kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi.
- Angket** : Hak untuk penyelidikan yang menyangkut kepentingan orang banyak.
- Akuntabel** : Dipertanggungjawabkan
- Daerah Otonom** : Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
- De facto** : Berdasar kenyataan (fakta)
- De jure** : Menurut hukum internasional
- Dekonsentrasi** : Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah oleh pemerintah (pusat) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau instansi vertikal di wilayah tertentu.
- Emosotional quotient** : Kecerdasan yang ada pada otak manusia (terutama otak sebelah kanan).
- GDP (Gross Domestic Product)** : Nilai total barang atau jasa yang dihasilkan oleh buah negara dalam waktu satu tahun
- Global** : Mencangkup seluruh dunia
- Globalisasi** : Proses dimana hubungan sosial dan saling ketergantungan antar negara dan antar manusia di dunia ini semakin besar.

Hedonisme	: Paham yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup
Individualisme	: Paham yang bersifat mementingkan kebutuhan diri sendiri sebelum kebutuhan orang lain.
Inovasi	: Pembaharuan
Intellectual quotient	: Kecerdasan yang ada pada otak manusia (terutama otak belahan kiri).
Interpelasi	: Meminta penjelasan atau keterangan resmi kepada pemerintah.
Ius sanguinis	: Suatu cara penetapan kewarganegaraan seseorang berdasar garis keturunan, yakni garis keturunan orang tuanya tanpa melihat dimana ia dilahirkan.
Ius soli	: Suatu cara penetapan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran.
Komunitas	: Masyarakat
Madani	: Kelompok masyarakat yang berbeda-beda dapat hidup kerjasama secara damai.
Motivasi	: Suatu kondisi dalam diri individu yang mendorong individu untuk berbuat mencapai suatu tujuan.
Multinasional	: Berada di banyak negara
Naturalisasi	: Suatu cara penetapan kewarganegaraan seseorang berdasarkan proses hukum kewarganegaraan yang berlaku dalam suatu negara (yakni memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang).
Nature	: Kepribadian seseorang yang terbentuk dari bawaan/bakat/ lahir.

Nurture	: Kepribadian seseorang terbentuk karena pengaruh lingkungan.
Otonomi Daerah	: Hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Partisipasi	: Berturut serta dalam suatu kegiatan
Prakarsa	: Inisiatif atau usaha (tindakan, gagasan, dan sebagainya) yang mula-mula.
Pragmatis	: Hal-hal yang amat bermanfaat
Politik	: Sesuatu yang berkaitan dengan kebijaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengatur negara dan bangsa
Potensi diri	: Kemampuan seseorang yang sifatnya asih tersimpan.
Prestasi diri	: Hasil usaha atau kegiatan yang dilakukan seseorang.
Regional	: Bersifat daerah, kedaerahan
Spiritual quotient	: Kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar.
Subsidi	: Bantuan uang dan sebagainya kepada suatu organisasi atau perkumpulan dari pemerintah.
Tugas pembantuan	: Penugasan dari pemerintah (pusat) kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Indeks

A

agresi 25
ancaman 23

B

Belanda 4

C

Ciciro 4

D

daerah 43
defakto 10
de jure 10
dekosentrasi 45
desentralisasi 45

E

evaluasi 66

F

fungsi Negara 13, 15

G

globalisasi 83, 85

H

hak 21

I

informasi 88
internet 88

J

Jerman 4

K

kebijakan publik 64
kepala daerah 53
Konvensi Montevideo 6

L

La Rose 126
legeslatif 55

M

Meriam Budiardjo 4

N

nation 5
naturalisasi 7

O

otonomi 43, 45, 46

P

partisipasi 58, 59
pemerintah daerah 57
politik luar negeri 93, 94
potensi diri 121
prestasi diri 111, 113

Q

quotient 123

R

rakyat 6

S

sentralisasi 45

T

teknologi 88
tujuan negara 13

U

unsur deklaratif 6
unsur konstitutif 6
unsur-unsur negara 5

W

warga negara 6, 7
wilayah 7



ISBN : 979-1170-52-5

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

HET :



ISBN 978-979-068-153-8 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-979-068-163-7

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.8.551-